



SATU DATA



BerAKHLAK **#bangga**
melayani bangsa

BUKU METADATA STATISTIK SEKTORAL

KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNya maka kami yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Persandian dan Statistik dapat menyelesaikan Buku Metadata Tahun 2023. Buku ini dibuat dalam rangka untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, agar terwujud ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga dapat dibagipakaikan. Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data; harus memiliki Metadata; harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan juga harus menggunakan Kode Referensi Data Induk.

Buku ini merupakan hasil dari upaya kami untuk menyajikan dokumen tentang metadata statistik yang disusun guna pemenuhan metadata atas elemen – elemen data yang terdapat dalam Aplikasi Satu Data Kabupaten Semarang, penyusunan ini dilakukan guna memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Serta kami berusaha untuk menyajikan dokumen ini se jelas mungkin agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Adapun dalam buku ini 3 jenis metadata telah kami sajikan, mulai dari metadata kegiatan sejumlah 37; metadata variabel sejumlah 227; dan metadata indikator sejumlah 144 dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Semarang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kami dalam penyusunan buku ini. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik dalam memahami lebih lanjut tentang metadata statistik dan semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu statistik dan penggunaan data yang berkualitas. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Ungaran, 29 November 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
SEMARANG



PETRUS TRIYONO, S.Sos, M.Si

NIP. 19720423 199203 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG.....	1
BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.....	7
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KAB. SEMARANG	13
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. SEMARANG	19
BAGIAN TAPEM SEKRETARIAT DAERAH KAB. SEMARANG	25
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. SEMARANG	36
BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SEMARANG	42
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. SEMARANG	46
DINAS KESEHATAN KAB. SEMARANG.....	50
DINAS SOSIAL KAB. SEMARANG.....	54
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG	64
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KAB. SEMARANG	70
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SEMARANG	74
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SEMARANG	80
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SEMARANG	85
DISKOMINFO KAB. SEMARANG.....	89
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. SEMARANG	99



DINAS TENAGA KERJA KAB. SEMARANG.....	103
DINAS PARIWISATA KAB. SEMARANG.....	108
DINAS PARIWISATA KAB. SEMARANG	113
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG	118
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN KAB. SEMARANG.....	123
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. SEMARANG.....	128
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SEMARANG	136
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. SEMARANG	140
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. SEMARANG	145
DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SEMARANG	150
INSPEKTORAT	155
KESBANGPOL KAB. SEMARANG	164
RUMAHSAKIT GUNAWAN MANGUNKUSUMO.....	169
RUMAH SAKIT GONDO SUWARNO	174
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. SEMARANG.....	179
SEKRETARIAT DPRD KAB. SEMARANG.....	183
DESA KALISIDI.....	188

BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Produk Hukum Daerah Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Sektor Publik Perpajakan Dan Regulasi Pasar	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jalan Diponegoro No 14 Sembungan Kecamatan Ungaran Barat	
1,3	Telepon	-246921014	
1,4	Faksimile	-246921992	
1,5	Email	Setda@kabsemarang.go.id	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
	Alamat	Jalan Diponegoro No 14 Sembungan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat	
	Telepon	(024) 6921014	
	Faksimile	Setda@kabsemarang.go.id	
	Email	(024) 6921992	
III. Perencanaan dan Persiapan			

3,1	Latar Belakang	Dalam Rangka Pemenuhan Kompilasi Terhadap Data Sektoral Dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Agar Produk Hukum Dapat Terdokumentasi Dengan Baik.			
3,2	Tujuan Kegiatan	Bertujuan Untuk Melakukan Kompilasi Terhadap Data Sektoral Dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Yang Menjadi Kebutuhan Data Kabupaten Semarang Yang Dipenuhi Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	03 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023		
	2	Desain	01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	01 Maret 2023 s/d 31 Mei 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Juni 2023 s/d 29 Juli 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 Agustus 2023 s/d 30 September 2023		
6	Diseminasi Hasil	03 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023			
7	Evaluasi	01 November 2023 s/d 30 November 2023			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang diundangkan	Regulasi	produk hukum daerah yang diundangkan	lima tahun terakhir
	2	Peraturan Bupati Kabupaten Semarang yang diundangkan	Regulasi	produk hukum daerah yang diundangkan	lima tahun terakhir
	3	Kabupaten Semarang yang diterbitkan	Regulasi	Produk Hukum Daerah yang diterbitkan	lima tahun terakhir
	4	Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang	Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan	Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan dilakukan secara tatap muka	lima tahun terakhir

	5	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang dan Diseminasi Nilai-Nilai HAM	Sosialisasi Raperda di 19 Kecamatan	Sosialisasi Raperda di 19 Kecamatan dilakukan secara tatap muka	lima tahun terakhir
	6	Kelompok KADARKUM di Kabupaten Semarang Koordinasi, Konsultasi dan Advokasi	Kelompok Kadarkum	Kelompok Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang mendapatkan Pembinaan	lima tahun terakhir
	7	Permasalahan Hukum serta Penyelesaian Perkara Perdata dan PTUN di Kabupaten Semarang	Perkara Hukum	Permasalahan Hukum yang terjadi di Kabupaten Semarang baik secara Litigasi dan Non Litigasi yang dilaporkan	lima tahun terakhir
	8	Koleksi Buku Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang	Buku	Buku Peraturan Perundangundangan	lima tahun terakhir
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Lainnya : Produk Hukum		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Lainnya: Tidak ada metode pemeriksaan kualitas		
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak		
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara		
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3		

6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	1	
	Pengumpul data/enumerator	1	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: Produk hukum	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	31 Oktober 2023	
	Digital(Softcopy)	31 Oktober 2023	
	Datamikro		

Metadata Variabel

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakases umum?
1	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang dan Diseminasi Nilai-Nilai HAM	-				lima tahun terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang dan Diseminasi Nilai-Nilai HAM	Ya
2	Koordinasi, Konsultasi dan Advokasi Permasalahan Hukum serta Penyelesaian Perkara Perdata dan PTUN di Kabupaten Semarang	-	Permasalahan Hukum yang terjadi di Kabupaten Semarang baik secara Litigasi dan Non Litigasi yang dilaporkan	Perkara Hukum	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	lima tahun terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Koordinasi, Konsultasi dan Advokasi Permasalahan Hukum serta Penyelesaian Perkara Perdata dan PTUN di Kabupaten Semarang	Ya
3	Koleksi Buku Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang	-	Buku Peraturan Perundang-undangan	Buku	-	lima tahun terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Koleksi Buku Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang	Ya
4	Peraturan Bupati Kabupaten Semarang yang diundangkan	-	produk hukum daerah yang diundangkan	Regulasi	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	lima tahun terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Peraturan Bupati Kabupaten Semarang yang diundangkan	Ya
5	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang diundangkan	-	produk hukum daerah yang diundangkan	Regulasi	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	lima tahun terakhir			integer	=	Isian tidak boleh kosong	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang diundangkan	Ya
6	Sosialisasi/penyuluhan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang	-	Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan dilakukan secara tatap muka	Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	lima tahun terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Sosialisasi/penyuluhan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang	Ya
7	Kelompok KADARKUM di Kabupaten Semarang	-	Kelompok Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang mendapatkan Pembinaan	Kelompok Kadarkum	Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	lima tahun terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Kelompok KADARKUM di Kabupaten Semarang	Ya
8	Keputusan Bupati Kabupaten Semarang yang diterbitkan	-	Produk Hukum Daerah yang diterbitkan	Regulasi	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	lima tahun terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Keputusan Bupati Kabupaten Semarang yang diterbitkan	Ya

Metadata Indikator

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang diundangkan	Regulasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Semakin besar nilainya artinya semakin banyak Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang diundangkan	Penjumlahan	Jumlah	Buah	-	Kabupaten
2	Jumlah Peraturan Bupati Kabupaten Semarang yang diundangkan	Regulasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Semakin besar nilainya artinya semakin banyak Peraturan Bupati Kabupaten Semarang yang diundangkan	Penjumlahan	Jumlah	Buah	-	Kabupaten
3	Jumlah Keputusan Bupati Kabupaten Semarang yang ditetapkan	Regulasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Semakin besar nilai artinya semakin banyak Keputusan Bupati Kabupaten Semarang yang ditetapkan	Penjumlahan	Jumlah	Buah	-	Kabupaten
4	Jumlah Sosialisasi/penyuluhan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang	Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan	Sosialisasi Peraturan Daerah di 19 Kecamatan dilakukan secara tatap muka	Semakin besar nilainya artinya semakin banyak sosialisasi/penyuluhan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang	Penjumlahan	Jumlah	Kegiatan	-	Kabupaten
5	Jumlah sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang dan Diseminasi Nilai-Nilai HAM	-	Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan	Semakin besar nilainya artinya semakin banyak sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang dan Diseminasi Nilai-Nilai HAM	Penjumlahan	Jumlah	Kegiatan	-	Kabupaten
6	Jumlah kelompok KADARKUM di Kabupaten Semarang	Kelompok	Kelompok Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang mendapatkan Pembinaan	Semakin besar nilainya artinya semakin banyak kelompok KADARKUM di Kabupaten Semarang	Penjumlahan	Jumlah	Kelompok	-	Kabupaten
7	Jumlah koordinasi, Konsultasi dan Advokasi Permasalahan Hukum serta Penyelesaian Perkara Perdata dan PTUN di Kabupaten Semarang	-	Perkara Hukum	Semakin banyak nilainya artinya semakin banyak kegiatan koordinasi, Konsultasi dan Advokasi Permasalahan Hukum serta Penyelesaian Perkara Perdata dan PTUN di Kabupaten Semarang	Penjumlahan	Jumlah	Kegiatan	-	Kabupaten
8	Jumlah koleksi Buku Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang	-	Buku Peraturan Perundang-undangan	Semakin besar nilainya artinya semakin banyak koleksi Buku Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang	Penjumlahan	Jumlah	Buku	-	Kabupaten

BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Dukung Calon Penerima Hibah Rumah Ibadah Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Pendidikan Dan Pelatihan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Diponegoro No. 14 Ungaran	
1,3	Telepon	-246921014	
1,4	Faksimile	-246921014	
1,5	Email	Setda@semarangkab.go.id	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	Alamat	Jl Diponegoro No 14	
	Telepon	(024) 6921014	
	Faksimile	Kesrakabsmg@gmail.com	
	Email	-	

III. Perencanaan dan Persiapan					
3,1	Latar Belakang		Sesuai Dengan Program Unggulan Bupati Pada Misi Meningkatkan Kualitas Sdm Unggul Dan Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang Berkepribadian Serta Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Dengan Meningkatkan Bantuan Sosial Keagamaan Diantaranya Bantuan Untuk Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Dinibyah, Tpa, Kegiatan Keagamaan Dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diperlukan Data Sebagai Mana Sesuai Program Unggulan Dimaksud.		
3,2	Tujuan Kegiatan		Untuk Mengumpulkan Data Penerima Bantuan Hibah Rumah Ibadah Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Semarang		
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	03 Januari 2023 s/d 30 Januari 2023		
	2	Desain	03 Januari 2023 s/d 30 Januari 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	05 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	05 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	29 Desember 2023 s/d 29 Desember 2023		
6	Diseminasi Hasil	29 Desember 2023 s/d 29 Desember 2023			
7	Evaluasi	01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Nama Tempat Ibadah	Tempat Ibadah	Tempat Ibadah	Setahun terakhir
	2	Desa	Desa berada	Desa berada	Setahun terakhir
	3	Kecamatan	Kecamatan berada	Kecamatan berada	Setahun terakhir
	4	Usulan Anggaran	Anggaran yang akan diterima masingmasing penerima hibah	Anggaran yang akan diterima masing-masing penerima hibah	Setahun terakhir
	5	Alamat	Alamat berada	Alamat berada	Setahun terakhir

	6	Contact Person	Penanggung jawab tempat ibadah yang bisa dihubungi	Telepon dan nomor kontakperson dari penanggung jawab tempat ibadah yang bisa dihubungi	Setahun terakhir
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Lainnya : Rumah tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Lainnya: Konfirmasi kembali pada isian		
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak		
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara		
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3		
6,6	Jumlah Petugas				
	Supervisor/penyelia/pengawas		2		
	Pengumpul data/enumerator		2		
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Tidak		
VII. Pengolahan dan Analisis					
7,1	Tahapan Pengolahan Data				
	Penyuntingan(Editing)		Tidak		
	Penyandian(Coding)		Tidak		

	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Tidak	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: Rumah tempat ibadah/lembaga pendidikan keagamaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/KotaLainnya: Kecamatan, Desa	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Ya	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	29 Desember 2023	
	Digital(Softcopy)	29 Desember 2023	
	Datamikro	29 Desember 2023	

Metadata Variabel

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Alamat	-	Alamat berada	Alamat berada	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Belanja dan Belanja Daerah, perubahan ke empat atas peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018	Setahun terakhir			Integer		Harus isi	Alamat berada	Tidak
2	Contact Person	-	Telepon dan nomor kontakperson dari penanggung jawab tempat ibadah yang bisa dihubungi	Penanggung jawab tempat ibadah yang bisa dihubungi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Belanja dan Belanja Daerah, perubahan ke empat atas peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018	Setahun terakhir			Char		Harus isi	Penanggung jawab tempat ibadah yang bisa dihubungi?	Tidak
3	Desa	-	Desa berada	Desa berada	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Belanja dan Belanja Daerah, perubahan ke empat atas peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018	Setahun terakhir			Char		Harus isi	Desa berada	Tidak
4	Kecamatan	-	Kecamatan berada	Kecamatan berada	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Belanja dan Belanja Daerah, perubahan ke empat atas peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018	Setahun terakhir			Char		Harus isi	Kecamatan berada?	Tidak
5	Nama Tempat Ibadah	-	Tempat Ibadah	Tempat Ibadah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Belanja dan Belanja Daerah, perubahan ke empat atas peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018	Setahun terakhir			Char		Harus isi	Nama Tempat Ibadah	Tidak
6	Usulan Anggaran	-	Anggaran yang akan diterima masing-masing penerima hibah	Anggaran yang akan diterima masing-masing penerima hibah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Belanja dan Belanja Daerah, perubahan ke empat atas peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018	Setahun terakhir			Integer		Harus isi	Usulan Anggaran	Tidak

Metadata Indikator

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks yang didapatkan dari hasil survei kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). nilai indeks mendekati 4 termasuk kategori sangat baik dan nilai indeks mendekati 1 termasuk kategori tidak baik.	Responden mengisi survei lewat link yang diberikan petugas	Nilai indeks 25,00 – 64,99 : nilai mutu D kategori Tidak baik, Nilai indeks 65,00 – 76,60 : nilai mutu C kategori Kurang baik, Nilai indeks 76,61 – 88,30 : nilai mutu B kategori Baik, Nilai indeks 88,31 – 100,00 : nilai mutu A Kategori Sangat bai	Float	Tingkat Kabupaten	Kabupaten

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Penyusunan Indeks Kematangan Organisasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Sektor Publik Perpajakan Dan Regulasi Pasar	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Diponegoro No. 14	
1,3	Telepon	(024) 6921014	
1,4	Faksimile	(024) 6921149	
1,5	Email	Setda@semarangkab.go.id	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
	Alamat	Jl. Diponegoro No. 14	
	Telepon	(024) 6921014	
	Faksimile	Setda@semarangkab.go.id	
	Email	(024) 6921149	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Penataan Perangkat Daerah Adalah Penataan Terhadap Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Pembagian Tugas Dan Fungsi, Beban Kerja, Dan Tata Laksana Perangkat Daerah Agar Tepat Fungsi, Tepat Ukuran Dan Inerjis Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Dengan Asas Pembentukan	

		Perangkat Daerah Yang Berorientasi Pada Perlindungan, Pelayanan, Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Ini Meliputi Struktur, Budaya Dan Inovasi Organisasi. Pembinaan Ini Dilakukan Dalam Bentuk Fasilitasi, Konsultasi, Penilaian Dan Penghargaan. Guna Melakukan Pembinaan Penataan Daerah Ini, Maka Salah Satunya Dilakukan Penilaian Terhadap Daerah. Penilaian Ini Merupakan Penilaian Terhadap Tata Laksana (proses Bisnis), Budaya Organisasi, Dan Inovasi Dengan Tingkat Kematangan Suatu Organisasi.			
3,2	Tujuan Kegiatan	Untuk Mengetahui Nilai Kematangan Organisasi Bagi Pemerintah Daerah, Dimana Nilai Ini Diukur Dengan Menggabungkan Nilai Seluruh Perangkat Daerah Pada Daerah Yang Bersangkutan, Kemudian Dibagi Dengan Jumlah Perangkat Daerah.			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023		
	2	Desain	01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	01 November 2023 s/d 29 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	19 Januari 2024 s/d 19 Januari 2024		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	19 Januari 2024 s/d 16 Februari 2024		
6	Diseminasi Hasil	19 Januari 2024 s/d 16 Februari 2024			
7	Evaluasi	19 Januari 2024 s/d 16 Februari 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Perencanaan pembangunan daerah	suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.	suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.	setahun yang lalu

2	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan. Pengendalian program pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat kontraktual.	Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan. Pengendalian program pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat kontraktual.	setahun yang lalu
3	Penjaminan mutu layanan perangkat daerah	persentase pemilikan dokumen sistem penjaminan mutu dan persentase tenaga bersertifikat oleh setiap perangkat daerah	persentase pemilikan dokumen sistem penjaminan mutu dan persentase tenaga bersertifikat oleh setiap perangkat daerah	Setahun yang lalu
4	Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perangkat daerah	persentase SOP yang dimiliki dan persentase SOP yang telah direvisi sesuai hasil evaluasi oleh setiap perangkat daerah	persentase SOP yang dimiliki dan persentase SOP yang telah direvisi sesuai hasil evaluasi oleh setiap perangkat daerah	Setahun yang lalu
5	Pendidikan dan pelatihan aparatur	persentase capaian rencana diklat dan persentase pegawai ikut diklat pada masing-masing perangkat da	persentase capaian rencana diklat dan persentase pegawai ikut diklat pada masing-masing perangkat da	Setahun yang lalu
6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah	tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase kajian, penelitian atau telaah serta peserta pejabat ASN yang membuat analisis kebijakan.	tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase kajian, penelitian atau telaah serta peserta pejabat ASN yang membuat analisis kebijakan.	Setahun yang lalu
7	Manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur	Tingkat kematangan yang diukur melalui persentase kegiatan berbasis SSH, persentase jabatan berbasis Anjab dan ABK, serta persentase kegiatan berbasis rencana kebutuhan unit pada masing-masing perangkat kerja.	Tingkat kematangan yang diukur melalui persentase kegiatan berbasis SSH, persentase jabatan berbasis Anjab dan ABK, serta persentase kegiatan berbasis rencana kebutuhan unit pada masing-masing perangkat kerja.	Setahun yang lalu
8	Manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur	tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase identifikasi penilaian resiko dan persentase	tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase identifikasi penilaian	Setahun yang lalu

			realisasi pengendalian resiko pada masing-masing perangkat daerah	resiko dan persentase realisasi pengendalian resiko pada masing-masing perangkat daerah	
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Mengisi Kuesioner Sendiri		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Computer Aided Web Interviewing (CAWI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Lainnya : Perangkat Daerah/Dinas/Instansi		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Task Force		
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak		
6,4	Petugas Pengumpulan Data		-		
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		-		
6,6	Jumlah Petugas				
	Supervisor/penyelia/pengawas		0		
	Pengumpul data/enumerator		0		
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Ya		
VII. Pengolahan dan Analisis					
7,1	Tahapan Pengolahan Data				
	Penyuntingan(Editing)		Ya		
	Penyandian(Coding)		Tidak		

	(Data Entry)	Ya	
	Penyahiian(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Usaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Tidak	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)		
	Datamikro		

Metadata Variable

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Perencanaan pembangunan daerah	-	suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.	suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan perencanaan pembangunan	Tidak
2	Pengembangan inovasi layanan perangkat daerah	-	Tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase proposal inovasi dan persentase realisasi inovasi dibandingkan rencana pada masing-masing perangkat daerah.	Tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase proposal inovasi dan persentase realisasi inovasi dibandingkan rencana pada masing-masing perangkat daerah.	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan pengembangan inovasi layanan perangkat daerah	Tidak
3	Penjaminan mutu layanan perangkat daerah	-	persentase pemilihan dokumen sistem penjaminan mutu dan persentase tenaga bersertifikat oleh setiap perangkat daerah	persentase pemilihan dokumen sistem penjaminan mutu dan persentase tenaga bersertifikat oleh setiap perangkat daerah	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan penjaminan mutu layanan perangkat daerah	Tidak
4	Pendidikan dan pelatihan aparatur	-	persentase capaian rencana diklat dan persentase pegawai ikut diklat pada masing-masing perangkat daerah	persentase capaian rencana diklat dan persentase pegawai ikut diklat pada masing-masing perangkat daerah	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan pendidikan dan pelatihan aparatur	Tidak
5	Budaya organisasi perangkat daerah	-	Tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase kegiatan budaya kerja, dan persentase agen perubahan pada masing-masing perangkat daerah.	Tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase kegiatan budaya kerja, dan persentase agen perubahan pada masing-masing perangkat daerah.	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan budaya organisasi perangkat daerah	Tidak
6	Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perangkat daerah	-	persentase SOP yang dimiliki dan persentase SOP yang telah direvisi sesuai hasil evaluasi oleh setiap perangkat daerah	persentase SOP yang dimiliki dan persentase SOP yang telah direvisi sesuai hasil evaluasi oleh setiap perangkat daerah	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perangkat daerah	Tidak
7	Manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur	-	tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase identifikasi penilaian resiko dan persentase realisasi pengendalian resiko pada masing-masing perangkat daerah.	tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase identifikasi penilaian resiko dan persentase realisasi pengendalian resiko pada masing-masing perangkat daerah.	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur	Tidak
8	Pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur	-	Tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase pencapaian indikator kinerja program, serta persentase capaian target indikator kinerja utama di atas 90 persen (LAPK)	Tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase pencapaian indikator kinerja program, serta persentase capaian target indikator kinerja utama di atas 90 persen (LAPK)	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur	Tidak
9	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah	-	tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase kajian, penelitian atau telaah serta peserta pejabat ASN yang membuat analisis kebijakan.	tingkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase kajian, penelitian atau telaah serta peserta pejabat ASN yang membuat analisis kebijakan.	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah	Tidak
10	Manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur	-	Tingkat kematangan yang diukur melalui persentase kegiatan berbasis SSH, persentase jabatan berbasis Anjab dan ABK, serta persentase kegiatan berbasis rencana kebutuhan unit pada masing-masing perangkat kerja.	Tingkat kematangan yang diukur melalui persentase kegiatan berbasis SSH, persentase jabatan berbasis Anjab dan ABK, serta persentase kegiatan berbasis rencana kebutuhan unit pada masing-masing perangkat kerja.	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur	Tidak
11	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	-	Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan. Pengendalian program pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar	Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan. Pengendalian program pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perundang-undangan Daerah	setahun yang lalu			Integer	=	isian harus isi	Tingkat kematangan monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah	Tidak

Metadata Indikator

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah	suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan suatu perangkat daerah terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi.	suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan suatu perangkat daerah terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi.	Berdasarkan jumlah skor tingkat kematangan dari 11 variabel yang dikumpulkan akan dikelompokkan menjadi: Tingkat kematangan sangat rendah, jika skor yang diperoleh antara 10-19; Tingkat kematangan rendah, jika skor yang diperoleh antara 19,1-28; Tingkat kematangan sedang, jika skor yang diperoleh antara 28,1-37; Tingkat kematangan tinggi, jika skor yang diperoleh antara 37,1-46; Tingkat kematangan sangat tinggi, jika skor yang diperoleh antara 46,1-55.	Penjumlahan seluruh skor tingkat kematangan dari 11 variabel yang dikumpulkan.	Jumlah	-	Setiap perangkat daerah	Perangkat daerah
2	Tingkat Kematangan Organisasi Daerah	suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan perangkat daerah secara keseluruhan di suatu Pemerintahan Daerah terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi.	suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan perangkat daerah secara keseluruhan di suatu Pemerintahan Daerah terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi.	Berdasarkan rata-rata skor tingkat kematangan seluruh perangkat daerah di suatu pemerintahan daerah, dikelompokkan menjadi: Tingkat kematangan sangat rendah, jika skor yang diperoleh antara 10-19; Tingkat kematangan rendah, jika skor yang diperoleh antara 19,1-28; Tingkat kematangan sedang, jika skor yang diperoleh antara 28,1-37; Tingkat kematangan tinggi, jika skor yang diperoleh antara 37,1-46; Tingkat kematangan sangat tinggi, jika skor yang diperoleh antara 46,1-55.	Penjumlahan seluruh skor tingkat kematangan dari seluruh perangkat daerah di suatu pemerintahan daerah, kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah di pemerintah daerah tersebut.	Rata-rata	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Keuangan Bumd Milik Pemerintah Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Keuangan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl Diponegoro No. 14 Ungaran	
1,3	Telepon	-246921014	
1,4	Faksimile	-246921014	
1,5	Email	Perekonomian.kabsemarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Sekda Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bagian Perekonomian	
	Alamat	Jl Diponegoro No. 14 Ungaran	
	Telepon	-246921014	
	Faksimile	Perekonomian.kabsemarang@gmail.com	
	Email	-246921014	
III. Perencanaan dan Persiapan			

3,1	Latar Belakang	Melaksanakan Permendagri No. 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, Dan Evaluasi Bumd					
3,2	Tujuan Kegiatan	Menyajikan Laporan Keuangan 2022 Bumd Sebagai Bagian Laporan Apbd					
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan						
	A. Perencanaan						
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022				
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022				
	B. Pengumpulan						
	3	Pengumpulan Data	02 Januari 2023 s/d 15 Januari 2023				
	C. Pemeriksaan						
	4	Pengolahan Data	16 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023				
	D. Penyebarluasan						
	5	Analisis Data	01 Maret 2023 s/d 30 April 2023				
	6	Diseminasi Hasil	01 Mei 2023 s/d 15 Mei 2023				
7	Evaluasi	16 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023					
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:						
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)		
	1	saldo awal investasi	saldo awal investasi tahun sebelumnya	saldo awal investasi tahun sebelumnya	tahunan		
	2	metode kepemilikan	biaya (di bawah 51%) dan ekuitas (51% ke atas)	biaya (di bawah 51%) dan ekuitas (51% ke atas)	tahunan		
	3	laba rugi tahun berjalan	jumlah laba atau rugi pada tahun berjalan	jumlah laba atau rugi pada tahun berjalan	tahunan		
	4	saldo sebelum penambahan/penurunan ekuitas	saldo sebelum penambahan/penurunan ekuitas	saldo sebelum penambahan/penurunan ekuitas	tahunan		
	5	penambahan ekuitas	penambahan ekuitas yang diterima pada tahun berjalan	penambahan ekuitas yang diterima pada tahun berjalan	tahunan		

	6	pengurangan ekuitas	pengurangan ekuitas pada tahun berjalan	pengurangan ekuitas pada tahun berjalan	tahunan	
	7	saldo akhir investasi	saldo investasi pada akhir tahun berjalan	saldo investasi pada akhir tahun berjalan	tahunan	
IV. Desain Kegiatan						
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang			
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan			
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel			
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia			
4,5	Wilayah Kegiatan					
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG			
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder			
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Lainnya : input data manual menggunakan excel			
4,8	Unit Pengumpulan Data		Usaha/Perusahaan			
VI. Pengumpulan Data						
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak			
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Lainnya: konfirmasi melalui telepon/WA			
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak			
6,4	Petugas Pengumpulan Data		-			
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		-			
6,6	Jumlah Petugas					
	Supervisor/penyelia/pengawas		0			
	Pengumpul data/enumerator		0			

6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editoring)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Usaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Tidak	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)		
	Datamikro		

METADATA VARIABLE

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah d
1	saldo sebelum penambahan/penurunan ekuitas	saldo	saldo sebelum penambahan/penurunan ekuitas	saldo sebelum penambahan/penurunan ekuitas	Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD	tahunan			Float		-	-	Tidak
2	metode kepemilikan	kepemilikan	biaya (di bawah 51%) dan ekuitas (51% ke atas)	biaya (di bawah 51%) dan ekuitas (51% ke atas)	Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD	tahunan			string		-	-	Tidak
3	saldo akhir investasi	saldo akhir	saldo investasi pada akhir tahun berjalan	saldo investasi pada akhir tahun berjalan	Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD	tahunan			Float		-	-	Tidak
4	laba rugi tahun berjalan	laba rugi	jumlah laba atau rugi pada tahun berjalan	jumlah laba atau rugi pada tahun berjalan	Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD	tahunan			Float		-	-	Tidak
5	saldo awal investasi	saldo awal	saldo awal investasi tahun sebelumnya	saldo awal investasi tahun sebelumnya	Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD	tahunan			Float		-	-	Tidak
6	penambahan ekuitas	penambahan ekuitas	penambahan ekuitas yang diterima pada tahun berjalan	penambahan ekuitas yang diterima pada tahun berjalan	Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD	tahunan			Float		-	-	Tidak
7	pengurangan ekuitas	pengurangan ekuitas	pengurangan ekuitas pada tahun berjalan	pengurangan ekuitas pada tahun berjalan	Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD	tahunan			Float		-	-	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakases umum?
										Nama	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	laba rugi tahun berjalan	jumlah laba atau rugi pada tahun berjalan	jumlah laba atau rugi pada tahun berjalan	-	-	-	rupiah	-	Tidak			-	Kompilasi Data Keuangan BUMD Milik Pemerintah Kabupaten Semarang	kabupaten	Tidak
2	saldo akhir investasi	saldo investasi pada akhir tahun berjalan	saldo investasi pada akhir tahun berjalan	-	-	-	rupiah	-	Tidak			-	Kompilasi Data Keuangan BUMD Milik Pemerintah Kabupaten Semarang	kabupaten	Tidak

BAGIAN TAPEM SEKRETARIAT DAERAH KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Kerja Sama Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Pembangunan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya	
Identitas Rekomendasi:		K-24.3322.014	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Diponegoro No. 14, Ungaran	
1,3	Telepon	246921014	
1,4	Faksimile	246921992	
1,5	Email	Bagiantatapemerintahan2014@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	-	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	Zaenal Arifin, Sp., Mm.	
	Jabatan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
	Alamat	Jl. Diponegoro No. 14, Ungaran	
	Telepon	246921014	
	Faksimile	Bagiantatapemerintahan2014@gmail.com	

	Email	246921992				
III. Perencanaan dan Persiapan						
3,1	Latar Belakang	Kerja Sama Daerah Dilaksanakan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Usaha Bersama Antara Daerah Dan Daerah Lain, Antara Daerah Dan Pihak Ketiga, Dan/atau Antara Daerah Dan Lembaga Atau Pemerintah Daerah Di Luar Negeri. Perlu Dilakukan Kompilasi Data Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.				
3,2	Tujuan Kegiatan	Kerja Sama Dilakukan Guna Meningkatkan Pembangunan Daerah Dan Pelayanan Publik Di Kawasan Perbatasan, Daerah Lain Yang Tidak Berbatasan Ataupun Pihak Ketiga Yang Didasarkan Pada Pertimbangan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik Serta Saling Menguntungkan. Melalui Kegiatan Ini Dapat Diperoleh Informasi Mengenai Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.				
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan					
	A. Perencanaan					
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022			
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022			
	B. Pengumpulan					
	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2023 s/d 09 Desember 2023			
	C. Pemeriksaan					
	4	Pengolahan Data	15 Januari 2023 s/d 16 Desember 2023			
	D. Penyebarluasan					
	5	Analisis Data	17 Desember 2023 s/d 23 Desember 2023			
	6	Diseminasi Hasil	24 Desember 2023 s/d 28 Desember 2023			
7	Evaluasi	29 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023				
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:					
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)	
	1	Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain	Kerjasama antar Pemerintah Darah Kabupaten/Kota	Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik	Tahunan	

	2	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pihak Ketiga	Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik	Tahunan	
	3	Nota Kesepakatan	Dokumen Kesepakatan Sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat	Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat	Tahunan	
	4	Kesepakatan Bersama	Dokumen kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah Lain atau dengan dengan Pihak Ketiga	Dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum	Tahunan	
	5	Perjanjian Kerja Sama	Dokumen lanjutan setelah dilakukan Kesepakatan Bersama	Dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban	Tahunan	
IV. Desain Kegiatan						
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang			
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan			
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel			
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia			
4,5	Wilayah Kegiatan					
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG			
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder			
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Lainnya : Rekap Data Internal			
4,8	Unit Pengumpulan Data		Lainnya : Instansi Pemerintah di Kabupaten Semarang			

VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Supervisi	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	-	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	-	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	0	
	Pengumpul data/enumerator	0	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: Instansi Pemerintah di Kabupaten Semarang	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	

	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)	28 Desember 2023	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Ruang Lingkup Kerjasama	Lingkup	usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik	Ruang lingkup kerjasama	Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	Tahunan	-	-	Integer	1 = Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain2 = Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	Isian harus terisi	Apa ruang lingkup kerjasama ?	Tidak
2	Jenis Dokumen Kerjasama	Jenis Dokumen	Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab dalam kerjasama	Jenis Dokumen Kerjasama	Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	Tahunan	-	-	Integer	1 = Nota Kesepakatan2 = Kesepakatan Bersama	Isian harus terisi	Apa jenis dokumen kerjasama?	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan Nama	Indikator Pembangunan Publikasi Ketersediaan	Variabel Pembangunan Nama	Kegiatan Penghasil	Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
1	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	-	-	Jumlah	Dokumen	KSDPK	Tidak			Jumlah kerjasama KSDPK	Rekap Kerjasama Daerah	Kabupaten	Tidak
2	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama	Dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama	-	-	Jumlah	Dokumen	Kesber	Tidak			Jumlah dokumen Kesber	Rekap Kerjasama Daerah	Kabupaten	Tidak
3	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain	Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain	-	-	Jumlah	Dokumen	KSDD	Tidak			Jumlah kerjasama KSDD	Rekap Kerjasama Daerah	Kabupaten	Tidak
4	Jumlah dokumen Nota Kesepakatan	Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat	Banyaknya dokumen Nota Kesepakatan	-	-	Jumlah	Dokumen	Notkes	Tidak			Jumlah dokumen Notkes	Rekap Kerjasama Daerah	Kabupaten	Tidak
5	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban	Jumlah dokumen Perjanjian Kerja Sama	-	-	Jumlah	Dokumen	PKS	Tidak			Jumlah dokumen PKS	Rekap Kerjasama Daerah	Kabupaten	Tidak

BAPPERIDA KAB, SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Teknologi Informasi Dan Komunikasi	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Gatot Subroto No. 20 Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat	
1,3	Telepon	(024) 6924962	
1,4	Faksimile	-	
1,5	Email	Barenlitbangda@semarangkab.go.id	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Bapperida	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	Muhamad Muslih, S.e., M.m.	
	Jabatan	Kepala Bidang Riset Dan Inovasi Daerah	
	Alamat	Jl. Gatot Subroto No. 20 Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat	
	Telepon	246924962	
	Faksimile	Barenlitbangda@semarangkab.go.id	
	Email	-	
III. Perencanaan dan Persiapan			

3,1	Latar Belakang		Kegiatan Penilaian Inovasi Daerah Ini Dimaksudkan Agar Dapat Mendorong Kompetisi Positif Antar Pemerintah Provinsi Dan Antar Pemerintah Kabupaten/kota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sehingga Dapat Diwujudkan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Pembangunan, Guna Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat.			
3,2	Tujuan Kegiatan		Tujuan Kegiatan Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (innovative Government Award) Adalah: 1. Memotivasi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/kota Untuk Meningkatkan Inovasi Dalam Pelayanan Masyarakat Sesuai Dengan Kategori Sangat Inovatif, Inovatif, Serta Memotivasi Pemerintah Daerah Kurang Inovatif Dan Tidak Dapat Dinilai; 2. Mendorong Penerapan Good Governance; 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses-proses Inovasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah; Dan 4. Memberikan Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah Yang Berhasil Menerapkan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Transparan Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik, Kesejahteraan Masyarakat Dan Daya Saing Daerah.			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan					
	A. Perencanaan					
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022			
	2	Desain	15 Desember 2022 s/d 23 Desember 2022			
	B. Pengumpulan					
	3	Pengumpulan Data	02 Januari 2023 s/d 31 Mei 2023			
	C. Pemeriksaan					
	4	Pengolahan Data	03 Juni 2023 s/d 16 Agustus 2023			
	D. Penyebarluasan					
	5	Analisis Data	02 September 2023 s/d 29 November 2023			
6	Diseminasi Hasil	02 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023				
7	Evaluasi	02 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023				
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:					
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi		Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Nama inovasi daerah	Nama Inovasi	Inovasi Tata Kelola PemerintahanDaerah		Tahunan
	2	Tahapan inovasi	Tahapan inovasi	Inisiatif, Uji Coba, dan Penerapan		Tahunan

3	Inisiator inovasi daerah	Nama Inisiator	Orang yang Mengusulkan Inovasi	Tahunan	
4	Jenis inovasi	Jenis Inovasi Digital dan non Digital	Inovasi Digital adalah Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan TIK. Inovasi Nondigital Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual.	Tahunan	
5	Bentuk inovasi	Bentuk Inovasi	Inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi tatakelola Pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi indeks inovasi daerah	Tahunan	
6	Waktu uji coba inovasi daerah	Lamanya Waktu Ujicoba Inovasi	Lamanya Waktu Ujicoba Inovasi	Tahunan	
7	Waktu Implementasi Inovasi	Lamanya Waktu Penerapan Inovasi	Lamanya Waktu Penerapan Inovasi	Tahunan	
8	Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan	Proposal	Isian Latar Belakang, Persetujuan, dan Biaya Anggaran	Tahunan	
9	Tujuan inovasi	Tujuan inovasi	Tujuan Inovasi yang diusulkan	Tahunan	
10	Manfaat yang diperoleh	Manfaat yang diperoleh	Manfaat Inovasi yang diusulkan	Tahunan	
11	Hasil inovasi	Hasil inovasi	Produk Inovasi yang dihasilkan	Tahunan	
12	Anggaran	Anggaran	nBiaya yang digunakan untuk usulan inovasi	Tahunan	
13	Profil bisnis	Profil bisnis	Gambaran umum dari usulan inovasi	Tahunan	
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan	Berulang			
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan	Tahunan			
4,3	Tipe Pengumpulan Data	Longitudinal Panel			
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	Sebagian Wilayah Indonesia			

4,5	Wilayah Kegiatan	
	1	JAWA TENGAH SEMARANG
4,6	Metode Pengumpulan Data	Mengisi Kuesioner Sendiri
4,7	Sarana Pengumpulan Data	Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)
4,8	Unit Pengumpulan Data	Individu
VI. Pengumpulan Data		
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Kunjungan Kembali
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma I Atau Ii Atau Iii
6,6	Jumlah Petugas	
	Supervisor/penyelia/pengawas	2
	Pengumpul data/enumerator	3
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya
VII. Pengolahan dan Analisis		
7,1	Tahapan Pengolahan Data	
	Penyuntingan(Editing)	Ya
	Penyandian(Coding)	Tidak
	(Data Entry)	Tidak
	Penyahihan(Validasi)	Ya
7,2	Metode Analisis	Deskriptif
7,3	Unit Analisis	Individu
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota
VIII. Diseminasi Hasil		

8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	31/01/2024	
	Digital(Softcopy)	16/02/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABLE

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan	-	Isian Latar Belakang, Persetujuan , dan Biaya Anggaran	Proposal	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
2	Tujuan inovasi	-	Tujuan inovasi yang diusulkan	Tujuan inovasi	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
3	Waktu Implementasi Inovasi	-	Lamanya Waktu Penerapan Inovasi	Lamanya Waktu Penerapan Inovasi	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
4	Manfaat yang diperoleh	-	Manfaat Inovasi yang diusulkan	Manfaat yang diperoleh	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
5	Nama inovasi daerah	-	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nama Inovasi	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
6	Inisiator inovasi daerah	-	Orang yang Mengusulkan Inovasi	Nama Inisiator	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
7	Waktu uji coba inovasi daerah	-	Lamanya Waktu Ujicoba Inovasi	Lamanya Waktu Ujicoba Inovasi	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
8	Bentuk inovasi	-	Inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi tata kelola Pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi indeks inovasi daerah	Bentuk Inovasi	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
9	Hasil inovasi	-	Produk Inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
10	Anggaran	-	Biaya yang digunakan untuk usulan inovasi	Anggaran	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
11	Profil bisnis	-	Gambaran umum dari usulan inovasi	Profil bisnis	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
12	Tahapan inovasi	-	Inisiatif, Uji Coba, dan Penerapan	Tahapan inovasi	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak
13	Jenis inovasi	-	Inovasi Digital adalah Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan TIK. Inovasi Nondigital Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual.	Jenis Inovasi Digital dan non Digital	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH	Tahunan			Integer		-	-	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
										Nama	Publikasi	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	Indeks Inovasi Daerah	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri.	Inovasi Daerah	Dari penghitungan indeks inovasi daerah dijadikan sebagai nominasi atau peringkat dari inovasi daerah	-	Kategori	Skala/skor	Sangat Inovatif = 60,01 - 100 Inovatif = 35 - 60 Kurang inovatif = 0,01 - 34,99 Tidak	Tidak			Indeks Inovasi Daerah	Kompilasi Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Kabupaten	Ya

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Administrasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektor	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Ketenagakerjaan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya	
Identitas Rekomendasi:		K-24.3322.005	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Hos. Cokroaminoto No. 1 Ungaran	
1,3	Telepon	246921127	
1,4	Faksimile	246921004	
1,5	Email	Bkd@semarangkab.go.id	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	Sri Pratiwiningsih	
	Jabatan	Kepala Bidang Pengadaan Dan Informasi Kepegawaian	
	Alamat	Jl. Hos. Cokroaminoto No. 1 Ungaran	
	Telepon	246921127	
	Faksimile	Bkpsdm@semarangkab.go.id	
	Email	246921004	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	- Sebagai Perwujudan Dari Salah Satu Fungsi Bkpsdm Kab. Semarang Sebagaimana Diatur Dalam Perbup No. 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang No. 52 Th 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kab. Semarang. - Kebutuhan Informasi Mengenai Kepegawaian Untuk Memenuhi Kebutuhan Unsur	

		Pimpinan Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kab. Semarang Dan Juga Untuk Mendukung Kebutuhan Data Oleh Kalangan Umum Dan Stakeholder, Sehingga Dapat Meningkatkan Layanan Administratif Dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Pns.			
3,2	Tujuan Kegiatan	1. Mengkompilasi Data Kepegawaian Yang Ada Di 46 Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, Sehingga Menjadi Satu Kesatuan Informasi Data. 2. Menyajikan Informasi Data Kepegawaian, Sehingga Dapat Diperoleh Gambaran/keadaan Umum Kepegawaian Khususnya Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Semarang. 3. Menyajikan Informasi Data Kepegawaian, Sebagai Bahan Guna Memenuhi Kebutuhan Unsur Pimpinan Dalam Rangka Perencanaan Pembinaan Pegawai Serta Keperluan Dan Kebutuhan Lainnya. 4. Secara Bertahap Dan Berjangka Panjang Menyiapkan Data Dasar Yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan Kepegawaian Di Pemerintah Kabupaten Semarang.			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Golongan/ Ruang PNS	Golongan/ Ruang PNS	Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian	Sebulan terakhir
	2	Jabatan PNS	Jabatan PNS	Jenis jabatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang PNS	Sebulan terakhir

	3	Eselon Jabatan	Eselon Jabatan	Jabatan struktural yang diberikan kepada PNS yang berhak karena memenuhi syarat golongan untuk menduduki posisi eselon	Sebulan terakhir
	4	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Jenis kelamin sesuai dokumen kependudukan	Sebulan terakhir
	5	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan terakhir yang ditamatkan	Sebulan terakhir
	6	Agama	Agama	Agama yang dianut oleh PNS	Sebulan terakhir
	7	Kelompok Umur	Kelompok Umur	Pengelompokan umur PNS menjadi kelompok umur 5 tahunan mulai umur <20 tahun s.d > 55 tahun	Sebulan terakhir
	8	Pensiun BUP	Pensiun BUP	PNS yang memasuki usia pesiun pada tahun pengumpulan data	Sebulan terakhir
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Lainnya : Laporan bulanan Perangkat Daerah		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Individu		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Supervisi		
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak		
6,4	Petugas Pengumpulan Data		-		
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		-		

6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	0	
	Pengumpul data/enumerator	0	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editoring)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Ya	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Individu	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	15/02/2024	
	Digital(Softcopy)	15/02/2024	
	Datamikro		

Metadata Variabel

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Eselon jabatan	-	Jabatan struktural yang diberikan kepada PNS yang berhak karena memenuhi syarat golongan untuk menduduki posisi eselon Agama/kepercayaan yang dianut oleh responden sesuai yang diakui oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai agama/kepercayaan yang merupakan dasar pencatatan dalam database Kependudukan. Jika saat pendataan terjadi perbedaan agama yang diamut dengan yang tertera di dokumen KK/KTP, maka isian yang digunakan sesuai dengan pengakuan responden.	Eselon Jabatan	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier PNS	Sebulan terakhir			Integer	11 = I.A12 = I.B21 = II.A22 = II.B31 = III.A32 = III.B41 = IV.A42 = IV.B51 = V.I52 = V.B99 = Non Eselon	Isian tidak boleh kosong	Eselon	Ya
2	Agama	-		Agama	UUU Tahun 1945UUU No 23 Tahun 2006UUU No 24 Tahun 2013	Sebulan terakhir			Integer	1 = Islam2 = Kristen3 = Katolik4 = Hindu5 = Buddha6 = Khonghucu7 = Penghayat Kepercayaan8 = Lainnya 1 = <20 tahun2 = 21-23 tahun3 = 26-30 tahun4 = 31-35 tahun5 = 36-40 tahun6 = 41-45 tahun7 = 46-50 tahun8 = 51-55 tahun9 = >55 tahun	Isian tidak boleh kosong	Agama	Ya
3	Kelompok umur	-	Pengelompokan umur PNS menjadi kelompok umur 5 tahunan mulai umur 55 tahun	Kelompok Umur	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier PNS	Sebulan terakhir			Integer		Isian tidak boleh kosong	Umur	Ya
4	Jabatan PPPK	-	Jenis jabatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang P3K	Jabatan PPPK	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional	Setahun terakhir			Integer	- = -	Isian tidak boleh kosong	Jabatan PPPK	Ya
5	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	Jabatan	Statistik Indonesia	Sebulan terakhir	-	-	Integer	1 = Jabatan Pimpinan Tinggi Utama2 = Jabatan Pimpinan Tinggi Madya3 = Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama4 = Administrator5 = Pengawas6 = Eselon V7 = Jabatan Fungsional Dosen8 = Jabatan Fungsional Guru9 = Jabatan Fungsional Medis10 = Jabatan Fungsional Teknis11 = Jabatan Fungsional Umum	Isian tidak boleh kosong	Jenis Jabatan	Ya
6	Golongan PPPK	-	Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian	Golongan PPPK	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional	Setahun terakhir			Char	1 = Golongan V2 = Golongan VI3 = Golongan VII4 = Golongan IX5 = Golongan X	Isian tidak boleh kosong	Golongan PPPK	Ya
7	Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.	Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019	Sebulan terakhir	-	-	Integer	1 = I/a2 = I/b3 = I/c4 = I/d5 = II/a6 = II/b7 = II/c8 = II/d9 = III/a10 = III/b11 = III/c12 = III/d13 = IV/a14 = IV/b15 = IV/c16 = IV/d17 = IV/e	Isian tidak boleh kosong	Pangkat (Gol/Ruang)	Ya
8	Pensiun BUP	-	PNS yang memasuki usia pensiun pada tahun pengumpulan data	Pensiun BUP	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier PNS	Sebulan terakhir			Integer	1 = BUP2 = Non BUP	Isian tidak boleh kosong	Usia memasuki BUP	Ya
9	Jenis Kelamin	-	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Jenis Kelamin	Kondef Operasional Baku Statistik Sosial (2018)	Sebulan terakhir			Integer	1 = Laki-laki2 = Perempuan	Isian tidak boleh kosong	Jenis Kelamin	Ya
10	pendidikan	-	usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.	Pendidikan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Sebulan terakhir	Jumlah orang		Integer	1 = SD2 = SMP3 = SMA4 = D1/D2/D35 = S16 = S27 = S3	Isian tidak boleh kosong	Pendidikan Terakhir	Ya

Metadata Indikator

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS menurut golongan/ruang	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS pada golongan/ruang tersebut	Jumlah seluruh PNS berdasarkan klasifikasi golongan/ruang	Jumlah	Orang	Golongan/ruang	Kabupaten
2	Jumlah PNS Pelaksana menurut Golongan/Ruang	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS Pelaksana menurut Golongan/Ruang	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS Pelaksana pada golongan/ruang tersebut	Jumlah seluruh PNS dengan jenis jabatan sebagai pelaksana berdasarkan klasifikasi golongan/ruang	Jumlah	Orang	Golongan/ruang	Kabupaten
3	Jumlah PNS Fungsional menurut Golongan/Ruang	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS Fungsional menurut Golongan/Ruang	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS Fungsional pada golongan/ruang tersebut	Jumlah seluruh PNS dengan jenis jabatan sebagai fungsional berdasarkan klasifikasi golongan/ruang	Jumlah	Orang	Golongan/ruang	Kabupaten
4	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas menurut Golongan/Ruang	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas menurut Golongan/Ruang	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada golongan/ruang tersebut	Jumlah seluruh PNS dengan jenis jabatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas berdasarkan klasifikasi golongan/ruang	Jumlah	Orang	Golongan/ruang	Kabupaten
5	Jumlah PNS menurut Eselon	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas menurut Eselon	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada eselon tersebut	Jumlah seluruh PNS dengan jenis jabatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas berdasarkan eselon	Jumlah	Orang	Eselon	Kabupaten
6	Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS pada jenis kelamin dan tingkat pendidikan tersebut	Jumlah seluruh PNS pada masing-masing jenis kelamin dan klasifikasi pendidikan	Jumlah	Orang	Jenis Kelamin, Pendidikan	Kabupaten
7	Jumlah PNS menurut Agama	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS menurut Agama	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS pada agama tersebut	Jumlah seluruh PNS pada masing-masing klasifikasi agama	Jumlah	Orang	Agama	Kabupaten
8	Jumlah PNS menurut Kelompok Umur	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS menurut Kelompok Umur	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS pada kelompok umur tersebut	Jumlah seluruh PNS pada masing-masing klasifikasi kelompok umru	Jumlah	Orang	Kelompok Umur	Kabupaten
9	Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang dan Umur	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang dan Kelompok Umur	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS pada kelompok umur dan golongan/ruang tersebut	Jumlah seluruh PNS pada masing-masing klasifikasi golongan/ruang dan kelompok umur	Jumlah	Orang	Golongan/ruang	Kabupaten
10	Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan, Golongan dan Perangkat Daerah	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan dan Golongan/Ruang	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS pada jenis jabatan dan golongan/ruang tersebut	Jumlah seluruh PNS pada masing-masing klasifikasi jenis jabatan dan golongan/ruang pada masing-masing perangkat daerah	Jumlah	Orang	Jenis jabatan	Kabupaten
11	Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin dan Eselon	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin dan Eselon	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS pada jenis kelamin dan eselon tersebut	Jumlah seluruh PNS pada masing-masing klasifikasi jenis kelamin dan eselon pada masing-masing perangkat daerah	Jumlah	Orang	Jenis kelamin, eselon	Kabupaten
12	Jumlah PNS menurut Eselon dan Pendidikan	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS menurut Eselon dan Pendidikan	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS pada eselon dan tingkat pendidikan tersebut	Jumlah seluruh PNS pada masing-masing klasifikasi eselon dan tingkat pendidikan	Jumlah	Orang	Pendidikan	Kabupaten
13	Jumlah PNS menurut Eselon dan Kelompok Umur	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS menurut Eselon dan Kelompok Umur	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS pada eselon dan kelompok umur tersebut	Jumlah seluruh PNS pada masing-masing klasifikasi eselon dan kelompok umur	Jumlah	Orang	Kelompok umur	Kabupaten
14	Jumlah PNS yang memasuki BUP menurut Jabatan, Golongan dan Perangkat Daerah	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS yang memasuki BUP menurut Jabatan, Golongan dan Perangkat Daerah	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS yang memasuki BUP pada jenis jabatan dan golongan/ruang tersebut	Jumlah seluruh PNS yang memasuki BUP pada masing-masing klasifikasi jenis jabatan, golongan pada masing-masing perangkat daerah	Jumlah	Orang	Jenis jabatan, golongan/ruang	Kabupaten
15	Jumlah PNS yang memasuki BUP menurut Jabatan, Golongan dan Bulan	Klasifikasi PNS	Jumlah PNS yang memasuki BUP menurut Jabatan, Golongan dan Bulan	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah PNS yang memasuki BUP pada jenis jabatan dan golongan/ruang pada bulan tersebut	Jumlah seluruh PNS yang memasuki BUP pada masing-masing klasifikasi jenis jabatan, golongan dan bulan	Jumlah	Orang	Jenis jabatan, golongan/ruang, bulan	Kabupaten

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang		
Tahun		2023		
Jenis Statistik		Statistik Sektoral		
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi		
Sektor Kegiatan		Keuangan		
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya		
Identitas Rekomendasi:		K-24.3322.012		
I. Penyelenggara				
1,1	Instansi Penyelenggara	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang		
1,2	Alamat	Jl. Ahmad Yani No. 55, Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur		
1,3	Telepon	246921511		
1,4	Faksimile	-		
1,5	Email	Bkudkabsemarang@gmail.com		
II. Penanggung Jawab				
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab			
	Eselon 1	-		
	Eselon 2	Kepala Bkud Kabupaten Semarang		
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)			
	Nama	-		
	Jabatan	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang		
	Alamat	Jl. Ahmad Yani No. 55, Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur		
	Telepon	246921511		
	Faksimile	Bkudkabsemarang@gmail.com		
	Email	-		
III. Perencanaan dan Persiapan				

3,1	Latar Belakang		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Semarang 2020 Ini Telah Disusun Dan Disajikan Dengan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Dan Berdasarkan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Yang Sehat Di Lingkungan Pemerintah			
3,2	Tujuan Kegiatan		- Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Menyajikan Data Terkait Realisasi Pelaksanaan Apbd Dan Posisi Keuangan Pemerintah Daerah			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan					
	A. Perencanaan					
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Mei 2022 s/d 30 Desember 2022			
	2	Desain	01 Mei 2022 s/d 31 Desember 2022			
	B. Pengumpulan					
	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2023 s/d 01 Januari 2023			
	C. Pemeriksaan					
	4	Pengolahan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023			
	D. Penyebarluasan					
	5	Analisis Data	01 Januari 2023 s/d 30 Maret 2023			
6	Diseminasi Hasil	01 Januari 2023 s/d 30 Maret 2023				
7	Evaluasi	31 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023				
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:					
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)	
	1	laporan realisasi anggaran	laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode	laporan yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan anggaran keuangan	tahunan	
IV. Desain Kegiatan						
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang			
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan			
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Cross Sectional			
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia			
4,5	Wilayah Kegiatan					
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG			
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder			

4,7	Sarana Pengumpulan Data	Computer Aided Web Interviewing (CAWI)	
4,8	Unit Pengumpulan Data	Lainnya : Perangkat Daerah	
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Ya	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Lainnya: Rekonsiliasi	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	-	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	-	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	0	
	Pengumpul data/enumerator	0	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Ya	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: Perangkat Daerah	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		

	Tercetak(Hardcopy)	29 Agustus 2023	
	Digital(Softcopy)	29 Agustus 2023	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Jumlah Realisasi Penyerapan APBD	-	Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual).	Anggaran Kinerja	-	-	Jumlah	Rupiah	-	- = -	-	-	Tidak
2	Jumlah Target Penyerapan APBD	-	Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual).	Anggaran Kinerja	-	-	Jumlah	Rupiah	-	- = -	-	-	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	Target dan Realisasi Penyerapan APBD	Anggaran Kinerja	Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual).	-	-	-	-	-	Kabupaten

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kebencanaan Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Lingkungan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jalan Ki Sarino Mangunpranoto No 55 Ungaran 50519	
1,3	Telepon	024 6922400	
1,4	Faksimile	024 6922400	
1,5	Email	Bpbd.kabsemarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang	
	Alamat	Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No 55 Ungaran 50519	
	Telepon	024 6922400	
	Faksimile	Bpbd.kabsemarang@gmail.com	
	Email	024 6922400	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	-kajian Wilayah Kabupaten Semarang Yang Rawan Bencana Seperti Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Gempa Dll. - perlunya Pemetaan Wilayah Rawan Bencana. -perlunya Informasi Kepada Masyarakat Terkait Bencana	
3,2	Tujuan Kegiatan	-memberikan Informasi/data Kebencanaan Kepada Masyarakat -memberikan Informasi Terkait Pencegahan Terjadinya Bencana	

3,3	Rencana Jadwal Kegiatan					
	A. Perencanaan					
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 30 Desember 2022			
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 30 Desember 2022			
	B. Pengumpulan					
	3	Pengumpulan Data	02 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023			
	C. Pemeriksaan					
	4	Pengolahan Data	02 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023			
	D. Penyebarluasan					
	5	Analisis Data	01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024			
	6	Diseminasi Hasil	01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024			
	7	Evaluasi	01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:					
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)	
	1	Jenis Bencana	Bencana alam	Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi	1 tahun	
	2	Kejadian Bencana	Kejadian Bencana	Jumlah Peristiwa Bencana Yang Terjadi. Jika Terjadi Pada Tanggal Sama Pada Beberapa Wilayah Dihitung 1 Kali	1 tahun	
	3	Kerugian	kerugian	banyaknya kerugian materi maupun non-materi yang terjadi	1 tahun	
	4	Korban Terdampak	Korban Terdampak	banyaknya korban (manusia) yang mengalami dampak bencana alam dalam kurun waktu 1 tahun	1 tahun	
IV. Desain Kegiatan						
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang			
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan			
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Cross Sectional			
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia			
4,5	Wilayah Kegiatan					

	1	JAWA TENGAH	SEMARANG	
4,6	Metode Pengumpulan Data		Lainnya : Laporan melalui WA	
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)	
4,8	Unit Pengumpulan Data		Lainnya : Kejadian bencana	
VI. Pengumpulan Data				
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Kunjungan KembaliSupervisi	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Mitra Atau Tenaga Kontrak	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Sma Atau Smk	
6,6	Jumlah Petugas			
	Supervisor/penyelia/pengawas		2	
	Pengumpul data/enumerator		16	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis				
7,1	Tahapan Pengolahan Data			
	Penyuntingan(Editing)		Tidak	
	Penyandian(Coding)		Tidak	
	(Data Entry)		Ya	
	Penyahihan(Validasi)		Ya	
7,2	Metode Analisis		Deskriptif	
7,3	Unit Analisis		IndividuLainnya: Wilayah Terdampak Bencana	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis		Lainnya: Desa	
VIII. Diseminasi Hasil				
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum			
	Tercetak(Hardcopy)		Tidak	
	Digital(Softcopy)		Ya	

	Data Mikro	Ya	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)	31/01/2024	
	Datamikro	31/01/2024	

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Korban Terdampak	-	banyaknya korban (manusia) yang mengalami dampak bencana alam dalam kurun waktu 1 tahun	Korban Terdampak		1 tahun			integer	=	minimal terisi 0	Berapa jumlah korban yang terdampak	Tidak
2	Jenis Bencana	-	Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.	Bencana	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 tahun 2012	1 tahun	-	-	char	1 = Gempa Bumi2 = Tsunami3 = Banjir4 = Tanah Longsor5 = Letusan Gunung Api6 = Kekeringan7 = Gelombang Ekstrem dan Abrasi8 = Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)9 = Kebakaran Hutan dan Lahan10 = Kebakaran Gedung dan Pemukiman11 = Pandemi dan Wabah Penyakit12 = Gagal Teknologi13 = Konflik Sosial	harus terisi	Bencana Apa yang Terjadi	Ya
3	kerugian	-	banyaknya kerugian materi maupun non-materi yang terjadi	kerugian			1 tahun		integer	=	minimal terisi nol (0)	Berapa jumlah kerugian yang dialami	Tidak
4	Kejadian Bencana	-	Jumlah Peristiwa Bencana Yang Terjadi. Jika Terjadi Pada Tanggal Sama Pada Beberapa Wilayah Dihitung 1 Kali	Kejadian Bencana		1 tahun			integer	=	harus terisi	Berapa kali terjadinya bencana	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenisnya	-	bencana yg terjadi selama 1 tahun	banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waku 1 jam	-	jumlah	Kejadian	-	Desa, Kecamatan dan Kabupaten

DINAS KESEHATAN KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Pendataan Lengkap Penilaian Status Gizi Balita Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Pencacahan Lengkap	
Sektor Kegiatan		Kesehatan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Mt. Haryono No. 29 Ungaran	
1,3	Telepon	(024) 6921238	
1,4	Faksimile	-	
1,5	Email	Promkesdinkeskabsemarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas Kesehatan	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	
	Alamat	Jl. Mt. Haryono No. 29 Ungaran	
	Telepon	(024) 6921238	
	Faksimile	Promkesdinkeskabsemarang@gmail.com	
	Email	-	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	1. Sebagai Rujukan Bagi Petugas Kesehatan Untuk Mengidentifikasi Anak-anak Yang Berisiko Gagal Tumbuh Tanpa Menunggu Sampai Anak Menderita Masalah Gizi. 2. Sebagai Dasar Untuk Mendukung Kebijakan Kesehatan Dan Dukungan Publik Terkait Dengan Pencegahan Gangguan Pertumbuhan	

		Melalui Promosi Program Air Susu Ibu, Makanan Pendamping Air Susu Ibu, Dan Penerapan Perilaku Hidup Sehat.			
3,2	Tujuan Kegiatan	1. Memberikan Informasi Tentang Status Gizi Balita Di Wilayah Kabupaten Semarang. 2. Mengidentifikasi Adanya Balita Gizi Kurang, Balita Kurus Dan Balita Pendek. 3. Melakukan Upaya Untuk Mengatasi Balita Gizi Kurang, Balita Kurus Dan Balita Pendek.			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 Februari 2023 s/d 15 Februari 2023		
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Umur Balita	Umur	Anak yang berumur 0 sampai dengan 59 bulan.	Sebulan terakhir
	2	Berat Badan	Berat Badan	Nilai yang ditunjukkan dalam pengukuran berat badan balita menggunakan timbangan badan yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan maupun upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.	Sebulan terakhir
	3	Tinggi Badan	Tinggi Badan	Nilai yang ditunjukkan dalam pengukuran tinggi badan balita menggunakan alat pengukur tinggi badan yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan maupun upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.	Sebulan terakhir
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Bulanan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		

4,5	Wilayah Kegiatan		
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG
4,6	Metode Pengumpulan Data		WawancaraPengamatan
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
4,8	Unit Pengumpulan Data		Individu
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Kunjungan KembaliSupervisi
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Kurang Dari Atau Sama Dengan Smp
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	47	
	Pengumpul data/enumerator	470	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Ya
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis		Deskriptif
7,3	Unit Analisis		Individu
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis		Kabupaten/KotaLainnya: Kecamatan
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	

8,2	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	27/02/2023	
	Digital(Softcopy)	27/02/2023	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakases umum?
1	Berat Badan	-	Nilai yang ditunjukkan dalam pengukuran berat badan balita menggunakan timbangan badan yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan maupun upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.	Berat Badan	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	Sebulan terakhir			Float	=	Isian tidak boleh kosong	Berat badan balita	Tidak
2	Umur Balita	-	Anak yang berumur 0 sampai dengan 59 bulan.	Umur	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	Sebulan terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Umur balita	Tidak
3	Tinggi Badan	-	Nilai yang ditunjukkan dalam pengukuran tinggi badan balita menggunakan alat pengukur tinggi badan yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan maupun upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.	Tinggi Badan	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	Sebulan terakhir			Float	=	Isian tidak boleh kosong	Tinggi badan balita	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	Indeks Berat Badan menurut Umur	Berat Badan	menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak dengan berat badan kurang (underweight) atau sangat kurang (severely underweight).	z-score < -3 SD : berat badan sangat kurang (severely underweight); -3 SD s.d < -2 SD : berat badan kurang (underweight); -2 SD s.d +1 SD : berat badan normal; z-score > +1 SD : resiko berat badan lebih	Menggunakan tabel standar antropometri penilaian status gizi anak umur 0-59 bulan menurut jenis kelamin.	Indeks	(tanpa satuan)	-	Kabupaten
2	Indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan	Berat Badan dan Tinggi Badan	menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (wasted), gizi buruk (severely wasted) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (possible risk of overweight).	z-score < -3 SD : gizi buruk (severely wasted); -3 SD s.d < -2 SD : gizi kurang (wasted); -2 SD s.d +1 SD : gizi baik (normal); > +1 SD s.d +2 SD : berisiko gizi lebih (possible risk of overweight); > +2 SD s.d +3 SD : gizi lebih (overweight); > +3 SD : obesitas (obese)	Menggunakan tabel standar antropometri penilaian status gizi anak umur 0-59 bulan menurut jenis kelamin	Indeks	(tanpa satuan)	-	Kabupaten
3	Indeks Tinggi Badan menurut Umur	Tinggi Badan	menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (stunted) atau sangat pendek (severely stunted), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit.	< -3 SD : sangat pendek (severely stunted); -3 SD s.d < -2 SD : pendek (stunted); -2 SD s.d +3 SD : normal; > +3 SD : tinggi	Menggunakan tabel standar antropometri penilaian status gizi anak umur 0-59 bulan menurut jenis kelamin	Indeks	(tanpa satuan)	-	Kabupaten

DINAS SOSIAL KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (dtk-s) Di Kabupaten Semarang		
Tahun		2023		
Jenis Statistik		Statistik Sektoral		
Cara Pengumpulan Data		Pencacahan Lengkap		
Sektor Kegiatan		Perlindungan Sosial Dan Kesejahteraan		
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak		
Identitas Rekomendasi:		-		
I. Penyelenggara				
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Sosial Kabupaten Semarang		
1,2	Alamat	Jl. Letjend Suprapro No 7a Ungaran		
1,3	Telepon	-2476912203		
1,4	Faksimile	-2476912203		
1,5	Email	Dinsoskabsmg@gmail.com		
II. Penanggung Jawab				
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab			
	Eselon 1	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang		
	Eselon 2	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang		
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)			
	Nama	-		
	Jabatan	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang		
	Alamat	Jl. Letjend Suprapro No 7a Ungaran		
	Telepon	-2476912203		
	Faksimile	Dinsoskabsmg@gmail.com		
	Email	-2476912203		
III. Perencanaan dan Persiapan				
3,1	Latar Belakang	Diperlukannya Data Kemiskinan Sebagai Dasar Penyaluran Bantuan Sosial Dan Penanggunganlangan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Semarang.		
3,2	Tujuan Kegiatan	Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Kepada Masyarakat Tidak Mampu, Dengan Harapan Target Sesuai Tepat Sasaran Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.		

3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Januari 2023 s/d 15 Januari 2023		
	2	Desain	01 Januari 2023 s/d 15 Januari 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	16 Januari 2023 s/d 20 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	21 Desember 2023 s/d 25 Desember 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 Januari 2024 s/d 05 Januari 2024		
3,4	6	Diseminasi Hasil	08 Januari 2024 s/d 12 Januari 2024		
	7	Evaluasi	08 Januari 2024 s/d 12 Januari 2024		
	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Nama	Keterangan identitas	Nama sesuai KTP	saat pencacahan
	2	NIK	Nomor Induk Kepegawaian	data NIK sesuai KTP	saat pencacahan
	3	No KK	No KK	Nomor kartu keluarga	saat pencacahan
	4	Tempat lahir	Tempat lahir	tempat kelahiran	saat pencacahan
	5	Tanggal lahir	Tanggal lahir	tanggal kelahiran	saat pencacahan
	6	Jenis kelamin	Jenis kelamin	keterangan identitas jenis kelamin	saat pencacahan
	7	Nama Ibu kandung	Nama Ibu kandung	keterangan keluarga nama ibu kandung	saat pencacahan

8	Pekerjaan	Pekerjaan	Keterangan identitas pekerjaan saat ini	saat pencacahan
9	Status kawin	keterangan identitas	keterangan identitas apakah sudah menikah / belum	Saat pencacahan
10	Kecamatan	Kecamatan	keterangan identitas nama kecamatan sesuai KTP	Saat pencacahan
11	Desa/kelurahan	Desa/kelurahan	keterangan identitas nama desa/kelurahan sesuai KTP	saat pencacahan
12	RW	RW	keterangan identitas nomor RW tempat tinggal saat pencacahan	saat pencacahan
13	RT	RT	keterangan identitas nomor RT sesuai KTP	Saat pencacahan
14	Alamat	Alamat	keterangan identitas alamat nama dusun / jalan	Saat pencacahan
15	Fakir Miskin	Fakir Miskin	Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	Bulan Pencacahan
16	Orang Tidak Mampu	Orang Tidak Mampu	Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.	Bulan Pencacahan
17	Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Bulan Pencacahan

IV. Desain Kegiatan

4,1	Kegiatan ini dilakukan	Berulang	
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan	Bulanan	
4,3	Tipe Pengumpulan Data	Longitudinal Cross Sectional	
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	Sebagian Wilayah Indonesia	
4,5	Wilayah Kegiatan		
	1 JAWA TENGAH	SEMARANG	
4,6	Metode Pengumpulan Data	Pengamatan	

4,7	Sarana Pengumpulan Data	Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)	
4,8	Unit Pengumpulan Data	Individu	
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Lainnya: Pemutakhiran data dengan acuan data yang terkumpul bulan sebelumnya	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Mitra Atau Tenaga Kontrak	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Kurang Dari Atau Sama Dengan Smp	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	2	
	Pengumpul data/enumerator	235	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Individu	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		

	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)	08/01/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Pekerjaan	-	Keterangan identitas pekerjaan saat ini	Pekerjaan	Permensos No 3 Tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	Pekerjaan	Tidak
2	Penyandang Disabilitas	-	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Penyandang Disabilitas	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Bulan Pencacahan			Integer		Harus isi, jika kosong isikan -	Jumlah Penyandang Disabilitas	Tidak
3	Kecamatan	-	keterangan identitas nama kecamatan sesuai KTP	Kecamatan	Permensos No 3 Tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	Kecamatan	Tidak
4	Alamat	-	keterangan identitas alamat nama dusun / jalan	Alamat	Permensos No 3 Tahun 2021	Saat pencacahan			String		Harus isi	Alamat	Tidak
5	Orang Tidak Mampu	-	Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.	Orang Tidak Mampu	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Bulan Pencacahan			Integer		Harus isi, jika kosong isikan -	Jumlah Orang Tidak Mampu	Tidak
6	Status kawin	-	keterangan identitas apakah sudah menikah / belum	keterangan identitas	Permensos No 3 Tahun 2021	Saat pencacahan			String		Harus isi	apakah sudah menikah / belum	Tidak
7	No KK	-	Nomor kartu keluarga	No KK	Permensos no 3 tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	No KK	Tidak
8	Tanggal lahir	-	tanggal kelahiran	Tanggal lahir	Permensos No 3 Tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	Tanggal lahir	Tidak
9	Tempat lahir	-	tempat kelahiran	Tempat lahir	Permensos No 3 Tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	Tempat Lahir	Tidak
10	Nama	-	Nama sesuai KTP	Keterangan identitas	Peraturan Meteri Sosial No 3 Tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	Siapa nama	Tidak
11	NIK	-	data NIK sesuai KTP	Nomor Induk Kepegawaian	Permensos No 3 Tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	NIK	Tidak
12	RT	-	keterangan identitas nomor RT sesuai KTP	RT	Permensos No 3 Tahun 2021	Saat pencacahan			String		Harus isi	RT	Tidak
13	Desa/kelurahan	-	keterangan identitas nama desa/kelurahan sesuai KTP	Desa/kelurahan	Permensos No 3 Tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	Desa/kelurahan	Tidak
14	Nama Ibu kandung	-	keterangan keluarga nama ibu kandung	Nama Ibu kandung	Permensos No 3 Tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	Nama Ibu kandung	Tidak
15	Fakir Miskin	-	Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	Fakir Miskin	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Bulan Pencacahan			Integer		Harus isi, jika kosong isikan -	Jumlah Fakir Miskin	Tidak
16	RW	-	keterangan identitas nomor RW tempat tinggal saat pencacahan	RW	Permensos No 3 Tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	RW	Tidak
17	Jenis kelamin	-	keterangan identitas jenis kelamin	Jenis kelamin	Permensos No 3 Tahun 2021	saat pencacahan			String		Harus isi	Jenis kelamin	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
										Nama	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	Jumlah Kemiskinan	pendataan dilakukan terhadap masyarakat dengan tingkat ekonomi 40% terendah	Sensus pencacahan yang dilakukan oleh perangkat Desa/Kelurahan	banyaknya orang miskin di kabupaten semarang	pendataan dan musyawarah desa / kelurahan	orang	jiwa	jenis kelamin	Tidak			Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Pendataan Kemiskinan Kabupaten Semarang	Kecamatan	Ya

Judul Kegiatan		Pencacahan Lengkap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Pencacahan Lengkap	
Sektor Kegiatan		Perlindungan Sosial Dan Kesejahteraan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Sosial Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Letjend Suprapro No 7a Ungaran	
1,3	Telepon	-2476912203	
1,4	Faksimile	-2476912203	
1,5	Email	Dinsoskabsmg@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	
	Eselon 2	Kepala Dinas Sosial	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Sekretaris Dinas Sosial	
	Alamat	Jl Letjend Suprpto No 7a Ungaran	
	Telepon	0813-2573-3799	
	Faksimile	Dinsoskabsemarang@gmail.com	
	Email	-	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Tidak Tersentuh / Tertangani	
3,2	Tujuan Kegiatan	Pengentasan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang	
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan		

	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023		
	2	Desain	01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	01 Februari 2023 s/d 30 Mei 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 Juli 2023 s/d 07 Juli 2023		
3,4	6	Diseminasi Hasil	08 Juli 2023 s/d 14 Juli 2023		
	7	Evaluasi	08 Juli 2023 s/d 14 Juli 2023		
	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Nama	nama lengkap	keterangan identitas sesuai KTP	1 Jan - 31 Des 2024
	2	NIK	keterangan identitas sesuai KTP	keterangan identitas NIK sesuai KTP	1 Jan - 31 Des 2024
	3	No KK	nomor Kartu Keluarga	keterangan identitas no KK sesuaiKTP	1 Jan - 31 Des 2024
	4	Jenis kelamin	Jenis kelamin	keterangan jenis kelamin sesuai KTP	1 Jan - 31 Des 2024
	5	Tempat lahir	tempat lahir	keterangan tempat lahir sesuai ktp	1 Jan - 31 Des 2024
	6	Tanggal lahir	tanggal lahir	keterangan tanggal lahir	1 Jan - 31 Des 2024
IV. Desain Kegiatan	7	Kode pmks	kode pmks	kode pmks	1 Jan - 31 Des 2024
	8	Jenis pmks	jenis pmks	keterangan jenis pmks	1 Jan - 31 Des 2024
	9	Tahun usulan	tahun usulan	keterangna tahun usulan	1 Jan - 31 Des 2024
	IV. Desain Kegiatan				
	4,1	Kegiatan ini dilakukan	Berulang		
	4,2	Frekuensi Penyelenggaraan	Semesteran		
	4,3	Tipe Pengumpulan Data	Longitudinal Cross Sectional		
	4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	Sebagian Wilayah Indonesia		
	4,5	Wilayah Kegiatan			
4,6	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
	Metode Pengumpulan Data		Pengamatan		

4,7	Sarana Pengumpulan Data	Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)	
4,8	Unit Pengumpulan Data	Individu	
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Kunjungan Kembali	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Mitra Atau Tenaga Kontrak	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma I Atau Ii Atau Iii	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	1	
	Pengumpul data/enumerator	19	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Individu	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)	31 Desember 2023	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	kode pmks	Kode	kode pmks	kode pmks	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	kode pmks	Ya
2	No KK	No KK	keterangan identitas no KK sesuai KTP	nomor Kartu Keluarga	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	no kk	Ya
3	tahun usulan	tahun	keterangna tahun usulan	tahun usulan	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	tahun	Ya
4	kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	kecamatan	Ya
5	alamat	alamat	alamat lengkap	alamat	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	alamat	Ya
6	kabupaten	kab	kabupaten	nama kabupaten	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	kabupaten	Ya
7	Nama	Nama	keterangan identitas sesuai KTP	Nama Lengkap	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	nama	Ya
8	desa/kelurahan	desa	desa/kelurahan	desa/kelurahan	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	desa	Ya
9	tanggal lahir	tanggal lahir	keterangan tanggal lahir	tanggal lahir	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	tanggal lahir	Ya
10	NIK	NIK	keterangan identitas NIK sesuai KTP	keterangan identitas sesuai KTP	-	1jan - 31 des 2024			string	=	-	NIK	Ya
11	tempat lahir	tempat lahir	keterangan tempat lahir sesuai ktp	tempat lahir	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	tempat lahir	Ya
12	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	keterangan jenis kelamin sesuai ktp	Jenis Kelamin	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	jenis kelamin	Ya
13	jenis pmks	jenis pmks	keterangan jenis pmks	jenis pmks	-	1 Jan - 31 Des 2024			string	=	-	jenis pmks	Ya

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Warna Penhitungan	Jumlah	Satuan	Klasifikasi Penyangga	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan Nama Publikasi Keterpaduan	Verbal Pembangun Nama Kegiatan Penghasil	Level Evidence	Apakah dapat diakses umum?
1	Jumlah pengemis	Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk menghasilkan biaya kebutuhan sehari-hari.	Pengemis	Semakin besar nilai maka semakin banyak pengemis	Penjumlahan dari variabel pengemis		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
2	Jumlah orang dengan HIV/AIDS	Orang dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.	Orang dengan HIV/AIDS	Semakin besar nilai maka semakin banyak orang dengan HIV/AIDS	Penjumlahan dari variabel orang dengan HIV/AIDS		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
3	Jumlah pekerja migran bermasalah sosial	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tidak kelekasan, pemerasan, penganiayaan, masalah hukum dan sosial maupun mengalami diskriminasi sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.	Pekerja migran bermasalah sosial	Semakin besar nilai maka semakin banyak pekerja migran bermasalah sosial	Penjumlahan dari variabel pekerja migran bermasalah sosial		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
4	Jumlah anak jalanan	Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan pendapatan besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.	anak jalanan	Semakin besar nilai maka semakin banyak anak jalanan	Penjumlahan dari variabel anak jalanan		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
5	Jumlah korban bencana sosial	Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau mengalami dunia akibat bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang melalui konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan seterusnya.	Korban bencana sosial	Semakin besar nilai maka semakin banyak korban bencana sosial	Penjumlahan dari variabel korban bencana sosial		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
6	Jumlah pemulung	Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, perkotaan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk dijual ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.	Pemulung	Semakin besar nilai maka semakin banyak pemulung	Penjumlahan dari variabel pemulung		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
7	Jumlah keluarga bermasalah sosial psikologis	Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terganggu antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tidak baik dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	Semakin besar nilai maka semakin banyak keluarga bermasalah sosial psikologis	Penjumlahan dari variabel keluarga bermasalah sosial psikologis		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
8	Jumlah lanjut usia terfalter	Lanjut usia terfalter adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	lanjut usia terfalter	Semakin besar nilai maka semakin banyak lanjut usia terfalter	Penjumlahan dari variabel lanjut usia terfalter		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
9	Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi	Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	Perempuan rawan sosial ekonomi	Semakin besar nilai maka semakin banyak perempuan rawan sosial ekonomi	Penjumlahan dari variabel perempuan rawan sosial ekonomi		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
10	Jumlah balita terfalter	Anak balita terfalter adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditinggalkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/harganya yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak ditinggalkan untuk tujuan tertentu.	balita terfalter	Semakin besar nilai maka semakin banyak balita terfalter	Penjumlahan dari variabel anak balita terfalter		dua	berba	Tidak	Senus pencacahan yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
11	Jumlah korban bencana alam	Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau mengalami dunia akibat bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor termasuk fungsi fisiologis.	Korban bencana alam	Semakin besar nilai maka semakin banyak korban bencana alam	Penjumlahan dari variabel korban bencana alam		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
12	Jumlah tuna susila	Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan ridho/raja, nafkah atau jasa.	tuna susila	Semakin besar nilai maka semakin banyak tuna susila	Penjumlahan dari variabel tuna susila		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
13	Jumlah gelandangan	Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai penghasilan dan tempat tinggal yang layak serta mengidap di tempat umum.	Gelandangan	Semakin besar nilai maka semakin banyak gelandangan	Penjumlahan dari variabel gelandangan		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
14	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum	Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang diadukan, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang melihat dan/atau mendengar kondisi terjadinya suatu tindak pidana.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Semakin besar nilai maka semakin banyak anak yang berhadapan dengan hukum	Penjumlahan dari variabel anak yang berhadapan dengan hukum		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
15	Jumlah disabilitas dewasa	Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kemampuan diri yang dimiliki.	Disabilitas dewasa	Semakin besar nilai maka semakin banyak disabilitas dewasa	Penjumlahan dari variabel disabilitas dewasa		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
16	Jumlah Anak balita terfalter	Anak balita terfalter adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditinggalkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/harganya yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak ditinggalkan untuk tujuan tertentu.	Anak balita terfalter	Semakin besar nilai maka semakin banyak anak balita terfalter	Penjumlahan dari variabel anak balita terfalter		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
17	Jumlah Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan psikis karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial sekitarnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara langsung, maupun secara tidak langsung.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Semakin besar nilai maka semakin banyak anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Penjumlahan dari variabel Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
18	Jumlah belia warga binan lembaga pemasyarakatan	Belia Warga Binan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.	Belia warga binan lembaga pemasyarakatan	Semakin besar nilai maka semakin banyak belia warga binan lembaga pemasyarakatan	Penjumlahan dari variabel belia warga binan lembaga pemasyarakatan		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
19	Jumlah korban penyalahgunaan narkoba	Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa pengawasan dokter yang berwenang.	Korban penyalahgunaan narkoba	Semakin besar nilai maka semakin banyak korban penyalahgunaan narkoba	Penjumlahan dari variabel korban penyalahgunaan narkoba		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
20	Jumlah kelompok minoritas	Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasan mereka menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gizi, akses, dan layanan.	Kelompok minoritas	Semakin besar nilai maka semakin banyak kelompok minoritas	Penjumlahan dari variabel kelompok minoritas		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
21	Jumlah anak dengan ketidakadilan	Anak dengan ketidakadilan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmanis, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.	Anak dengan ketidakadilan	Semakin besar nilai maka semakin banyak anak dengan ketidakadilan	Penjumlahan dari variabel anak dengan ketidakadilan		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
22	Jumlah korban tindak kekerasan	Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun keadaan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan melibatkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.	Korban tindak kekerasan	Semakin besar nilai maka semakin banyak korban tindak kekerasan	Penjumlahan dari variabel korban tindak kekerasan		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
23	Jumlah fakir miskin	Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	Fakir miskin	Semakin besar nilai maka semakin banyak fakir miskin	Penjumlahan dari variabel fakir miskin		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
24	Jumlah korban trafficking	Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan paksa, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang disebabkan tindak pidana perdagangan orang.	Korban trafficking	Semakin besar nilai maka semakin banyak korban trafficking	Penjumlahan dari variabel korban trafficking		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	
25	Jumlah anak terfalter	Anak terfalter adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditinggalkan oleh orang tua/harganya atau anak kehilangan hak asuh dan orang tua/harganya.	Anak terfalter	Semakin besar nilai maka semakin banyak anak terfalter	Penjumlahan dari variabel anak terfalter		dua	berba	Tidak		REKAMTAHRIAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1a	

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG

Judul Kegiatan		Survei Kajian Minat Baca Masyarakat Kabupaten Semarang		
Tahun		2023		
Jenis Statistik		Statistik Sektoral		
Cara Pengumpulan Data		Survei		
Sektor Kegiatan		Sektor Publik Perpajakan Dan Regulasi Pasar		
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya		
Identitas Rekomendasi:		V-23.3322.002		
I. Penyelenggara				
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Semarang		
1,2	Alamat	Jl. Pemuda No. 7, Sembungan, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang		
1,3	Telepon	024 - 6921128		
1,4	Faksimile	024 - 6921128		
1,5	Email	Perpusung@yahoo.co.id		
II. Penanggung Jawab				
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab			
	Eselon 1	-		
	Eselon 2	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Semarang		
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)			
	Nama	Adi Setianto, Sh		
	Jabatan	Kepala Bidang Perpustakaan		
	Alamat	Jl. Pemuda No. 7, Sembungan, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang		
	Telepon	024 - 6921128		
	Faksimile	Perpusung@yahoo.co.id		
	Email	024 - 6921128		
III. Perencanaan dan Persiapan				
3,1	Latar Belakang	Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Masyarakat, Sejak Tahun 2016 Pemerintah Melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Telah Meluncurkan Program Gerakan Literasi Nasiona (gln) Yang Terdiri Dari Gerakan Literasi Sekolah (gls), Gerakan Literasi Keluarga, Dan Gerakan Literasi Masyarakat.gerakan Literasi Nasional Telah Mendorong Tumbuhnya Budaya Baca, Salah Satu Nya Dapat Dipantau Melalui		

		Penyelenggaraan GlS. Melalui Terbitnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Yang Mana Salah Satu Tujuannya Berupaya Untuk Memperkuat Budaya Literasi Siswa, Banyak Sekolah Mulai Menerapkan Kegiatan 15 Menit Membaca Buku Non Pelajaran Sebelum Waktu Belajar Dimulai. Pembiasaan Tersebut Diharapkan Dapat Menumbuhkan Minat Baca Serta Ketrampilan Membaca Agar Pengetahuan Dapat dikuasai Secara Lebih Baik. Berkaca Dari Kebutuhan Itu, Maka Diperlukan Penelitian Tentang Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Semarang Yang Dapat Menggambarkan Kondisi Aktivitas Lliterasi Membaca Masyarakat Dengan Menetapkan Dimensi Dan Indikator-indikator Yang Terukur Yang Diharapkan Dapat Disusun Angka Indeks Yang Dapat Memberikan Gambaran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Di Kabupaten Semarang.			
3,2	Tujuan Kegiatan	1. Menganalisa Kondisi Kegemaran Membaca Masyarakat Di Kabupaten Semarang 2. Menganalisa Perilaku Kegemaran Membaca Dikaitkan Dengan Demografi Masyarakat Dan Akitivitas Membaca Yang Dilakukan Masyarakat Di Kabupaten Semarang 3. Menganalisa Kondisi Pembangunan Literasi Masyarakat Di Kabupaten Semarang 4. Menganalisa Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Di Kabupaten Semarang			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	19 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	2	Desain	19 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	02 Januari 2023 s/d 30 November 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	24 Juli 2023 s/d 08 Desember 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	11 Desember 2023 s/d 29 Desember 2023		
6	Diseminasi Hasil	01 Januari 2024 s/d 05 Januari 2024			
7	Evaluasi	08 Januari 2024 s/d 19 Januari 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Usia	Ulang tahun terakhir	Ulang tahun responden yang terakhir	Saat pendataan

	2	Jenis kelamin	Jenis kelamin responden menurut kartu identitas penduduk	Jenis kelamin responden menurut kartu identitas penduduk	Saat pendataan
	3	Pendidikan terakhir	Tanda tamat belajar tertinggi yang dimiliki responden	Tanda tamat belajar tertinggi yang dimiliki responden	Saat pendataan
	4	Pekerjaan	Kegiatan memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan waktu terbanyak	Kegiatan memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan waktu terbanyak	Saat pendataan
	5	Frekuensi membaca	Rata-rata banyaknya seseorang membaca bahan bacaan tercetak, elektronik (melalui handphone, laptop, tablet, dsb) atau audio visual (televisi, siaran radio, podcast, dst) dalam seminggu	Rata-rata banyaknya seseorang membaca bahan bacaan tercetak, elektronik (melalui handphone, laptop, tablet, dsb) atau audio visual (televisi, siaran radio, podcast, dst) dalam seminggu	Seminggu terakhir
	6	Durasi membaca	Rata-rata jumlah waktu membaca bahan bacaan tercetak, elektronik (melalui handphone, laptop, tablet, dsb) atau audio visual (televisi, siaran radio, podcast, dst) dalam sehari	Rata-rata jumlah waktu membaca bahan bacaan tercetak, elektronik (melalui handphone, laptop, tablet, dsb) atau audio visual (televisi, siaran radio, podcast, dst) dalam sehari	Seminggu terakhir
	7	Jumlah buku dibaca	Rata-rata jumlah bahan bacaan berbentuk tercetak atau elektronik/digital selama tiga bulan	Rata-rata jumlah bahan bacaan berbentuk tercetak atau elektronik/digital selama tiga bulan	Tiga bulan terakhir
	8	Frekuensi akses internet	Rata-rata akses internet untuk membaca atau mencari informasi (artikel berita, video berita, media informasi lainnya) dalam seminggu	Rata-rata akses internet untuk membaca atau mencari informasi (artikel berita, video berita, media informasi lainnya) dalam seminggu	Seminggu terakhir
	9	Durasi akses internet	Rata-rata lama waktu mengakses internet untuk membaca atau mencari informasi (artikel berita, video berita, atau media informasi lainnya) dalam sehari	Rata-rata lama waktu mengakses internet untuk membaca atau mencari informasi (artikel berita, video berita, atau media informasi lainnya) dalam sehari	Seminggu terakhir
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Mengisi Kuesioner Sendiri		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)		

4,8	Unit Pengumpulan Data	Individu	
V. Desain Sampel			
5,1	Jenis Rancangan Sampel	Single Stage Atau Phase	
5,2	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir	Sampel Nonprobabilitas	
5,3	Metode Sampel Probabilitas yang digunakan	Quota Sampling	
5,4	Kerangka Sampel Tahap Terakhir	-	
5,5	Fraksi Sampel Keseluruhan	-	
5,6	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama	-	
5,7	Unit Sampel	Penduduk Usia 10 S.d 69 Tahun Yang Berdomisili Di Kabupaten Semarang	
5,8	Unit Observasi	Penduduk Usia 10 S.d 69 Tahun Yang Berdomisili Di Kabupaten Semarang	
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Lainnya: tidak ada metode pemeriksaan kualitas	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Sma Atau Smk	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	1	
	Pengumpul data/enumerator	7	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	

	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Tidak	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Individu	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)	06/01/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No / Nama Variabel	Alias / Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran / Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakases umum?
1 Durasi membaca	- Rata-rata jumlah waktu membaca bahan bacaan tercetak, elektronik (melalui handphone, laptop, tablet, dsb) atau audio visual (televisi, siaran radio, podcast, dst) dalam sehari	Durasi membaca	PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	Seminggu terakhir		Integer	1 = Tidak pernah2 = 1 menit-59 menit3 = 1 jam-1 jam 59 menit4 = 2 jam-2 jam 59 menit5 = 3 jam atau lebih	Isian tidak boleh kosong	Berapa lama Anda membaca rata-rata dalam sehari bahan bacaan tercetak, elektronik (melalui handphone, laptop, tablet, dsb) atau audio visual (televisi, siaran radio, podcast, dsb)?	Tidak
2 Frekuensi membaca	- Rata-rata banyaknya seseorang membaca bahan bacaan tercetak, elektronik (melalui handphone, laptop, tablet, dsb) atau audio visual (televisi, siaran radio, podcast, dst) dalam seminggu	Frekuensi membaca	PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	Seminggu terakhir		Integer	1 = Tidak pernah2 = 1-2 kali3 = 3-4 kali4 = 5-6 kali5 = lebih dari 6 kali	Isian tidak boleh kosong	Berapa kali Anda membaca rata-rata dalam seminggu bahan bacaan tercetak, elektronik (melalui handphone, laptop, tablet, dsb) atau audio visual (televisi, siaran radio, podcast, dsb)?	Tidak
3 Pendidikan terakhir	- Tanda tamat belajar tertinggi yang dimiliki responden	Pendidikan terakhir	PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	Saat pendataan		Integer	1 = SD tidak tamat2 = SD/MI3 = SMP/MTs4 = SMA/SMK/MA5 = Diploma (D1, D2, D3)6 = Sarjana (D4,S1)7 = Magister (S2)8 = Doktor (S3)	Isian tidak boleh kosong	Apa pendidikan terakhir yang Anda tamatkan?	Tidak
4 Pekerjaan	- Kegiatan memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan waktu terbanyak	Pekerjaan	PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	Saat pendataan		Integer	1 = Pelajar SD/MI2 = Pelajar SMP/MTs3 = Pelajar SMA/SMK/MA4 = Mahasiswa5 = Pegawai Negeri/ ASN (selain guru/dosen)6 = Pegawai swasta7 = Pengusaha/pedagang8 = Pegawai honorer9 = Pegawai BUMD10 = Anggota TNI/POLRI11 = Dosen/guru (Negeri/swasta)12 = Buruh (pabrik, penjaga toko, konstruksi, dll)13 = Petani/Nelayan14 = Profesi lainnya yang belum disebutkan	Isian tidak boleh kosong	Apa pekerjaan Anda sekarang?	Tidak
5 Umur/Usia	- Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5 tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi.	Umur/Usia	https://dinkes.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Laporan-Riskesdas-2018-Nasional.pdf https://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f2f9b477/statistik-indonesia-2021.html https://www.abs.gov.au/statistics/standards/age-standard/2014-version-17	Saat pendataan	-	Integer	Y0T14 = 0-14 tahunY0T4 = 0-4 tahunY0 = 0 tahunY1 = 1 tahunY2 = 2 tahunY3 = 3 tahunY4 = 4 tahunY5T14 = 5-14 tahunY5T9 = 5-9 tahunY5 = 5 tahunY6 = 6 tahunY7 = 7 tahunY8 = 8 tahunY9 = 9 tahunY10T14 = 10-14 tahunY10 = 10 tahunY11 = 11 tahunY12 = 12 tahunY13 = 13 tahunY14 = 14 tahunY15T64 = 15-64 tahunY15T24 = 15-24 tahunY15T19 = 15-19 tahunY15 = 15 tahunY16 = 16 tahunY17 = 17 tahunY18 = 18 tahunY19 = 19 tahunY20T24 = 20-24 tahunY20 = 20 tahunY21 = 21 tahunY22 = 22 tahunY23 = 23 tahunY24 = 24 tahunY25T34 = 25-34 tahunY25T19 = 25-29 tahunY25 = 25 tahunY26 = 26 tahunY27 = 27 tahunY28 = 28 tahunY29 = 29 tahunY30T34 = 30-34 tahunY30 = 30 tahunY31 = 31 tahunY32 = 32 tahunY33 = 33 tahunY34 = 34 tahunY35T44 = 35-44 tahunY35T39 = 35-39 tahunY35 = 35 tahunY36 = 36 tahunY37 = 37 tahunY38 = 38 tahunY39 = 39 tahunY40T44 = 40-44 tahunY40 = 40 tahunY41 = 41 tahunY42 = 42 tahunY43 = 43 tahunY44 = 44 tahunY45T54 = 45-54 tahunY45T49 = 45-49 tahunY45 = 45 tahunY46 = 46 tahunY47 = 47 tahunY48 = 48 tahunY49 = 49 tahunY50T54 = 50-54 tahunY50 = 50 tahunY51 = 51 tahunY52 = 52 tahunY53 = 53 tahunY54 = 54 tahunY55T64 = 55-64 tahunY55T59 = 55-59 tahunY55 = 55 tahunY56 = 56 tahunY57 = 57 tahunY58 = 58 tahunY59 = 59 tahunY60T64 = 60-64 tahunY60 = 60 tahunY61 = 61 tahunY62 = 62 tahunY63 = 63 tahunY64 = 64 tahunY_GE65 = 65+ tahunY65T74 = 65-74 tahunY65T69 = 65-69 tahunY65 = 65 tahunY66 = 66 tahunY67 = 67 tahunY68 = 68 tahunY69 = 69 tahunY70T74 = 70-74 tahunY70 = 70 tahunY71 = 71 tahunY72 = 72 tahunY73 = 73 tahunY74 = 74 tahunY_GE75 = 75+ tahunY75T84 = 75-84 tahunY75T79 = 75-79 tahunY75 = 75 tahunY76 = 76 tahunY77 = 77 tahunY78 = 78 tahunY79 = 79 tahunY80T84 = 80-84 tahunY80 = 80 tahunY81 = 81 tahunY82 = 82 tahunY83 = 83 tahunY84 = 84 tahunY_GE85 = 85+ tahunY85T94 = 85-94 tahunY85T89 = 85-89 tahunY85 = 85 tahunY86 = 86 tahunY87 = 87 tahunY88 = 88 tahunY89 = 89 tahunY90T94 = 90-94 tahunY90 = 90 tahunY90T85 = 85+ tahunY90T75 = 75+ tahunY90T65 = 65+ tahunY90T55 = 55+ tahunY90T45 = 45+ tahunY90T35 = 35+ tahunY90T25 = 25+ tahunY90T15 = 15+ tahunY90T5 = 5+ tahunY90 = 0+ tahun	Isian tidak boleh kosong	Berapa kisaran usia Anda?	Tidak
6 Jenis Kelamin	- Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik.	Jenis Kelamin	Sirius BPS Jenis Kelamin	Saat pendataan	Jumlah tidak ada satuan	Integer		Isian tidak boleh kosong	Apa jenis kelamin Anda?	Tidak
7 Frekuensi akses internet	- Rata-rata akses internet untuk membaca atau mencari informasi (artikel berita, video berita, media informasi lainnya) dalam seminggu	Frekuensi akses internet	PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	Seminggu terakhir		Integer	1 = Tidak pernah2 = 1-2 kali3 = 3-4 kali4 = 5-6 kali5 = lebih dari 6 kali	Isian tidak boleh kosong	Berapa kali Anda mengakses internet rata-rata dalam seminggu untuk membaca atau mencari informasi? (artikel berita, video berita, media informasi lainnya)	Tidak
8 Durasi akses internet	- Rata-rata lama waktu mengakses internet untuk membaca atau mencari informasi (artikel berita, video berita, atau media informasi lainnya) dalam sehari	Durasi akses internet	PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	Seminggu terakhir		Integer	1 = Tidak pernah2 = 1-59 menit3 = 1 jam - 1 jam 59 menit4 = 2 jam - 2 jam 59 menit5 = 3 jam atau lebih	Isian tidak boleh kosong	Berapa lama Anda mengakses internet rata-rata dalam sehari untuk membaca atau mencari informasi? (artikel berita, video berita, media informasi lainnya)	Tidak
9 Jumlah buku dibaca	- Rata-rata jumlah bahan bacaan berbentuk tercetak atau elektronik/digital selama tiga bulan	Jumlah buku dibaca	PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	Tiga bulan terakhir		Integer	1 = Tidak pernah2 = 1-2 bahan bacaan3 = 3-4 bahan bacaan4 = 5-6 bahan bacaan5 = lebih dari 6 bahan bacaan	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah bahan bacaan berbentuk tercetak atau elektronik/digital yang Anda baca rata-rata selama tiga bulan?	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media	INDEKS TINGKAT MINAT BACA MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG ADALAH PENGUKURAN MINAT BACA MASYARAKAT BERDASARKAN KRITERIA NILAI INDEKS YANG DIPEROLEH	TERHADAP HASIL PENYUSUNAN INDEKS TINGKAT MINAT BACA MASYARAKAT DIDAPATKAN RENTANG PERSEPSI : 0-20 = SANGAT RENDAH 20,1-40 = RENDAH 40,1-60 = SEDANG 60,1-80 = TINGGI 80,1-100 = SANGAT TINGGI INDEKS MINAT BACA MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG = 63,57 YANG ARTINYA TINGKAT MINAT BACA MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG TINGGI	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) hasil penjumlahan dari 0,3 dikali frekuensi membaca ditambah 0,3 dikali jumlah buku dengan 0,05 dikali frekuensi akses internet ditambah 0,05 kali durasi akses internet.	INDEKS	-	INDIKATOR MINAT BACA DIDASARKAN KLASIFIKASI : 1. JENIS KELAMIN 2.KELOMPOK UMUR 3.PENDIDIKAN 4.PROFESI	KABUPATEN / KOTA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAKA KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Kependidikan Kabupaten Semarang		
Tahun		2023		
Jenis Statistik		Statistik Sektoral		
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi		
Sektor Kegiatan		Pendidikan Dan Pelatihan		
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak		
Identitas Rekomendasi:		-		
I. Penyelenggara				
1,1	Instansi Penyelenggara		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat		Jl. Gatot Subroto No. 20b Kompleks Perkantoran Sewakul Ungaran	
1,3	Telepon		024-6921134	
1,4	Faksimile		-	
1,5	Email		Datadikkabsmg@gmail.com	
II. Penanggung Jawab				
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab			
	Eselon 1		-	
	Eselon 2		Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)			
	Nama		-	
	Jabatan		Kasubbag Perencanaan	
	Alamat		Jl. Gatot Subroto No. 20b Kompleks Perkantoran Sewakul Ungaran	
	Telepon		024-6921134	
	Faksimile		Datadikkabsmg@gmail.com	
	Email		-	
	III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang		Guna Memenuhi Data Sektoral Terkait Pendidikan Di Wilayah Kabupaten Semarang.	
3,2	Tujuan Kegiatan		Guna Memenuhi Data Sektoral Terkait Pendidikan Di Wilayah Kabupaten Semarang.	
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan			
	A. Perencanaan			
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022	
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022	

	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2023 s/d 30 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Januari 2023 s/d 30 Desember 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 Desember 2023 s/d 30 Desember 2023		
	6	Diseminasi Hasil	30 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023		
7	Evaluasi	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Bentuk Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Bentuk pendidikan yang dimiliki oleh sekolah	Setahun terakhir
	2	Siswa	Siswa	peserta didik yang mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah tertentu	Setahun terakhir
	3	Penduduk	Penduduk	semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.	Kondisi Akhir tahun
	4	Guru	Guru	tenaga pendidik pada jenjang sekolah tertentu	Kondisi akhir tahun
	5	Rombongan belajar	Rombongan belajar	jumlah kelas	Kondisi akhir tahun
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)Computer Aided Web Interviewing (CAWI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Lainnya : sekolah dikdasmen		
VI. Pengumpulan Data					

6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	SupervisiLainnya: melakukan konfirmasi melalui telepon atau wa	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Sma Atau Smk	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	6	
	Pengumpul data/enumerator	101	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: sekolah, guru dan murid	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	31 Desember 2023	
	Digital(Softcopy)	31 Desember 2023	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakases umum?
1	Bentuk Pendidikan	-	Bentuk pendidikan yang dimiliki oleh sekolah	Bentuk Pendidikan	-	Setahun terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Bentuk Pendidikan	Ya
2	Guru	-	tenaga pendidik pada jenjang sekolah tertentu	Guru	-	Kondisi akhir tahun			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Jumlah Guru	Ya
3	Siswa	-	peserta didik yang mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah tertentu	Siswa	-	Setahun terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Jumlah Siswa	Ya
4	Penduduk	-	semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.	Penduduk	-	Kondisi Akhir tahun			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Penduduk	Ya
5	Rombongan belajar	-	jumlah kelas	Rombongan belajar	-	Kondisi akhir tahun			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Jumlah Kelas	Ya

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.	proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.	$APK = \frac{\text{jumlah siswa jenjang pendidikan tertentu}}{\text{jumlah penduduk dalam kelompok umur yang sesuai}}$	Persentase	(tanpa satuan)	- APK usia 4-6 tahun; - APK SD; - APK SMP	Kabupaten
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Murni (APM)	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.	Semakin tinggi APM menunjukkan banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya	$APM\ SD = \frac{\text{jml murid SD usia 7-12}}{\text{jml penduduk usia 7-12}}$; $APM\ SMP = \frac{\text{jml murid SMP usia 13-15}}{\text{jml penduduk usia 13-15}}$; $APM\ SMA = \frac{\text{jml murid usis 16-18}}{\text{jml penduduk usia 16-18}}$	Persentase	(tanpa satuan)	- APM SD; - APM SMP; - APM SMA	Kabupaten

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan	Kompilasi Data Kependudukan Di Kabupaten Semarang	
Tahun	2023	
Jenis Statistik	Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data	Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan	Demografi Dan Kependudukan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?	Tidak	
Identitas Rekomendasi:	-	
I. Penyelenggara		
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang
1,2	Alamat	Jl. Pemuda No. 7 Ungaran
1,3	Telepon	246921105
1,4	Faksimile	246922349
1,5	Email	Disdukcapil.kabsmg@gmail.com
II. Penanggung Jawab		
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab	
	Eselon 1	-
	Eselon 2	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)	
	Nama	-
	Jabatan	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data
	Alamat	Jl. Pemuda No. 7 Ungaran
	Telepon	246921105
	Faksimile	Disdukcapil.kabsmg@gmail.com

	Email	246922349				
III. Perencanaan dan Persiapan						
3,1	Latar Belakang	Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Yang Baik Dibutuhkan Data Dan Informasi Kependudukan Yang Lengkap Dan Akurat. Dengan Demikian, Diharapkan Pembangunan Dapat Berjalan Secara Efisien Dan Tepat Sasaran Serta Berkesinambungan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk. Atau Dengan Kata Lain, Perencanaan Pembangunan Yang Baik Harus Aspiratif Terhadap Data Kependudukan Dan Memandang Data Kependudukan Sebagai Data Yang Sangat Penting. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Serta Memenuhi Kebutuhan Informasi Kependudukan, Maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023.				
3,2	Tujuan Kegiatan	1. Memberikan Gambaran Umum Mengenai Kondisi Dan Potensi Kependudukan Wilayah Kabupaten Semarang 2. Sebagai Bahan Pertimbangan Para Pengambil Kebijakan Dalam Pengambilan Keputusan Yangn Tepat Dalam Proses Pembangunan Di Kabupaten Semarang 3. Menyediakan Data Dan Informasi Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang Dalam Merumuskan Dan Menyusun Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Dan Evaluasi Kebijakan Serta Perencanaan Program/kegiatan Serta Dapat Dipakai Untuk Kalangan Akademisi, Pelaku Bisnis Dan Peminat Demografi				
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan					
	A. Perencanaan					
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023			
	2	Desain	01 April 2023 s/d 30 April 2023			
	B. Pengumpulan					
	3	Pengumpulan Data	01 April 2023 s/d 30 Juni 2023			
	C. Pemeriksaan					
	4	Pengolahan Data	01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023			
	D. Penyebarluasan					
	5	Analisis Data	01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023			
6	Diseminasi Hasil	01 September 2023 s/d 31 Oktober 2023				
7	Evaluasi	01 November 2023 s/d 31 Desember 2023				
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:					
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)	

	1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	jenis kelamin penduduk/warga	Saat Pengumpulan Data
	2	Umur	Dihitung dengan pmbulatan ke bawah	Umur penduduk yang dihitung berdasarkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran	Saat Pengumpulan Data
	3	Status kawin	Status kawin secara sah sesuai data adminduk	Status kawin adalah status perkawinan seseorang menurut yang tercatat secara resmi di lembaga pencatat pernikahan	Saat Pengumpulan Data
	4	Pekerjaan	Pekerjaan Utama	Status bekerja yang tercantum di data Adminduk	Saat Pengumpulan Data
	5	Pendidikan yang ditamatkan	Pendidikan terakhir yang ditamatkan sesuai ijazah	Ijazah/Pendidikan tertinggi yang tercantum di data Adminduk	Saat Pengumpulan Data
	6	Agama	Agama	Agama yang tercantum di data adminduk	Saat Pengumpulan Data
	7	Golongan Darah	Golongan Darah	Golongan darah yang tercantum di data adminduk	Saat Pengumpulan Data
	8	Alamat	Alamat	Alamat kecamatan sesuai data adminduk	Saat Pengumpulan Data
	9	Kepemilikan dokumen adminduk	Dokumen adminduk	Kepemilikan dokumen adminduk	Saat Pengumpulan Data
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Lainnya : Database		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Individu		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		

6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Supervisi	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	-	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	-	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	0	
	Pengumpul data/enumerator	0	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Individu	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/KotaLainnya: kecamatan	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	

8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	30/04/2024	
	Digital(Softcopy)	30/04/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABLE

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Pendidikan yang ditamatkan	-	Ijazah/Pendidikan tertinggi yang tercantum di data Adminduk	Pendidikan terakhir yang ditamatkan sesuai ijazah	-	Saat Pengumpulan Data			Char	=	harus terisi salah satu kode	-	Tidak
2	gol darah	-	Golongan darah yang tercantum di data adminduk	Golongan Darah	-	Saat Pengumpulan Data			Char	=	harus terisi salah satu kode	-	Tidak
3	Kepemilikan dokumen adminduk	-	Kepemilikan dokumen adminduk	Dokumen adminduk	-	Saat Pengumpulan Data			Char	=	harus terisi	-	Tidak
4	alamat	-	Alamat kecamatan sesuai data adminduk	alamat	-	Saat Pengumpulan Data			Char	=	harus terisi	-	Tidak
5	Status kawin	-	Status kawin adalah status perkawinan seseorang menurut yang tercatat secara resmi di lembaga pencatat pernikahan Agama/kepercayaan yang dianut oleh responden sesuai yang diakui oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai agama/kepercayaan yang merupakan dasar pencatatan dalam database Kependudukan. Jika saat pendataan terjadi perbedaan agama yang dianut dengan yang tertera di dokumen KK/KTP, maka isian yang digunakan sesuai dengan pengakuan responden.	Status kawin secara sah sesuai data adminduk	-	Saat Pengumpulan Data			Char	=	harus terisi salah satu kode	-	Tidak
6	Agama	-		Agama	UUD Tahun 1945UU No 23 Tahun 2006UU No 24 Tahun 2013	Saat Pengumpulan Data			Char	1 = Islam2 = Kristen3 = Katolik4 = Hindu5 = Buddha6 = Khonghucu7 = Penghayat Kepercayaan8 = Lainnya	harus terisi salah satu kode	-	Tidak
7	Pekerjaan	-	Status bekerja yang tercantum di data Adminduk	Pekerjaan Utama	-	Saat Pengumpulan Data			Char	=	harus terisi salah satu kode	-	Tidak
8	Jenis Kelamin	-	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Jenis Kelamin	Kondef Operasional Baku Statistik Sosial (2018)	Saat Pengumpulan Data			Char	1 = Laki-laki2 = Perempuan	harus terisi salah satu kode	-	Tidak
9	umur	-	Umur penduduk yang dihitung berdasarkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran	Dihitung dengan pmbulatan ke bawah	-	Saat Pengumpulan Data			Integer	=	harus terisi	-	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Kegiatan Penghasil	Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
										Nama	Publikasi Ketersediaan					
1	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama	Kematian Bayi	Semakin tinggi berarti semakin banyak kejadian kematian bayi	jumlah kematian bayi usia < 1 tahun / jumlah kelahiran hidup *1000	Angka	-	kecamatan dan puskesmas	Tidak			1) jumlah kematian bayi < 1 tahun ; 2) jumlah kelahiran hidup	Pendataan Adminduk	Kabupaten/Kecamatan	Ya	
2	Angka Perkawinan Umum (APU)	Angka Perkawinan Kasar adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu	Penduduk berstatus kawin	Semakin tinggi berarti semakin banyak penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus kawin	jumlah penduduk berstatus kawin / jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas *1000	Angka	-	kecamatan	Tidak			1) jumlah penduduk berstatus kawin ; 2) jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas	Pendataan Adminduk	Kabupaten/Kecamatan	Ya	
3	Rasio Ketergantungan (dependency ratio)	rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (usia 65+ dan 0-14) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun)	Penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif	Semakin rendah berarti beban tanggungan penduduk usia produktif semakin kecil	(Jumlah penduduk usia 0-14 + Jml penduduk 65+) / Jml penduduk usia 15-64 * 100	Rasio	-	kabupaten, per kelompok umur	Tidak			1) jumlah penduduk usia 0-14 tahun; 2) jumlah penduduk usia 65+; 3) jumlah penduduk 15-64 tahun	Pendataan Adminduk	Kabupaten	Ya	
4	Angka Perkawinan Kasar (APK)	Angka Perkawinan Kasar adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu	Penduduk berstatus kawin	Semakin tinggi berarti semakin banyak penduduk yang berstatus kawin	Jumlah penduduk berstatus kawin / total penduduk *1000	Angka	-	kecamatan	Tidak			1) jumlah penduduk berstatus kawin ; 2) jumlah penduduk	Pendataan Adminduk	Kabupaten/kecamatan	Ya	
5	Rasio Jenis Kelamin								Tidak			1) Jumlah penduduk laki-laki; 2) jumlah penduduk perempuan	Pendataan Adminduk	Kabupaten	Ya	
6	Angka Perceraian Umum	Angka Perceraian Umum adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang bercerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.	Perceraian	Semakin tinggi berarti semakin banyak penduduk usia 15 tahun ke atas yang terkena resiko perceraian	jumlah penduduk berstatus cerai / jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas *1000	Angka	-	kecamatan	Tidak			1) jumlah penduduk berstatus cerai ; 2) jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas	Pendataan Adminduk	Kabupaten/Kecamatan	Ya	
7	laju pertumbuhan penduduk	laju pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya	Penduduk	Semakin tinggi berarti pertumbuhan penduduk semakin cepat	(penduduk tahun n - penduduk tahun (n-1)) / Penduduk tahun (n-1) * 100	Persentase	Persen	kecamatan	Tidak			1) Jumlah penduduk tahun ini; 2) jumlah penduduk tahun lalu	Pendataan Adminduk	Kabupaten/kecamatan	Ya	
8	Kepadatan Penduduk	kepadatan penduduk adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau beberapa banyaknya penduduk perkilometer persegi pada periode tahun tertentu	Penduduk	Semakin tinggi/besar nilainya berarti kepadatan penduduknya semakin tinggi	Jumlah penduduk / luas wilayah (luas dalam satuan Km2)	kepadatan	jiwa/km2	kecamatan	Tidak			1) Jumlah penduduk tahun ini; 2) jumlah penduduk tahun lalu	Pendataan Adminduk	Kabupaten/kecamatan	Ya	
9	Angka Perceraian Kasar	Angka Perceraian Kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu	Perceraian	Semakin tinggi berarti semakin banyak penduduk yang berstatus cerai hidup	jumlah penduduk berstatus cerai / total penduduk *1000	Angka	-	kecamatan	Tidak			1) jumlah penduduk berstatus cerai; 2) total penduduk	Pendataan Adminduk	Kabupaten/Kecamatan	Ya	

DINAS PERHUBUNGAN KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Transportasi	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Soekarno-hatta No 5, Bergas	
1,3	Telepon	298522530	
1,4	Faksimile	298522530	
1,5	Email	Dishub.kab.semarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bidang Lalu Lintas	
	Alamat	Jalan Soekarno Hatta No.5 Bergas Kabupaten Semarang	
	Telepon	0298 522530	
	Faksimile	Dishub.kab.semarang@gmail.com	
	Email	0298 522530	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Lalu Lintas Angkutan Jalan Mempunyai Peran Strategis Dalam Mendukung Pembangunan Dan Integrasi Nasional Sebagai Bagian Dari Upaya Memajukan Kesejahteraan Umum Sebagaimana Diamanatkan Oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas Angkutan Jalan Diselenggarakan Dengan Tujuan Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Yang Aman, Selamat, Tertib, Lancar Dan Terpadu Dengan Moda Angkutan Lain Untuk Mendorong	

		Perekonomian Nasional, Memajukan Kesejahteraan Umum, Memperkukuh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Serta Mampu Menjunjung Tinggi Martabat Bangsa. Untuk Mewujudkan Tujuan Diselenggarakannya Lalu Lintas Angkutan Jalan Sangat Tergantung Oleh Ketersediaan Fasilitas Dan Prasarana Lalu Lintas Yang Menghubungkan Daerah Satu Dengan Yang Lainnya. Salah Satunya Adalah Ketersediaan Jalan Yang Berkeselamatan. Jalan Merupakan Unsur Terpenting Dalam Mendukung Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 25 Ayat (1) Bahwa Setiap Jalan Yang Digunakan Untuk Berlalu Lintas Umum Harus Dilengkapi Dengan Perlengkapan Jalan Berupa Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan Dan Pengaman Jalan, Dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berada Di Jalan Dan Di Luar Badan Jalan. Tujuan Dipasanginya Perlengkapan Jalan Adalah Untuk Meningkatkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban Dan Kelancaran Berlalu Lintas, Untuk Mewujudkan Tujuan Tersebut Maka Perlu Adanya Pengelolaan Perlengkapan Jalan Yang Baik, Efektif Dan Efisien			
3,2	Tujuan Kegiatan	Menginventarisasi Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Seluruh Wilayah Kabupaten Semarang			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023		
6	Diseminasi Hasil	08 Januari 2024 s/d 08 Januari 2024			
7	Evaluasi	10 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Rambu lalu lintas	Rambu lalu lintas	bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas punya banyak jenis yang punya kegunaan atau fungsi masing-masing.	Setahun

				Namun secara umum, rambu lalu lintas berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan teratur.		
2	Cermin tikungan	Cermin tikungan		merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. Umumnya dipasang pada tepi jalan pada lokasi-lokasidimana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan.	Saat Pengumpulan Data	
3	Paku marka	Paku marka		perlengkapan jalan yang dilengkapi dengan pemantul cahaya reflektor berwarna kuning, merah atau putih yang dapat berfungsi dalam kondisi permukaan jalan kering ataupun basah. Paku Jalan dapat berfungsi sebagai reflektor marka jalan khususnya pada cuaca gelap dan malam hari.	Saat Pengumpulan Data	
4	Traffic Cone	Traffic Cone		Traffic Cone atau yang biasa disebut sebagai kerucut lalu lintas merupakan perangkat yang digunakan untuk pengaturan lalu lintas dan memiliki sifat sementara. Biasanya perangkat tersebut dipakai untuk mengatur lalu lintas karena sedang ada perbaikan jalan, kecelakaan di jalan raya ataupun menyebrangkan anak sekolah.	Saat Pengumpulan Data	
5	Variable Message Sign (VMS)	Variable Message Sign (VMS)		VMS adalah huruf atau rambu-rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi lalu lintas sebenarnya.	Saat Pengumpulan Data	
6	Guardraill	Guardraill		Guardrail pagar pengaman jalan atau pagar pembatas jalan adalah produk keselamatan jalan raya yang berupa rel beam baja profil w yang dipasang pada tiang baja penyangga atau channel post profil u yang ditanam pada tanah atau beton dan besi pengikat atau blocking piece profil u (besi pengikat dipasang di antara beam w dan tiang penyangga). Pemasangan guardrail pagar pengaman jalan juga dapat berfungsi sebagai pagar pembatas jalan pada median jalan sebagai pengganti kanstin beton.	Saat Pengumpulan Data	
7	Halte	Halte		Halte merupakan tempat pemberhentian angkutan umum untuk menurunkan atau mengangkut penumpang.	Saat Pengumpulan Data	

IV. Desain Kegiatan				
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang	
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Semesteran	
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel	
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia	
4,5	Wilayah Kegiatan			
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG	
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengamatan	

4,7	Sarana Pengumpulan Data	Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)	
4,8	Unit Pengumpulan Data	Lainnya : Fasilitas perlengkapan jalan	
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Supervisi	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Sma Atau Smk	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	2	
	Pengumpul data/enumerator	7	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Tidak	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: Ruas jalan kabupaten	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		

	Digital(Softcopy)	08/01/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Rambu lalu lintas	-	bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas punya banyak jenis yang punya kegunaan atau fungsi masing-masing. Namun secara umum, rambu lalu lintas berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan teratur.	Rambu lalu lintas	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021	Setahun			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Rambu lalu lintas	Tidak
2	Guardraill	-	Guardrail pagar pengaman jalan atau pagar pembatas jalan adalah produk keselamatan jalan raya yang berupa rel beam baja profil u yang dipasang pada tiang baja penyangga atau channel post profil u yang ditanam pada tanah atau beton dan besi pengikat atau blocking piece profil u (besi pengikat dipasang di antara beam w dan tiang penyangga). Pemasangan guardrail pagar pengaman jalan juga dapat berfungsi sebagai pagar pembatas jalan pada median jalan sebagai pengganti kanstin beton.	Guardraill	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021	Saat Pengumpulan Data			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Guardraill	Tidak
3	Cermin tikungan	-	merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. Umumnya dipasang pada tepi jalan pada lokasi-lokasidimana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang khususnya pada tikungan tajam dan persimpangn.	Cermin tikungan	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021	Saat Pengumpulan Data			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Cermin tikungan	Tidak
4	Paku marka	-	perlengkapan jalan yang dilengkapi dengan pemantul cahaya reflektor berwarna kuning, merah atau putih yang dapat berfungsi dalam kondisi permukaan jalan kering ataupun basah. Paku Jalan dapat berfungsi sebagai reflektor marka jalan khususnya pada cuaca gelap dan malam hari.	Paku marka	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021	Saat Pengumpulan Data			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Paku marka	Tidak
5	Halte	-	Halte merupakan tempat pemberhentian angkutan umum untuk menurunkan atau mengangkat penumpang.	Halte	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021	Saat Pengumpulan Data			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Halte	Tidak
6	Variable Message Sign (VMS)	-	VMS adalah huruf atau rambu-rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi lalu lintas sebenarnya.	Variable Message Sign (VMS)	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021	Saat Pengumpulan Data			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Variable Message Sign (VMS)	Tidak
7	Traffic Cone	-	Traffic Cone atau yang biasa disebut sebagai kerucut lalu lintas merupakan perangkat yang digunakan untuk pengaturan lalu lintas dan memiliki sifat sementara. Biasanya perangkat tersebut dipakai untuk mengatur lalu lintas karena sedang ada perbaikan jalan, kecelakaan di jalan raya ataupun menyebrangkan anak sekolah.	Traffic Cone	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021	Saat Pengumpulan Data			Integer	=	Isian tidakboleh kosong	Traffic Cone	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Jumlah rambu lalu lintas	-	Banyaknya bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas punya banyak jenis yang punya kegunaan atau fungsi masing-masing. Namun secara umum, rambu lalu lintas berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan teratur.	Semakin besar nilainya artinya semakin banyak jumlah rambu lalu lintas.	Penjumlahan	Jumlah	Unit	Menurut kondisi: Baik, Sedang, dan Rusak.	Kabupaten
2	Jumlah Halte	-	Banyaknya tempat pemberhentian angkutan umum untuk menurunkan atau mengangkat penumpang di sepanjang jalan kabupaten.	semakin besar nilainya artinya semakin banyak halte di jalan kabupaten.	Penjumlahan	Jumlah	Unit	Menurut kondisi: Baik, Sedang, dan Rusak	Kabupaten

DINAS PERHUBUNGAN KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Transportasi	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Soekarno-hatta No 5, Bergas	
1,3	Telepon	298522530	
1,4	Faksimile	298522530	
1,5	Email	Dishub.kab.semarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bidang Bina Ketertiban Lalu Lintas	
	Alamat	Jl. Soekarno-hatta No 5, Bergas	
	Telepon	298522530	
	Faksimile	Dishub.kab.semarang@gmail.com	
	Email	298522530	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Semakin Banyaknya Kendaraan Bermotor Saat Ini Menyebabkan Berbagai Masalah, Seperti Kecelakaan Lalu Lintas, Polusi Udara Maupun Suara, Serta Rusaknya Prasarana Jalan. Oleh Karena Itu Pemerintah Melalui Dinas Perhubungan Mengadakan Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Berkala Dan Menginventarisasi Data Kendaraan Tersebut. Untuk Meminimalisir Masalah Tersebut Serta Keterlambatan Pengujian Berkala.	

3,2	Tujuan Kegiatan		1. Menciptakan Kendaraan Bermotor Layak Jalan. 2. Menjaga Lingkungan Dari Polusi Kendaraan Bermotor 3. Menjaga Prasarana Jalan Agar Tidak Cepat Rusak,				
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan						
	A. Perencanaan						
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022				
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022				
	B. Pengumpulan						
	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023				
	C. Pemeriksaan						
	4	Pengolahan Data	03 Januari 2024 s/d 06 Januari 2024				
	D. Penyebarluasan						
	5	Analisis Data	09 Januari 2024 s/d 13 Januari 2024				
	6	Diseminasi Hasil	16 Januari 2024 s/d 20 Januari 2024				
7	Evaluasi	23 Januari 2024 s/d 27 Januari 2024					
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:						
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)		
	1	Kendaraan	Jenis kendaraan	Jenis kendaraan yang tertera pada stnk	12 bulan		
IV. Desain Kegiatan							
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang				
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Semesteran				
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel				
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia				
4,5	Wilayah Kegiatan						
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG				
4,6	Metode Pengumpulan Data		Lainnya : pengumpulan surat stnk/bpkb				
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)				
4,8	Unit Pengumpulan Data		IndividuUsaha/Perusahaan				
VI. Pengumpulan Data							
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak				

6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Supervisi	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Sma Atau Smk	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	3	
	Pengumpul data/enumerator	6	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	IndividuUsaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)	20/01/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Kendaraan	macam	Jenis kendaraan yang tertera pada stnk	Jenis Kendaraan	bulan	12 bulan			integer	=	pengecekan kembali entrian di aplikasi	apa jenis kendaraan yang diuji	Ya

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	jumlah kendaraan yang lulus uji	jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji	banyaknya kendaraan bermotor yang lulus uji kelaikan dalam rentang satu tahun (2021)	banyaknya kendaraan	menjumlahkan kendaraan yang lulus uji dari waktu ke waktu	jumlah	unit	berdasarkan jenis kendaraan	kabupaten

DISKOMINFO KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Pengendalian Menara Base Transceiver Station (bts) Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektor	
Cara Pengumpulan Data		Pencacahan Lengkap	
Sektor Kegiatan		Teknologi Informasi Dan Komunikasi	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya	
Identitas Rekomendasi:		V-21.3322.003	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Diponegoro No 14 Gedung D Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50511	
1,3	Telepon	024 76901553	
1,4	Faksimile	024 76901553	
1,5	Email	Kominfo@semarangkab.go.id	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	
	Alamat	Jl. Diponegoro No 14 Gedung D Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50511	
	Telepon	024 76901553	
	Faksimile	Kominfo@semarangkab.go.id	
	Email	024 76901553	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Bertambahnya Jumlah Pengguna Jasa Telekomunikasi Seluler Di Berbagai Daerah Memicu Banyaknya Jumlah Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi Seluler, Maka Di Dirikanlah Menara Telekomunikasi Base Transceiver Station(bts) . Menara Base Transceiver Station(bts) Sangat Berperan Penting Pada Sektor Telekomunikasi . Baik Menara Bts Yang Dibangun Sendiri Oleh Perusahaan Operator Seluler Maupun Menara	

		Bts Terpadu, Kini Jumlahnya Terus Bertambah Banyak Dan Ikut Mengakibatkan Ketidakteraturan Tata Letak Kota Sebuah Daerah Yang Kemudian Juga Dapat Berpengaruh Pada Keamanan Dan Kesehatan Masyarakat, Untuk Itu Diperlukan Pendataan Jumlah Menara Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan			
3,2	Tujuan Kegiatan	1. Untuk Mengetahui Jumlah Menara Bts Di Kabupaten Semarang 2. Untuk Mengetahui Keberadaan Menara Bts Di Kabupaten Semarang 3. Untuk Mengetahui Kepemilikan Menara Bts Di Kabupaten Semarang			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	02 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023		
	2	Desain	02 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	03 April 2023 s/d 31 Mei 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	03 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023		
6	Diseminasi Hasil	01 Desember 2023 s/d 22 Desember 2023			
7	Evaluasi	25 Desember 2023 s/d 29 Desember 2023			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Pemilik menara	Penyedia Menara	Penyedia Menara adalah Perusahaan yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia yang membangun dan/atau mengelola menara untuk keperluan telekomunikasi seluler.	saat pendataan
	2	Alamat perusahaan pemilik	Alamat perusahaan	Alamat perusahaan pemilik adalah alamat tempat beroperasinya pemilik perusahaan	saat pendataan
	3	Tinggi menara	Tinggi menara	Tinggi menara adalah peletakan menara telekomunikasi di permukaan tanah dengan suatu ketinggian tertentu	saat pendataan
	4	Menara Telekomunikasi	Base Transceiver Station (BTS),	Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat telekomunikasi seluler. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara,	saat pendataan

			Menara Telekomunikasi	adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksi disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler	
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Wawancara		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Usaha/Perusahaan		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Kunjungan Kembali		
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak		
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara		
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3		
6,6	Jumlah Petugas				
	Supervisor/penyelia/pengawas		1		
	Pengumpul data/enumerator		2		
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Ya		
VII. Pengolahan dan Analisis					
7,1	Tahapan Pengolahan Data				

	Penyuntingan(Editoring)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Usaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Tidak	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)		
	Datamikro		

METADATA VARIABLE

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Menara Telekomunikasi	Menara BTS	Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat telekomunikasi seluler. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksi disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler	Base Transceiver Station (BTS), Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2018. Penyelenggaraan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Semarang	saat pendataan			integer		harus terisi	-	Ya
2	Alamat perusahaan pemilik	Alamat perusahaan pemilik Menara BTS	Alamat perusahaan pemilik adalah alamat tempat beroperasinya pemilik perusahaan	Alamat perusahaan	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2018. Penyelenggaraan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Semarang	saat pendataan			char		harus terisi	-	Tidak
3	Tinggi menara	Tinggi menara BTS	Tinggi menara adalah peletakan menara telekomunikasi di permukaan tanah dengan suatu ketinggian tertentu	Tinggi Menara	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2018. Penyelenggaraan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Semarang	saat pendataan			Rasio		harus terisi	-	Ya
4	Pemilik menara	Pemilik Menara BTS	Penyedia Menara adalah Perusahaan yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia yang membangun dan/atau mengelola menara untuk keperluan telekomunikasi seluler.	Penyedia Menara	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2018. Penyelenggaraan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Semarang	saat pendataan			char		harus terisi	-	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Jumlah Menara Telekomunikasi	Jumlah menara BTS	Base transceiver station (BTS) adalah suatu alat yang menghubungkan pengguna telepon dengan operator, biasanya dipasang pada suatu menara dimana suatu menara minimal dapat menampung 3 provider. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksi disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.	semakin tinggi nilainya, semakin banyak jumlah menara	penjumlahan	jumlah	unit	-	Kabupaten

DISKOMINFO KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Layanan Pengaduan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Teknologi Informasi Dan Komunikasi	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Diponegoro No. 14 Gedung D, Ungaran, Kab. Semarang	
1,3	Telepon	024 76901553	
1,4	Faksimile	024 76901553	
1,5	Email	Statistik.kominfokabsmg@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	Drs. Gatot Harjanto	
	Jabatan	Kepala Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik	
	Alamat	Jl. Diponegoro No 14 Gedung D Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50511	
	Telepon	024 76901553	
	Faksimile	Diskominfokabsemarang@gmail.com	
	Email	024 76901553	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Kewajiban Pemerintah Daerah Setiap Tahun Wajib Memberikan Informasi Terkait Dengan Daftar Informasi Publik Dari Setiap Opd Baik Dinas Maupun Kecamatan Kepada Masyarakat Yang	

		Membutuhkan Informasi Tersebut. Proses Dari Publikasi Informasi Tersebut Terdapat Beberapa Tahapan Dan Waktu Tertentu (deadline) Yang Harus Dipenuhi. Selain Memberikan Informasi Kepada Masyarakat, Pemerintah Memiliki Kewajiban Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat. Adanya Pengaduan Yang Dibentuk Dengan Tujuan, Agar Penelenggara Dapat Mengelola Pengaduan Dari Masyarakat Secara Sederhana, Cepat, Tepat, Tuntas, Dan Terkoordinasi Dengan Baik Sehingga Dapat Memberikan Akses Untuk Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Pengaduan Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Pengaduan Masyarakat Merupakan Salah Satu Bentuk Partisipasi Pengawasan Masyarakat Yang Efektif Dalam Rangka Ikut Serta Mewujudkan Penelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Kanal Pengaduan Ini Dibentuk Dengan Tujuan Agar Penyelenggara Dapat Mengelola Pengaduan Dari Masyarakat Secara Sederhana, Cepat, Tepat Tuntas, Dan Terkoordinasi Dengan Baik, Kemudian Dapat Memberikan Akses Untuk Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Pengaduan Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	
3,2	Tujuan Kegiatan	1. Untuk Menambah Pemahaman Kepada Opd/ppid Pelaksana Dan Pengelola Pengaduan Terkait Ppid Dan Pengaduan Masyarakat; 2. Mempublikasikan Daftar Informasi Publik (dip) Dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (dik); 3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kabupaten Semarangf Sesuai Amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008; 4. Sebagai Bahan Dalam Perencanaan Dan Perbaikan Pelayanan Publik/masyarakat Kedepannya; Dan 5. Untuk Masukan Serta Usulan Dan Kajian Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Program Yang Akan Datang.	
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan		
	A. Perencanaan		
	1	Perencanaan Kegiatan	27 Desember 2022 s/d 30 Desember 2022
	2	Desain	27 Desember 2022 s/d 30 Desember 2022
	B. Pengumpulan		
	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
	C. Pemeriksaan		
	4	Pengolahan Data	02 Januari 2024 s/d 15 Januari 2024
	D. Penyebarluasan		
	5	Analisis Data	16 Januari 2024 s/d 24 Januari 2024
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:		

	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Cara Penyampaian Berkas Pengaduan	Pengaduan	Kanal Pengaduan yang digunakan untuk menyampaikan aduan	Saat pengumpulan data
	2	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang menerima dan mengelola layanan pengaduan.	Saat pengumpulan data
	3	Klasifikasi pengaduan	Klasifikasi	Pengelompokan berdasarkan kategori pengaduan yang disampaikan	Saat pengumpulan data
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Individu		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Supervisi		
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak		
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara		
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3		
6,6	Jumlah Petugas				
	Supervisor/penyelia/pengawas		1		

	Pengumpul data/enumerator	1	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editoring)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Individu	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)	31/01/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakases umum?
1	Cara Penyampaian Berkas Aduan	Cara Penyampaian Berkas Pengaduan	Kanal Pengaduan yang digunakan untuk menyampaikan aduan	Kanal Pengaduan	-	Tahunan	-	Aduan	-	KN01 = SP4N_LAPOR!KN02 = LaporGub!KN03 = Lapor Bupati	-	-	Ya
2	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang menerima dan mengelola layanan pengaduan.	Perangkat Daerah	-	Tahunan	-	Aduan	-	PD00 = SEKRETARIAT DAERAH!PD01 = BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH!PD02 = BPBD!PD03 = BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH!PD04 = RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMOPD05 = RSUD dr. GONDO SUWARNOPD06 = BADAN KEUANGAN DAERAH!PD07 = BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK!PD08 = INSPEKTORAT!PD09 = SATPOL PP & DAMKARP!D10 = DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH!PD11 = DINAS LINGKUNGAN HIDUP!PD12 = DINAS SOSIAL!PD13 = DINAS TENAGA KERJA!PD14 = DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN dan OLAH RAGA!PD15 = DINAS KESEHATAN!PD16 = DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA!PD17 = DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU!PD18 = DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA!PD19 = DINAS PEKERJAAN UMUM!PD20 = DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL!PD21 = DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PANGAN!PD22 = DINAS PERHUBUNGAN!PD23 = DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA!PD24 = DINAS PARIWISATA!PD25 = DINAS KOPERASI UMMK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN!PD26 = AMBARAWAP!PD27 = BANCAP!PD28 = BANDUNGAN!PD29 = BANYUBIRUP!D30 = BAWENP!D31 = BERGAS!D32 = BRINGIN!D33 = GETASAN!D34 = JAMBUP!D35 = KALI WUNGUP!D36 = PABELAN!D37 = PRINGAPUS!D38 = SUMOWONOP!D39 = SURUH!D40 = SUSUKAN!D41 = TENGARAN!D42 = TUNTANG!D43 = UNGARAN BARAT!D44 = UNGARAN TIMUR!D45 = PDAMP!D46 = DIKEMBALIKAN!D47 = DIALIHKAN	-	Isi Aduan	Ya
3	Kategori Pengaduan	Kategori Pengaduan	Pengelompokan berdasarkan kategori pengaduan yang disampaikan	Kategori	-	Tahunan	-	Aduan	-	0001 = INFRASTRUKTUR!0002 = PENDIDIKAN!0003 = BANTUAN SOSIAL!0004 = SOSIAL MASYARAKAT!0005 = KEPENDUDUKAN!0006 = AIR PDAM!0007 = LINGKUNGAN HIDUP!0008 = KETERTIBAN UMUM!0009 = PELAYANAN PUBLIK!0010 = KEPEGAWAIAN!0011 = PELAYANAN KESEHATAN!0012 = PERIZINAN!0013 = PENERANGAN JALAN!0014 = LALU LINTAS!0015 = TENAGA KERJA!0016 = PAJAK DAERAH!0017 = PENANGGULANGAN BENCANA!0018 = DANA DESA!0019 = PERDAGANGAN!0020 = PARIWISATA!0021 = POLITIK!0022 = PERBANKAN!0023 = INFORMASI PUBLIK!0024 = PKK!0025 = PERTANIAN!0026 = LEGALITAS!0027 = IRRIGASI!0028 = INFORMATIKA	-	Nama Pelapor; Alamat Email Pelapor; Lokasi Aduan; Isi Aduan.	Ya
4	Jumlah Pengaduan	-	Jumlah pengaduan yang masuk pada kanal aduan yang dikelola	Jumlah Pengaduan	-	Tahunan	-	Aduan	-	- = -	-	-	Ya

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakases umum?
										Nama	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	Jumlah Aduan yang Selesai Ditangani	Total jumlah aduan yang telah selesai ditangani dalam kurun waktu setahun	Jumlah Aduan	-	Penjumlahan	Jumlah	Aduan	-	Tidak			-	-	-	Ya
2	Jumlah Aduan yang Belum Ditindaklanjuti	Total jumlah aduan yang belum ditindaklanjuti yang masuk pada kanal aduan	Aduan belum Ditindaklanjuti	-	Penjumlahan	Jumlah	Aduan	-	Tidak			-	-	-	Ya
3	Jumlah Aduan menurut Klasifikasi	Total jumlah aduan menurut kategori/klasifikasi yang masuk pada kanal aduan yang dikelola	Aduan menurut Klasifikasi	-	Penjumlahan	Jumlah	Aduan	-	Tidak			-	-	-	Ya

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Jumlah Pedagang Pasar Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2024	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Sektor Publik Perpajakan Dan Regulasi Pasar	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya	
Identitas Rekomendasi:		V-24.3322.001	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Semarang	
1,2	Alamat	Kompleks Perkantoran Candi Asri, Ungaran	
1,3	Telepon	246921219	
1,4	Faksimile	246921451	
1,5	Email	Dinkoperindagkabsmg@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	Drs. Edhy Purwanta	
	Jabatan	Kepala Bidang Pasar Dan Pkl	
	Alamat	Jl. Diponegoro (komplek Perkantoran Candiasri) Ungaran	
	Telepon	81325873419	
	Faksimile	Bidangpasardiskumperindag@gmail.com	
	Email	-	
III. Perencanaan dan Persiapan			

3,1	Latar Belakang		Mengetahui Jumlah Pedagang Los Dan Kios Pada Pasar Yang Di Bawah Koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Semarang Terkait Target Retribusi Daerah.		
3,2	Tujuan Kegiatan		Mengetahui Jumlah Pedagang Los Dan Kios Pada Pasar Yang Di Bawah Koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Semarang Terkait Target Retribusi Daerah.		
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	20 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	2	Desain	20 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	03 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	02 Januari 2024 s/d 10 Januari 2024		
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Pedagang	-	Pedagang yang berjualan di los dan kios di pasar yang di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.	pada saat pendataan
	2	Pasar	-	tempat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan kegiatan ekonomi (jual-beli), dimana pasar ini hanya yang berada di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.	saat pendataan
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				

	1	JAWA TENGAH	SEMARANG	
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder	
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)Computer Aided Web Interviewing (CAWI)	
4,8	Unit Pengumpulan Data		Usaha/Perusahaan	
VI. Pengumpulan Data				
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Supervisi	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Sma Atau Smk	
6,6	Jumlah Petugas			
	Supervisor/penyelia/pengawas		2	
	Pengumpul data/enumerator		14	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis				
7,1	Tahapan Pengolahan Data			
	Penyuntingan(Editing)		Tidak	
	Penyandian(Coding)		Tidak	
	(Data Entry)		Ya	
	Penyahihan(Validasi)		Ya	
7,2	Metode Analisis		Deskriptif	
7,3	Unit Analisis		Usaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis		Kabupaten/KotaLainnya: Pasar	
VIII. Diseminasi Hasil				
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum			
	Tercetak(Hardcopy)		Tidak	
	Digital(Softcopy)		Tidak	

	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)		
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Pasar	-	tempat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan kegiatan ekonomi (jual-beli), dimana pasar ini hanya yang berada di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.	konsep tempat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan kegiatan ekonomi (jual-beli), dimana pasar ini hanya yang berada di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.	-	saat pendataan			integer		Harus isi	Nama Pasar	Tidak
2	Pedagang	-	Pedagang yang berjualan di los dan kios di pasar yang di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.	Pedagang yang berjualan di los dan kios di pasar yang di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.	-	pada saat pendataan			integer		harus terisi	-	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	jumlah pedagang pasar	jumlah pedagang yang berjualan di los dan kios di pasar yang di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Semarang	jumlah pedagang yang berjualan di los dan kios di pasar yang di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Semarang	-	penjumlahan	jumlah	pedagang	-	kecamatan

DINAS TENAGA KERJA KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Ketenagakerjaan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya	
Identitas Rekomendasi:		K-24.3322.006	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Pemuda No. 7 Krajan Ungaran Barat	
1,3	Telepon	(024) 6921160	
1,4	Faksimile	(024) 6925222	
1,5	Email	Pentakabsemarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bidang Perluasan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
	Alamat	Jln. Pemuda No. 7 Krajan Kec. Ungaran Barat	
	Telepon	-246921160	
	Faksimile	Disnakerkabsemarang@gmail.com	
	Email	-246925222	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Penempatan Pekerja Migran Indonesia Merupakan Suatu Upaya Untuk Mewujudkan Hak Dan Kesempatan Yang Sama Bagi Tenaga Kerja Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghasilan Yang Layak. Pekerja Migran Indonesia Harus Dilindungi Dari Perdagangan Manusia,	

		Perbudakan Dan Kerja Paksa, Korban Kekerasan, Kesewenang-wenangan, Kejahatan Atas Harkat Dan Martabat Manusia, Serta Perlakuan Lain Yang Melanggar Hak Asasi Manusia			
3,2	Tujuan Kegiatan		1. Mendapatkan Basis Data Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Semarang, 2. Memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Dan Setelah Bekerja, 3. Mengetahui Negara Yang Menjadi Tujuan Pekerja Migran Indonesia, 4. Mengatur, Membina, Melaksanakan Dan Mengawasi Penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.		
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 30 Desember 2022		
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 30 Desember 2022		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	03 Januari 2023 s/d 30 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	02 Januari 2024 s/d 06 Januari 2024		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	06 Januari 2024 s/d 11 Januari 2024		
6	Diseminasi Hasil	13 Januari 2024 s/d 13 Januari 2024			
7	Evaluasi	16 Januari 2024 s/d 17 Januari 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Calon Pekerja Migran Indonesia	Calon Pekerja Migran Indonesia	Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.	Sebulan terakhir
	2	Pekerja Migran Indonesia	Pekerja Migran Indonesia	Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.	Sebulan terakhir
	3	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Jenis kelamin sesuai dokumen kependudukan calon Pekerja Migran Indonesia.	Sebulan terakhir
	4	Umur	Umur	Umur calon Pekerja Migran Indonesia pada saat ulang tahun terakhir	Sebulan terakhir

	5	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan terakhir yang ditamatkan Pekerja Migran Indonesia.	Sebulan terakhir
	6	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.	Sebulan terakhir
	7	Negara Tujuan	Negara Tujuan	Negara yang menjadi tujuan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja.	Sebulan terakhir
	8	Jabatan	Jabatan	Jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan nanti.	Sebulan terakhir
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Computer Aided Web Interviewing (CAWI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Individu		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Lainnya: tidak ada pemeriksaan kualitas pengumpulan data		
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak		
6,4	Petugas Pengumpulan Data		-		
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		-		
6,6	Jumlah Petugas				
	Supervisor/penyelia/pengawas		0		
	Pengumpul data/enumerator		0		

6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editoring)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Tidak	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Individu	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Tidak	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)		
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Pendidikan	-	Pendidikan terakhir yang ditamatkan Pekerja Migran Indonesia.	Pendidikan	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Sebulan terakhir			Char		-	Pendidikan	Tidak
2	Umur	-	Umur calon Pekerja Migran Indonesia pada saat ulang tahun terakhir	Umur	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Sebulan terakhir			Integer		-	Umur Calon Pekerja Migran Indonesia	Tidak
3	Negara Tujuan	-	Negara yang menjadi tujuan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja.	Negara Tujuan	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Sebulan terakhir			Char		-	Negara Tujuan	Tidak
4	Calon Pekerja Migran Indonesia	-	Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.	Calon Pekerja Migran Indonesia	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Sebulan terakhir			Char		-	Nama Calon Pekerja Migran Indonesia	Tidak
5	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	-	Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Sebulan terakhir			Char		-	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Tidak
6	Jabatan	-	Jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan nanti.	Jabatan	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Sebulan terakhir			Char		-	Jabatan	Tidak
7	Jenis Kelamin	-	Jenis kelamin sesuai dokumen kependudukan calon Pekerja Migran Indonesia.	Jenis Kelamin	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Sebulan terakhir			Char		-	Jenis Kelamin	Tidak
8	Pekerja Migran Indonesia	-	Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.	Pekerja Migran Indonesia	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Sebulan terakhir			Char		-	Nama Pekerja Migran Indonesia	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Jumlah penempatan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)	Pekerja Migran Indonesia	Jumlah tenaga kerja yang menjadi Pekerja Migran Indonesia	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang menjadi Pekerja Migran Indonesia	Jumlah seluruh Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja pada setiap bulan	Jumlah	Orang/Bulan	Menurut Bulan	Kabupaten

DINAS PARIWISATA KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Pencacahan Lengkap Kunjungan Daya Tarik Wisata Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Pencacahan Lengkap	
Sektor Kegiatan		Industri Dan Jasa	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya	
Identitas Rekomendasi:		V-21.3322.002	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran 50519	
1,3	Telepon	(024) 6921424	
1,4	Faksimile	(024) 6921463	
1,5	Email	Dispartakabsemarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas Pariwisata	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	
	Alamat	Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran	
	Telepon	024-6921424	
	Faksimile	Dispartakabsemarang@gmail.com	
	Email	024-6921463	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Kabupaten Semarang Memiliki Destinasi Wisata Yang Lengkap Ditunjang Dengan Letak Geografis Dan Iklim Yang Mendukung. Salah Satu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Yang Dilakukan Oleh Dinas Pariwisata Yakni Kegiatan Pengembangan Statistik Kepariwisataaan.	

3,2	Tujuan Kegiatan	1. Untuk Mengetahui Tingkat Kunjungan Wisatawan Di Tiap Daya Tarik Wisata Maupun Pendapatan Yang Diperoleh Sehingga Tercipta Tertib Laporan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Di Daya Tarik Wisata. 2. Menyediakan Data Dan Informasi Guna Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Pengambil Keputusan Dan Kebijakan Pembangunan Daerah. 3. Untuk Memudahkan Semua Pihak Di Jajaran Pemerintah Pada Lingkup Kabupaten Semarang Dalam Membangun Pola Kerja Sama Berbasis Data Dan Informasi. 4. Sebagai Pedoman Dan Landasan Bagi Pemerintah Daerah Untuk Mengetahui Potensi Daerah Sehingga Menjadi Pijakan Yang Jelas Untuk Melakukan Perencanaan Maupun Evaluasi Terhadap Pembangunan Daerah. 5. Sebagai Acuan Dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rkpd) Dan Rencana Strategis Opd Sehingga Perencanaan Lebih Terarah Dan Terukur.			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	04 November 2022 s/d 29 November 2022		
	2	Desain	02 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	02 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	16 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024		
6	Diseminasi Hasil	01 Maret 2024 s/d 22 Maret 2024			
7	Evaluasi	25 Maret 2024 s/d 29 Maret 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Status Pengelolaan	Status Pengelolaan	Sistem pengelolaan dari usaha pariwisata	Setahun yang lalu
	2	Harga Tanda Masuk	Harga Tanda Masuk	Harga tiket yang bayarkan oleh pengunjung untuk dapat mengakses tempat daya tarik wisata	Setahun yang lalu
	3	Biaya Parkir Kendaraan	Biaya Parkir Kendaraan	Harga tiket parkir yang bayarkan oleh pengunjung untuk dapat memarkir kendaraan yang digunakan pada tempat daya tarik wisata	Setahun yang lalu

	4	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	seseorang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa	Setahun yang lalu
	5	Wisatawan mancanegara (wisman)	Wisman	Seseorang yang mengunjungi suatu negara diluar negara tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi	Sebulan yang lalu
	6	Wisatawan nusantara (wisnus)	Wisnus	Seseorang yang mengunjungi tempat daya tarik wisata pada negara yang sesuai dengan tempat tinggalnya	Sebulan yang lalu
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		WawancaraMengisi Kuesioner Sendiri		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Usaha/Perusahaan		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Kunjungan Kembali		
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Ya		
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara		
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Sma Atau Smk		
6,6	Jumlah Petugas				
	Supervisor/penyelia/pengawas		1		
	Pengumpul data/enumerator		1		
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Tidak		
VII. Pengolahan dan Analisis					

7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Tidak	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Usaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Tidak	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	29/03/2024	
	Digital(Softcopy)		
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Status Pengelolaan	-	Sistem pengelolaan dari usaha pariwisata	Status Pengelolaan	-	Setahun yang lalu			Integer		Isian tidak boleh kosong	Status pengelolaan oleh	Ya
2	Harga Tanda Masuk	-	Harga tiket yang bayarkan oleh pengunjung untuk dapat mengakses tempat daya tarik wisata	Harga Tanda Masuk	-	Setahun yang lalu			Integer		Isian tidak boleh kosong	Harga tanda masuk	Ya
3	Biaya Parkir Kendaraan	-	Harga tiket parkir yang bayarkan oleh pengunjung untuk dapat memarkir kendaraan yang digunakan pada tempat daya tarik wisata	Biaya Parkir Kendaraan	-	Setahun yang lalu	Integer	-	Integer		Isian tidak boleh kosong	Biaya parkir kendaraan	Ya
4	Wisatawan nusantara (wisnus)	-	Seseorang yang mengunjungi tempat daya tarik wisata pada negara yang sesuai dengan tempat tinggalnya	Wisnus	-	Sebulan yang lalu			Integer		Isian tidak boleh kosong	Pengunjung wisnus	Ya
5	Wisatawan mancanegara (wisman)	-	Seseorang yang mengunjungi suatu negara diluar negara tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi	Wisman	-	Sebulan yang lalu			Integer		Isian tidak boleh kosong	Pengunjung wisman	Ya
6	Tenaga Kerja	-	seseorang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa	Tenaga Kerja	-	Setahun yang lalu			Integer		Isian tidak boleh kosong	Tenaga kerja	Ya

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	Jumlah wisatawan nusantara	Wisatawan nusantara	Jumlah wisatawan nusantara	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah pengunjung wisatawan nusantara	jumlah dari seluruh orang yang mengunjungi tempat daya tarik wisata pada negara yang sesuai dengan tempat tinggalnya	Jumlah	Orang	- menurut klasifikasi jenis daya tarik wisata	Kabupaten
2	Jumlah wisatawan mancanegara	Wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah pengunjung wisatawan mancanegara	jumlah dari seluruh orang yang mengunjungi tempat daya tarik wisata pada negara yang tidak sesuai dengan tempat tinggalnya	Jumlah	Orang	- menurut klasifikasi jenis daya tarik wisata	Kabupaten
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah pengunjung wisatawan	jumlah dari seluruh orang yang mengunjungi tempat daya tarik wisata baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri	Jumlah	Orang	- menurut klasifikasi jenis daya tarik wisata; - menurut bulan; - menurut tempat daya tarik wisata	Kabupaten
4	Jumlah tenaga kerja	Tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah tenaga kerja pada klasifikasi tersebut	Jumlah seluruh tenaga kerja tempat daya tarik wisata berdasarkan klasifikasi	Jumlah	Orang	- menurut klasifikasi jenis daya tarik wisata; - menurut tempat daya tarik wisata; - menurut jenis kelamin	Kabupaten
5	Jumlah Pendapatan dari Pengunjung	Pendapatan	Jumlah Pendapatan dari Pengunjung	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah pendapatan yang diperoleh dari pengunjung	hasil kali jumlah kunjungan wisatawan dengan harga tanda masuk	Jumlah	Rupiah	-	Kabupaten
6	Jumlah Pendapatan dari Parkir	Pendapatan	Jumlah Pendapatan dari Parkir	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah pendapatan yang diperoleh dari parkir	hasil kali jumlah kendaraan yang parkir dengan biaya parkir kendaraan	Jumlah	Rupiah	-	Kabupaten
7	Jumlah Pendapatan	Pendapatan	Jumlah Pendapatan	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah pendapatan yang diperoleh	hasil penjumlahan dari jumlah pendapatan dari pengunjung dan jumlah pendapatan dari parkir	Jumlah	Rupiah	-	Kabupaten

DINAS PARIWISATA KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Pencacahan Lengkap Tingkat Hunian Kamar Hotel Dan Akomodasi Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Pencacahan Lengkap	
Sektor Kegiatan		Industri Dan Jasa	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya	
Identitas Rekomendasi:		V-21.3322.002	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran 50519	
1,3	Telepon	(024) 6921424	
1,4	Faksimile	(024) 6921463	
1,5	Email	Dispartakabsemarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas Pariwisata	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	Wiwik Lestiyani	
	Jabatan	Kepala Bidang Industri Pariwisata	
	Alamat	Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran 50519	
	Telepon	(024) 6921424	
	Faksimile	Dispartakabsemarang@gmail.com	
	Email	(024) 6921463	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	- Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Bidang Industri Pariwisata Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	

		Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. - Sebagai Bahan Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Yang Terarah Dan Terukur Sehingga Diperlukan Data-data Industri Pariwisata.			
3,2	Tujuan Kegiatan	- Sebagai Salah Satu Bahan Masukan, Pertimbangan Dan Pengambilan Keputusan Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata. - Penyediaan Data Dan Pelayanan Informasi Untuk Perumusan Dan Evaluasi Kebijakan Teknis Penataan Industri Pariwisata, Pembinaan, Sosialisasi, Dan Pengawasan.			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	04 November 2022 s/d 29 November 2022		
	2	Desain	02 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	02 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	16 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024		
6	Diseminasi Hasil	01 Maret 2024 s/d 22 Maret 2024			
7	Evaluasi	25 Maret 2024 s/d 29 Maret 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Klasifikasi Hotel	Hotel	Jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll.) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.	Sebulan terakhir
	2	Tenaga kerja	Tenaga kerja	Mencakup tenaga kerja tetap, pekerja tidak tetap/harian	Sebulan terakhir

	3	Kamar tersedia	Kamar tersedia	Banyaknya kamar yang tersedia untuk tamu (yang sedang digunakan/ terisi ataupun tidak terisi tamu). Tidak termasuk kamar yang sedang diperbaiki, kamar pegawai hotel dan kamar untuk kantor.	Sebulan terakhir
	4	Tempat tidur tersedia	Tempat tidur tersedia	Banyaknya tempat tidur yang tersedia untuk tamu (yang sedang digunakan/terisi ataupun tidak terisi tamu). Jumlah tempat tidur dimaksud adalah banyaknya kapasitas tamu secara normal dari seluruh tempat tidur yang tersedia pada hotel tersebut .	Sebulan terakhir
	5	Kamar Isi	Kamar Isi	Banyaknya kamar yang sedang digunakan / terisi oleh tamu.	Sebulan terakhir
	6	Tamu Hotel	Tamu Hotel	Setiap orang yang datang dengan tujuan untuk menginap di hotel dan atau mempergunakan fasilitas atau jasa-jasa hotel yang telah disediakan.	Sebulan terakhir
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		WawancaraMengisi Kuesioner Sendiri		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Usaha/Perusahaan		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Kunjungan Kembali		
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Ya		
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara		
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3		
6,6	Jumlah Petugas				

	Supervisor/penyelia/pengawas	1	
	Pengumpul data/enumerator	1	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Usaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Tidak	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	29/03/2024	
	Digital(Softcopy)		
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Tempat tidur tersedia	-	Banyaknya tempat tidur yang tersedia untuk tamu (yang sedang digunakan/terisi ataupun tidak terisi tamu). Jumlah tempat tidur dimaksud adalah banyaknya kapasitas tamu secara normal dari seluruh tempat tidur yang tersedia pada hotel tersebut .	Tempat tidur tersedia	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel	Sebulan terakhir			Integer	=	Isian tidak boleh kosong	Tempat tidur tersedia	Ya
2	Kamar tersedia	-	Banyaknya kamar yang tersedia untuk tamu (yang sedang digunakan/ terisi ataupun tidak terisi tamu). Tidak termasuk kamar yang sedang diperbaiki, kamar pegawai hotel dan kamar untuk kantor.	Kamar tersedia	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel	Sebulan terakhir			Integer		Isian tidak boleh kosong	Kamar tersedia	Ya
3	Tenaga Kerja	-	Mencakup tenaga kerja tetap, pekerja tidak tetap/harian	Tenaga kerja	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel	Sebulan terakhir			Integer	1 = Laki-laki2 = Perempuan	Isian tidak boleh kosong	Jumlah tenaga kerja	Ya
4	Tamu hotel	-	Setiap orang yang datang dengan tujuan untuk menginap di hotel dan atau mempergunakan fasilitas atau jasa-jasa hotel yang telah disediakan.	Tamu Hotel	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel	Sebulan terakhir			Integer		Isian tidak boleh kosong	Banyaknya tamu check in	Ya
5	Klasifikasi hotel	-	Jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll.) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.	Hotel	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel	Sebulan terakhir			Char	1 = Bintang2 = Non Bintang3 = Pondok Wisata	Isian tidak boleh kosong	Klasifikasi hotel	Ya
6	Kamar isi	-	Banyaknya kamar yang sedang digunakan / terisi oleh tamu.	Kamar isi	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel	Sebulan terakhir			Integer		Isian tidak boleh kosong	Banyak kamar check in	Ya

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Jumlah Hotel	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah hotel pada klasifikasi tersebut	Jumlah seluruh hotel berdasarkan klasifikasi	Jumlah	Unit	1. Klasifikasi Hotel, 2. Bulan, 3. Klasifikasi hotel dan bulan	Kabupaten
2	Jumlah Kamar Hotel	Fasilitas Hotel	Jumlah Kamar Hotel	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah kamar hotel pada klasifikasi tersebut	Jumlah seluruh kamar hotel berdasarkan klasifikasi	Jumlah	Unit	1. Klasifikasi Hotel, 2. Bulan, 3. Klasifikasi hotel dan bulan	Kabupaten
3	Jumlah Tempat Tidur Hotel	Fasilitas Hotel	Jumlah Tempat Tidur Hotel	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah tempat tidur hotel pada klasifikasi tersebut	Jumlah seluruh tempat tidur hotel berdasarkan klasifikasi	Jumlah	Unit	1. Klasifikasi Hotel, 2. Bulan, 3. Klasifikasi hotel dan bulan	Kabupaten
4	Jumlah Tamu Hotel	Konsumen	Jumlah Tamu Hotel	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah tamu hotel pada klasifikasi tersebut	Jumlah seluruh tamu hotel berdasarkan klasifikasi	Jumlah	Orang	1. Klasifikasi Hotel, 2. Bulan, 3. Klasifikasi hotel dan bulan	Kabupaten
5	Jumlah Tenaga Kerja	Fasilitas Hotel	Jumlah Tenaga Kerja	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah tenaga kerja hotel pada klasifikasi tersebut	Jumlah seluruh tenaga kerja hotel berdasarkan klasifikasi	Jumlah	Orang	1. Klasifikasi Hotel, 2. Bulan, 3. Klasifikasi hotel dan bulan	Kabupaten
6	Tingkat Hunian Kamar	Konsumen	Tingkat Hunian Kamar	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak kamar yang tersedia di hotel yang dihuni oleh tamu hotel.	Jumlah kamar yang dihuni tamu dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia dikalikan 100 persen.	Persentase	Persen	1. Klasifikasi Hotel, 2. Bulan	Kabupaten
7	Jumlah kamar terisi	Konsumen	Jumlah kamar terisi	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak kamar yang tersedia di hotel yang dihuni oleh tamu hotel.	Jumlah kamar yang dihuni tamu hotel berdasarkan klasifikasi	Jumlah	Unit	1. Klasifikasi hotel dan bulan	Kabupaten

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Bumdes Dan Bumdesma Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Sektor Publik Perpajakan Dan Regulasi Pasar	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Garuda I No 2 Ungaran 50511	
1,3	Telepon	(024) 6921447	
1,4	Faksimile	(024) 6921447	
1,5	Email	Bapermasdeskabupatensemaring@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Dan Ekonomi Desa	
	Alamat	Jl. Garuda I No 2 Ungaran 50511	
	Telepon	(024) 6921447	
	Faksimile	Bapermasdeskabupatensemaring@gmail.com	
	Email	(024) 6921447	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Undang-undang (uu) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat	

		Daerah Kabupaten Semarang. Dimana Terdapat Perincian Tugas Seksi Ekonomi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Yang Salah Satunya Adalah Menyediakan Profil Ekonomi Desa Sebagai Bahan Acuan Pengembangan Kawasan Pedesaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sehingga Melalui Desk Ini Diharapkan Dapat Mendapatkan Data Yang Akurat.			
3,2	Tujuan Kegiatan	Desk Profil Bumdes Dilaksanakan Untuk Mengumpulkan Data Dan Informasi Terkait Data Bumdes Dan Rintisan Bumdes.			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Juli 2023 s/d 30 November 2023		
	2	Desain	01 September 2023 s/d 31 Oktober 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	20 September 2023 s/d 16 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	22 November 2023 s/d 16 Desember 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	07 Desember 2023 s/d 27 Desember 2023		
	6	Diseminasi Hasil	27 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023		
7	Evaluasi	27 Desember 2023 s/d 05 Januari 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Nama BUMDes	Nama BUMDes	Mendeskripsikan nama bumdes yang ada di desa	Saat Pengumpulan Data
	2	Alamat BUMDes	Alamat BUMDes	Mendeskripsikan alamat BUMDes yang ada di desa	Saat Pengumpulan Data
	3	Perdes BUMDes	Perdes BUMDes	Mendeskripsikan Perdes BUMDes yang ada di desa	Saat Pengumpulan Data
	4	Nama Direktur BUMDes	Nama Direktur BUMDes	Mendeskripsikan nama direktur BUMDes yang ada di desa	Saat Pengumpulan Data

	5	Info Kontak	Info Kontak	Mendeskripsikan info kontak BUMDes yang dapat dihubungi oleh umum	Saat Pengumpulan Data
	6	Unit Usaha BUMDes	Unit Usaha BUMDes	Mendeskripsikan unit-unit usaha apa saja yang dikerjakan oleh BUMDes tersebut	Saat Pengumpulan Data
	7	Status Klasifikasi BUMDes	Status Klasifikasi BUMDes	Mendeskripsikan status klasifikasi BUMDes yang ada di desa, contoh : dasar, tumbuh, berkembang, maju.	Saat Pengumpulan Data
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Mengisi Kuesioner Sendiri		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Lainnya : Badan Usaha Milik Desa		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Supervisi		
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak		
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara		
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Sma Atau Smk		
6,6	Jumlah Petugas				
	Supervisor/penyelia/pengawas		2		
	Pengumpul data/enumerator		3		
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Tidak		
VII. Pengolahan dan Analisis					
7,1	Tahapan Pengolahan Data				

	Penyuntingan(Editing)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: BUMDes	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	30 Desember 2023	
	Digital(Softcopy)	30 Desember 2023	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakases umum?
1	Status Klasifikasi BUMDes	-	Mendeskrripsikan status klasifikasi BUMDes yang ada di desa, contoh : dasar, tumbuh, berkembang, maju.	Status Klasifikasi BUMDes	Permendes No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUMDes	Saat Pengumpulan Data			Char		Isian tidak boleh kosong	Status Klasifikasi BUMDes	Tidak
2	Nama Direktur BUMDes	-	Mendeskrripsikan nama direktur BUMDes yang ada di desa	Nama Direktur BUMDes	-	Saat Pengumpulan Data			Char		Isian tidak boleh kosong	Nama Direktur BUMDes	Tidak
3	Perdes BUMDes	-	Mendeskrripsikan Perdes BUMDes yang ada di desa	Perdes BUMDes	-	Saat Pengumpulan Data			Char		Isian tidak boleh kosong	Perdes BUMDes	Tidak
4	Nama BUMDes	-	Mendeskrripsikan nama bumdes yang ada di desa	Nama BUMDes	-	Saat Pengumpulan Data			Char		Isian tidak boleh kosong	Nama BUMDes	Tidak
5	Info Kontak	-	Mendeskrripsikan info kontak BUMDes yang dapat dihubungi oleh umum	Info Kontak	-	Saat Pengumpulan Data			INTEGER		Isian tidak boleh kosong	Info Kontak	Tidak
6	Alamat BUMDes	-	Mendeskrripsikan alamat BUMDes yang ada di desa	Alamat BUMDes	-	Saat Pengumpulan Data			Char		Isian tidak boleh kosong	Alamat BUMDes	Tidak
7	Unit Usaha BUMDes	-	Mendeskrripsikan unit-unit usaha apa saja yang dikerjakan oleh BUMDes tersebut	Unit Usaha BUMDes	-	Saat Pengumpulan Data			Char		Isian tidak boleh kosong	Unit Usaha BUMDes	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Jumlah BUMDes	BUMDES dan BUMDESMA	Banyaknya BUMDes di setiap desa di wilayah Kabupaten Semarang	Semakin besar nilainya artinya semakin banyak BUMDes di wilayah Kabupaten Semarang	Penjumlahan	Jumlah	Unit	Jumlah BUMDes menurut status klasifikasi: Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju.	Kabupaten Semarang

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Survei Perikanan Tangkap Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Survei	
Sektor Kegiatan		Pertanian Dan Perikanan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Pertanian,perikanan, Dan Pangan Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Letjend Suprpto No. 9 Ungaran	
1,3	Telepon	(024) 6921811	
1,4	Faksimile	(024) 6924728	
1,5	Email	Distaningan@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Dan Pangan	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bidang Perikanan	
	Alamat	Jl. Letjend Suprpto No. 9 Ungaran	
	Telepon	(024) 6921811	
	Faksimile	Distaningan@gmail.com	
	Email	(024) 6924728	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Kabupaten Semarang Mempunyai Danau Rawa Pening Sehingga Meningkatkan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap Darat. Dengan Adanya Potensi Tersebut Sehingga Diharapkan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan	

		Nelayan/ Pembudidaya Ikan Dan Pengusaha Perikanan Mejnadi Lebih Maju Dan Sejahtera. Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Kabupaten Semarang Perlu Dikelola Dengan Baik Sehingga Kondisi Sumberdaya Dapat Terjamin Dan Manfaat Yang Diperoleh Dapat Berlangsung Secara Berkesinambungan.			
3,2	Tujuan Kegiatan	Dapat Mengetahui, Memantau Dan Mengevaluasi Volume Produksi Ikan Hasil Tangkap Menurut Beberapa Katagori, Misalnya Menurut Jenis Ikan, Jenis Alat Tangkap, Jenis Perahu, Dll			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 30 Desember 2022		
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 30 Desember 2022		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	03 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	06 Februari 2023 s/d 05 Januari 2024		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 Agustus 2023 s/d 31 Januari 2024		
6	Diseminasi Hasil	01 Agustus 2023 s/d 31 Januari 2024			
7	Evaluasi	01 Agustus 2023 s/d 15 Januari 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Jenis Kapal	Kapal Penangkap Ikan	Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan atau mengawetkan ikan	Bulan Pencacahan
	2	Jenis Alat Penangkapan Ikan	Alat Penangkapan Ikan	Adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan	Bulan Pencacahan
	3	Jenis Rumah Tangga Perikanan	Rumah Tangga Perikanan	Rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung resiko).	Bulan Pencacahan
	4	Nelayan	Nelayan	Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan	Bulan Pencacahan
	5	Trip Penangkapan Ikan	Trip Penangkapan Ikan	Kegiatan operasi penangkapan ikan sejak unit penangkapan ikan meninggalkan pangkalan menuju daerah operasi, mencari daerah penangkapan ikan. melakukan penangkapan	Bulan Pencacahan

				ikan, sampai kembali lagi ke tempat pangkalan asal atau ke tempat pendaratan lain. Periodenya adalah 1 tahun kalender	
	6	Volume Produksi	Volume Produksi	Hasil Tangkapan Ikan dari keseluruhan Trip dalam Sebulan dalam bentuk ikan segar	Bulan Pencacahan
	7	Harga Ikan	Harga Ikan	harga penjualan ikan hasil tangkapan nelayan	Bulan Pencacahan
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		WawancaraPengamatan		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Lainnya : Nelayan perikanan tangkap		
V. Desain Sampel					
5,1	Jenis Rancangan Sampel		Single Stage Atau Phase		
5,2	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir		Sampel Nonprobabilitas		
5,3	Metode Sampel Probabilitas yang digunakan		Purposive Sampling		
5,4	Kerangka Sampel Tahap Terakhir		-		
5,5	Fraksi Sampel Keseluruhan		-		
5,6	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama		-		
5,7	Unit Sampel		Nelayan		
5,8	Unit Observasi		Nelayan		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		

6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Kunjungan Kembali	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	3	
	Pengumpul data/enumerator	16	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: usaha perikanan tangkap	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Lainnya: Kecamatan	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Tidak	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	04/03/2024	
	Digital(Softcopy)		
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakases umum?
1	Harga Ikan	-	harga penjualan ikan hasil tangkapan nelayan	Harga Ikan	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PERMEN-KP/2020 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bulan Pencacahan			Numerik		Harus Terisi	Harga Ikan	Tidak
2	Jenis Kapal	-	Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan atau mengawetkan ikan	Kapal Penangkap Ikan	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PERMEN-KP/2020 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bulan Pencacahan			Karakter		Harus Terisi	Jenis Kapal	Tidak
3	Nelayan	-	Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan	Nelayan	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PERMEN-KP/2020 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bulan Pencacahan			Karakter		Harus Terisi	Jenis Nelayan	Tidak
4	Trip Penangkapan Ikan	-	Kegiatan operasi penangkapan ikan sejak unit penangkapan ikan meninggalkan pangkalan menuju daerah operasi, mencari daerah penangkapan ikan. melakukan penangkapan ikan, sampai kembali lagi ke tempat pangkalan asal atau ke tempat pendaratan lain. Periodenya adalah 1 tahun kalender	Trip Penangkapan Ikan	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PERMEN-KP/2020 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bulan Pencacahan			Numerik		Harus Terisi	Trip Penangkapan Ikan	Tidak
5	Volume Produksi	-	Hasil Tangkapan Ikan dari keseluruhan Trip dalam Sebulan dalam bentuk ikan segar	Volume Produksi	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PERMEN-KP/2020 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bulan Pencacahan			Numerik		Harus Terisi	Volume Produksi	Tidak
6	Jenis Rumah Tangga Perikanan	-	Rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung resiko).	Rumah Tangga Perikanan	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PERMEN-KP/2020 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bulan Pencacahan			Karakter		Harus Terisi	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Tidak
7	Jenis Alat Penangkapan Ikan	-	Adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan	Alat Penangkapan Ikan	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PERMEN-KP/2020 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bulan Pencacahan			Karakter		Harus Terisi	Jenis Alat Penangkapan Ikan	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakases umum?
1	Jumlah Volume Produksi	Hasil Tangkapan Ikan dari keseluruhan Trip dalam Sebulan dalam bentuk ikan segar	Volume Produksi	Semakin besar nilai jumlah maka semakin besar jumlah produksi	Penjumlahan	-	Ton	Jenis Perairan Umum Daratan	Tidak	Nama	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil		
												Volume Produksi	Pengumpulan Data Statistik Perikanan Tangkap di Kabupaten Semarang	Kecamatan	Tidak

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan	Survei Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	
Tahun	2023	
Jenis Statistik	Statistik Sektor	
Cara Pengumpulan Data	Survei	
Sektor Kegiatan	Lingkungan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?	Tidak	
Identitas Rekomendasi:	-	
I. Penyelenggara		
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
1,2	Alamat	Jl. Candirejo No.2 Kompleks Perkantoran Candiasri Ungaran Barat 50513
1,3	Telepon	(024) 6925605
1,4	Faksimile	-
1,5	Email	Dlhkabsemarang@gmail.com
II. Penanggung Jawab		
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab	
	Eselon 1	-
	Eselon 2	Kepala Dinas Lingkungn Hidup Kabupaten Semarang
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)	
	Nama	-
	Jabatan	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Alamat	Jl. Candirejo No.2 Kompleks Perkantoran Candiasri Ungaran Barat 50513
	Telepon	(024) 6925605
	Faksimile	Dlhkabsemarang@gmail.com
	Email	-
III. Perencanaan dan Persiapan		

3,1	Latar Belakang		Permasalahan Lingkungan Di Daerah Kabupaten Semarang Perlahan Menunjukkan Gejala Yang Signifikan Baik Pada Unsur Kualitas Air, Udara Maupun Tutupan Vegetasi. Peningkatan Pertumbuhan Penduduk Yang Diakibatkan Pesatnya Industrialisasi Pada Sebagian Wilayah Kabupaten Semarang Berdampak Buruk Bagi Ekologi Jika Rencana Strategi Preventif Dalam Pengelolaan Tata Guna Lahan Tidak Bersifat Ecodevelopment. Aktifitas Pertanian Dan Peternakan Pun Memiliki Andil Cukup Besar Dalam Meningkatkan Kadar Kimia Bersifat Buruk Yang Dapat Merusak Ekosistem Sungai. Maka Perlu Dilakukannya Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Agar Pembangunan Yang Sedang Tumbuh Di Kabupaten Semarang Dapat Terkontrol Dan Tetap Menjaga Keseimbangan Ekologi.		
3,2	Tujuan Kegiatan		1. Memberikan Informasi Kepada Para Pengambil Keputusan Terutama Di Tingkat Pemerintah Kabupaten Semarang Tentang Kondisi Lingkungan Di Kabupaten Semarang Sebagai Bahan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. 2. Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kepada Publik Tentang Pencapaian Target Program-program Pemerintah Kabupaten Semarang Di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Sebagai Instrumen Keberhasilan Pemerintah Dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup.		
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 November 2022 s/d 31 Desember 2022		
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 31 Januari 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	01 Februari 2023 s/d 30 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	03 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024		
6	Diseminasi Hasil	01 Februari 2024 s/d 15 Februari 2024			
7	Evaluasi	08 Februari 2024 s/d 28 Februari 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)

1	Puissance negative de H (pH)	derajat yang menyatakan keasaman dan kebasaan perairan yang merupakan negatif dari logaritma konsentrasi ion hidrogen (H ⁺). pH merupakan tolak ukur mutu air yang banyak mempengaruhi nilai pemanfaatan air (Mahida, 1984). Perairan yang mempunyai pH antara 6,5-8,5 adalah perairan yang produktif dan ideal bagi kehidupan organisme akuatik.	derajat yang menyatakan keasaman dan kebasaan perairan yang merupakan negatif dari logaritma konsentrasi ion hidrogen (H ⁺). pH merupakan tolak ukur mutu air yang banyak mempengaruhi nilai pemanfaatan air (Mahida, 1984). Perairan yang mempunyai pH antara 6,5-8,5 adalah perairan yang produktif dan ideal bagi kehidupan organisme akuatik.	saat observasi pengambilan sampel
2	Total Suspended Solid (TSS)	bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1 µm) yang tertahan pada saringan Millipore dengan diameter pori 0,45 µm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Padatan tersuspensi dikategorikan dalam padatan sulit mengendap, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengendapan gravitasi konvensional (Suprihatin dan Suparno 2013).	bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1 µm) yang tertahan pada saringan Millipore dengan diameter pori 0,45 µm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Padatan tersuspensi dikategorikan dalam padatan sulit mengendap, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengendapan gravitasi konvensional (Suprihatin dan Suparno 2013).	saat observasi pengambilan sampel
3	Total Dissolved Solid (TDS)	terlarutnya zat padat, baik berupa ion, berupa senyawa, koloid di dalam air.	Residu dianggap sebagai kandungan total bahan terlarut dan tersuspensi dalam air. Selama penentuan residu ini, sebagian besar bikarbonat yang merupakan ion utama di perairan telah mengalami transformasi menjadi karbondioksida, sehingga karbondioksida dan gas-gas lain yang menghilang pada saat pemanasan tidak tercakup dalam nilai padatan total.	saat observasi pengambilan sampel
4	Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen, DO)	oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. yakni untuk membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara alami maupun dengan perlakuan aerobik untuk memurnikan air buangan industri dan rumah tangga.	oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. yakni untuk membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara alami maupun dengan perlakuan aerobik untuk memurnikan air buangan industri dan rumah tangga.	saat observasi pengambilan sampel

5	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	merupakan variabel yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air.	(1) BOD merupakan banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam lingkungan air untuk memecah (mendegradasi) bahan buangan organik yang ada dalam air menjadi karbondioksida dan air. (2) BOD menunjukan jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh proses respirasi mikroba aerob yang terdapat dalam botol BOD yang diinkubasi selama 5 hari pada suhu 20°C dalam keadaan tanpa cahaya.	saat observasi pengambilan sampel
6	Chemical Oxygen Demand (COD)	merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui zat organik dan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi materi organik dan oksidasi secara kimia. Nilai COD dalam air limbah biasanya lebih tinggi dari nilai BOD karena lebih banyak senyawa yang dapat dioksidasi biologi. Semakin tinggi nilai COD dalam air limbah mengindikasikan bahwa derajat pencemaran pada suatu perairan semakin tinggi (Suharto, 2011)	merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui zat organik dan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi materi organik dan oksidasi secara kimia. Nilai COD dalam air limbah biasanya lebih tinggi dari nilai BOD karena lebih banyak senyawa yang dapat dioksidasi biologi. Semakin tinggi nilai COD dalam air limbah mengindikasikan bahwa derajat pencemaran pada suatu perairan semakin tinggi (Suharto, 2011)	saat observasi pengambilan sampel
7	Total Fosfat	Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat-organik. am air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat-organik. Ortofosfat adalah senyawa monomer seperti $H_2PO_4-HPO_4^{2-}$, PO_4^{3-} , sedangkan polifosfat merupakan senyawa polimer seperti $(PO_3)_6^{3-}$, $P_2O_7^{4-}$ fosfat organik adalah P yang terikat dengan senyawa organik sehingga tidak berada dalam larutan secara terlepas. Dalam air limbah, senyawa fosfat dapat berasal dari limbah penduduk, industri dan pertanian. Fosfat organik terdapat dalam air buangan penduduk (tinja) dan sisa makanan.	Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat-organik. am air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat-organik. Ortofosfat adalah senyawa monomer seperti $H_2PO_4-HPO_4^{2-}$, PO_4^{3-} , sedangkan polifosfat merupakan senyawa polimer seperti $(PO_3)_6^{3-}$, $P_2O_7^{4-}$ fosfat organik adalah P yang terikat dengan senyawa organik sehingga tidak berada dalam larutan secara terlepas. Dalam air limbah, senyawa fosfat dapat berasal dari limbah penduduk, industri dan pertanian. Fosfat organik terdapat dalam air buangan penduduk (tinja) dan sisa makanan.	saat observasi pengambilan sampel

8	Ammonia	Kadar amonia yang tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah domestik, industri, dan limpasan pupuk pertanian. Kandungan amonia ada dalam jumlah yang relatif kecil jika di dalam perairan kandungan oksigen terlalu tinggi.	Kadar amonia yang tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah domestik, industri, dan limpasan pupuk pertanian. Kandungan amonia ada dalam jumlah yang relatif kecil jika di dalam perairan kandungan oksigen terlalu tinggi.	saat observasi pengambilan sampel
9	Fecal Coli	Keberadaan E. Coli di perairan secara berlimpah menggambarkan bahwa perairan tersebut tercemar oleh kotoran manusia, yang mungkin disertai dengan cemaran bakteri patogen. Coliform fecal adalah bakteri yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas, jenis Coliform fecal yaitu Escherichia coli.	Keberadaan E. Coli di perairan secara berlimpah menggambarkan bahwa perairan tersebut tercemar oleh kotoran manusia, yang mungkin disertai dengan cemaran bakteri patogen. Coliform fecal adalah bakteri yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas, jenis Coliform fecal yaitu Escherichia coli.	saat observasi pengambilan sampel
10	Total Coliform	kumpulan mikroorganisme relatif tidak berbahaya yang hidup dalam jumlah besar di tanah, tanaman dan di usus berdarah panas (manusia) dan hewan berdarah dingin.	kumpulan mikroorganisme relatif tidak berbahaya yang hidup dalam jumlah besar di tanah, tanaman dan di usus berdarah panas (manusia) dan hewan berdarah dingin.	saat observasi pengambilan sampel
11	Sulfur Dioksida (SO ₂)	SO ₂ mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Gas SO ₂ hasil dari proses pembakaran bahan bakar fosil (batubara) yang jumlahnya terlalu banyak, sehingga kondisi alamiah lingkungan alam pun tidak dapat me-recycle-nya kembali ke alam sekitar.	SO ₂ mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Gas SO ₂ hasil dari proses pembakaran bahan bakar fosil (batubara) yang jumlahnya terlalu banyak, sehingga kondisi alamiah lingkungan alam pun tidak dapat me-recycle-nya kembali ke alam sekitar.	saat observasi pengambilan sampel
12	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Nitrogen oksida (NO _x) menjadi salah satu polutan dengan jumlah besar yang dihasilkan oleh boiler. Emisi NO _x yang dihasilkan oleh boiler tersusun atas 90-95% NO dan sisanya adalah NO ₂ . Namun setelah kombinasi NO _x tersebut keluar dari cerobong asap boiler, NO akan teroksidasi lebih lanjut menjadi NO ₂ . NO ₂ inilah yang biasanya tampak sebagai asap yang keluar dari cerobong asap boiler tersebut.	Nitrogen oksida (NO _x) menjadi salah satu polutan dengan jumlah besar yang dihasilkan oleh boiler. Emisi NO _x yang dihasilkan oleh boiler tersusun atas 90-95% NO dan sisanya adalah NO ₂ . Namun setelah kombinasi NO _x tersebut keluar dari cerobong asap boiler, NO akan teroksidasi lebih lanjut menjadi NO ₂ . NO ₂ inilah yang biasanya tampak sebagai asap yang keluar dari cerobong asap boiler tersebut.	saat observasi pengambilan sampel

	13	Khlorin Bebas	Klorin yang tersedia untuk menonaktifkan organisme penyebab penyakit, dan dengan demikian merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan kelayakan air	Klorin yang tersedia untuk menonaktifkan organisme penyebab penyakit, dan dengan demikian merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan kelayakan air	saat observasi pengambilan sample
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengamatan		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Lainnya : Sungai, transportasi, pemukiman, perkantoran, industri dan lahan		
V. Desain Sampel					
5,1	Jenis Rancangan Sampel		Single Stage Atau Phase		
5,2	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir		Sampel Nonprobabilitas		
5,3	Metode Sampel Probabilitas yang digunakan		Quota Sampling		
5,4	Kerangka Sampel Tahap Terakhir		-		
5,5	Fraksi Sampel Keseluruhan		-		
5,6	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama		-		
5,7	Unit Sampel		Sungai, Udara Dan Lingkungan Di Kabupaten Semarang		
5,8	Unit Observasi		17 Sungai; 15 Titik Lingkungan Pemukiman, Kantor Dan Industri; Kerapatan Vegetasi Dengan Citra Landsat		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		

6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Supervisi	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma I Atau Ii Atau Iii	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	1	
	Pengumpul data/enumerator	8	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editoring)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: lingkungan hidup	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	02/03/2024	
	Digital(Softcopy)	15/02/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABLE

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Puissance negative de H (pH)	-	derajat yang menyatakan keasaman dan kebasaan perairan yang merupakan negatif dari logaritma konsentrasi ion hidrogen (H+), pH merupakan tolak ukur mutu air yang banyak mempengaruhi nilai pemanfaatan air (Mahida, 1984). Perairan yang mempunyai pH antara 6,5-8,5 adalah perairan yang produktif dan ideal bagi kehidupan organisme akuatik.	derajat yang menyatakan keasaman dan kebasaan perairan yang merupakan negatif dari logaritma konsentrasi ion hidrogen (H+), pH merupakan tolak ukur mutu air yang banyak mempengaruhi nilai pemanfaatan air (Mahida, 1984). Perairan yang mempunyai pH antara 6,5-8,5 adalah perairan yang produktif dan ideal bagi kehidupan organisme akuatik.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	saat observasi pengambilan sampel			Float		Isian harus isi	Nilai pH	Tidak
2	Fecal Coli	-	Keberadaan E. Coli di perairan secara berlimpah menggambarkan bahwa perairan tersebut tercemar oleh kotoran manusia, yang mungkin disertai dengan cemaran bakteri patogen. Coliform fecal adalah bakteri yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas, jenis Coliform fecal yaitu Escherichia coli.	Keberadaan E. Coli di perairan secara berlimpah menggambarkan bahwa perairan tersebut tercemar oleh kotoran manusia, yang mungkin disertai dengan cemaran bakteri patogen. Coliform fecal adalah bakteri yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas, jenis Coliform fecal yaitu Escherichia coli.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	Fecal coli	Tidak
3	Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen, DO)	-	oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik, yakni untuk membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara alami maupun dengan perlakuan aerobik untuk memurnikan air buangan industri dan rumah tangga.	oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik, yakni untuk membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara alami maupun dengan perlakuan aerobik untuk memurnikan air buangan industri dan rumah tangga.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	DO	Tidak
4	Sulfur Dioksida (SO2)	-	SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Gas SO2 hasil dari proses pembakaran bahan bakar fosil (batubara) yang jumlahnya terlalu banyak, sehingga kondisi alamiah lingkungan alam pun tidak dapat me-recycle-nya kembali ke alam sekitar.	SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Gas SO2 hasil dari proses pembakaran bahan bakar fosil (batubara) yang jumlahnya terlalu banyak, sehingga kondisi alamiah lingkungan alam pun tidak dapat me-recycle-nya kembali ke alam sekitar.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	SO2	Tidak
5	Total Fosfat	-	Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat-organik, am air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat-organik. Ortofosfat adalah senyawa monomer seperti H3PO4-HPO42-, PO43-, sedangkan polifosfat merupakan senyawa polimer seperti (PO3)63-, P2O74- fosfat organik adalah P yang terikat dengan senyawa organik sehingga tidak berada dalam larutan secara terlepas. Dalam air limbah, senyawa fosfat dapat berasal dari limbah penduduk, industri dan pertanian. Fosfat organik terdapat dalam air buangan penduduk (tinja) dan sisa makanan.	Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat-organik, am air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat-organik. Ortofosfat adalah senyawa monomer seperti H3PO4-HPO42-, PO43-, sedangkan polifosfat merupakan senyawa polimer seperti (PO3)63-, P2O74- fosfat organik adalah P yang terikat dengan senyawa organik sehingga tidak berada dalam larutan secara terlepas. Dalam air limbah, senyawa fosfat dapat berasal dari limbah penduduk, industri dan pertanian. Fosfat organik terdapat dalam air buangan penduduk (tinja) dan sisa makanan.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	Total Fosfat	Tidak
6	Total Suspended Solid (TSS)	-	bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1 µm) yang tertahan pada saringan Millipore dengan diameter pori 0,45 µm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Padatan tersuspensi dikategorikan dalam padatan sulit mengendap, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengendapan gravitasi konvensional (Suprihatin dan Suparno 2013).	bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1 µm) yang tertahan pada saringan Millipore dengan diameter pori 0,45 µm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Padatan tersuspensi dikategorikan dalam padatan sulit mengendap, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengendapan gravitasi konvensional (Suprihatin dan Suparno 2013).	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	TSS	Tidak
7	Total Coliform	-	kumpulan mikroorganisme relatif tidak berbahaya yang hidup dalam jumlah besar di tanah, tanaman dan di usus berdarah panas (manusia) dan hewan berdarah dingin.	kumpulan mikroorganisme relatif tidak berbahaya yang hidup dalam jumlah besar di tanah, tanaman dan di usus berdarah panas (manusia) dan hewan berdarah dingin.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	Total Coliform	Tidak
8	Klorin Bebas	Cl	Klorin yang tersedia untuk menonaktifkan organisme penyebab penyakit, dan dengan demikian merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan kelayakan air	Klorin yang tersedia untuk menonaktifkan organisme penyebab penyakit, dan dengan demikian merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan kelayakan air	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara	saat observasi pengambilan sampel	-	-	float	- = -	isian harus isi	klorin bebas	Tidak
9	Total Dissolved Solid (TDS)	-	Residu dianggap sebagai kandungan total bahan terlarut dan tersuspensi dalam air. Selama penentuan residu ini, sebagian besar bikarbonat yang merupakan ion utama di perairan telah mengalami transformasi menjadi karbonat, sehingga karbonat dioksida dan gas-gas lain yang menghang pada saat pemanasan tidak tercampur dalam nilai padatan total.	terlarutnya zat padat, baik berupa ion, berupa senyawa, koloid di dalam air.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	TDS	Tidak
10	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	-	(1) BOD merupakan banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam lingkungan air untuk memecah (mendegradasi) bahan buangan organik yang ada dalam air menjadi karbon dioksida dan air. (2) BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh proses respirasi mikroba aerob yang terdapat dalam botol BOD yang diinkubasi selama 5 hari pada suhu 20°C dalam keadaan tanpa cahaya.	merupakan variabel yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	BOD	Tidak
11	Nitrogen Dioksida (NO2)	-	Nitrogen oksida (NOx) menjadi salah satu polutan dengan jumlah besar yang dihasilkan oleh boiler. Emisi NOx yang dihasilkan oleh boiler tersusun atas 90-95% NO dan sisanya adalah NO2. Namun setelah kombinasi NOx tersebut keluar dari cerobong asap boiler, NO akan teroksidasi lebih lanjut menjadi NO2. NO2 inilah yang biasanya tampak sebagai asap yang keluar dari cerobong asap boiler tersebut.	Nitrogen oksida (NOx) menjadi salah satu polutan dengan jumlah besar yang dihasilkan oleh boiler. Emisi NOx yang dihasilkan oleh boiler tersusun atas 90-95% NO dan sisanya adalah NO2. Namun setelah kombinasi NOx tersebut keluar dari cerobong asap boiler, NO akan teroksidasi lebih lanjut menjadi NO2. NO2 inilah yang biasanya tampak sebagai asap yang keluar dari cerobong asap boiler tersebut.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	NO2	Tidak
12	Ammonia	-	Kadar amonia yang tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah domestik, industri, dan limbah pupuk pertanian. Kandungan amonia ada dalam jumlah yang relatif kecil jika di dalam perairan kandungan oksigen terlarut tinggi.	Kadar amonia yang tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah domestik, industri, dan limbah pupuk pertanian. Kandungan amonia ada dalam jumlah yang relatif kecil jika di dalam perairan kandungan oksigen terlarut tinggi.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	Ammonia	Tidak
13	Chemical Oxygen Demand (COD)	-	merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui zat organik dan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi materi organik dan oksidasi secara kimia. Nilai COD dalam air limbah biasanya lebih tinggi dari nilai BOD karena lebih banyak senyawa yang dapat dioksidasi biologi. Semakin tinggi nilai COD dalam air limbah mengindikasikan bahwa derajat pencemaran pada suatu perairan semakin tinggi (Suharto, 2011)	merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui zat organik dan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi materi organik dan oksidasi secara kimia. Nilai COD dalam air limbah biasanya lebih tinggi dari nilai BOD karena lebih banyak senyawa yang dapat dioksidasi biologi. Semakin tinggi nilai COD dalam air limbah mengindikasikan bahwa derajat pencemaran pada suatu perairan semakin tinggi (Suharto, 2011)	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	saat observasi pengambilan sampel			Float		isian harus isi	COD	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunannya	Publikasi Keberadaannya	Variabel Pembangunannya	Register Penghasil	Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
1	Indeks Kualitas udara	Ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara di suatu daerah dengan parameter perhitungan indeks kualitas udara yaitu NO2 dan SO2	Kualitas Udara	Indeks kualitas udara didapatkan dari hasil pengambilan data dengan metode passive sampler yang dilakukan dua kali dalam setahun. Pengukuran udara ambient dilakukan di 12 titik yaitu transportasi, industri, pemukiman dan perkotaan dengan menggunakan parameter AQI dan NO2. Pada Tahun 2020 di Kabupaten Semarang dihasilkan Indeks Kualitas Udara sebesar 78,68 dan masuk kategori baik.	Passive Sampler	Indeks	-	-	Tidak	Nama Indeks kualitas udara	Publikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	Kabupaten	Ya	Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Merupakan indeks "Vegetasi" yaitu aktivitas fotosintesis vegetasi, didasarkan pada pengamatan bahwa permukaan yang berbeda beda memfiksikan berbagai jenis gelombang cahaya yang berbeda beda. Vegetasi yang aktif melakukan fotosintesis akan menyerap sebagian besar gelombang merah sinar matahari dan memantulkannya gelombang inframerah dekat lebih tinggi. Vegetasi yang sudah mati atau stress (bungus) lebih banyak memantulkan gelombang merah dan lebih sedikit pada gelombang inframerah dekat.	Kualitas Tutupan Lahan	kegiatan vegetasi dengan citra satelit kemudian di proses dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan software ArcGIS 10.3	Luas tutupan / Luas administrasi	Indeks	-	-	Tidak	Nama Indeks kualitas tutupan lahan	Publikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	Kabupaten	Ya	Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH sebagai indikator pengendalian lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	IKLH	-	1. Kabupaten IKLH1 = (37,0% x IKAN) + (40,5% x IKU) + (12,9% x IKL) 2. Provinsi IKLH1 = (34,0% x IKAN) + (42,8% x IKU) + (13,3% x IKL) 3. Nasional IKLH1 = (34,0% x IKAN) + (42,8% x IKU) + (13,3% x IKL) + (9,9% x IKAL)	Indeks	-	Kategori nilai IKLH : 1. Skor 90 -100 : kriteria Sangat Baik 2. Skor 70 -89 : Kriteria Baik 3. Skor 50-69 : Kriteria Sedang 4. Skor 25 -49 : Kriteria Buruk 5. Skor 0 -24 : kriteria Sangat Buruk	Ya	Indeks Kualitas air, Indeks Kualitas udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKLH 2021	Kabupaten	Ya	Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
4	Indeks Kualitas air	Metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan 10 parameter, yaitu DO, Fecal Coliform, COD, pH, BOD, NH3-N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS dengan perhitungan berdasarkan bobot dan transformasi nilai ke indeks parameter kualitas air yang ditetapkan dalam metode Indeks Kualitas Air modifikasi Indonesia.	Kualitas Air	KA Kabupaten Semarang sebesar 53,33. Hasil perhitungan KA didapatkan dari rata-rata KA pada musim kemarau dan penghujan dengan menggunakan 24 titik pada 6 sampel sungai. Kualitas air tersebut bernilai sangat kurang	Pengambilan air di 24 titik pada 6 sampel sungai kemudian di tes menggunakan alat di Laboratorium	Indeks	-	-	Tidak	Nama Indeks kualitas air	Publikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	Kabupaten	Ya	Estimasi	Apakah dapat diakses umum?

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan			Kompilasi Data Pasangan Usia Subur (pus) Yang Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern Di Kabupaten Semarang									
Tahun			2024									
No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi			
1	Jenis Statistik	2	Statistik Sektoral	5	6	7	8	9	10			
Cara Pengumpulan Data			Kompilasi Produk Administrasi									
Sektor Kegiatan			Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah	Keseluruhan pasangan usia subur berumur 15-49 tahun atau pasangan suami istri berumur kurang dari 15 tahun dan suami atau istri berumur 15 tahun tetapi masih haid (datang bulan)	-	penjumlahan	jumlah	pasangan	-	Kabupaten/kecamatan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?			Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah	Keseluruhan pasangan usia subur yang sedang menggunakan alat kontrasepsi modern	-	penjumlahan	jumlah	pasangan	-	Kabupaten/kecamatan	
Identitas Rekomendasi:			Jumlah Peserta KB baru menurut alat kontrasepsi	Jumlah pengguna baru alat kontrasepsi IUD, MO, kondom, implan, suntik, pil	Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi modern atau mengganti alat kontrasepsi modern atau K-24.3322.001	-	penjumlahan	Jumlah	pasangan	-	Kabupaten	
I. Penyelenggara												
1,1	Instansi Penyelenggara		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kab. Semarang									
1,2	Alamat		Jl. Ki Saron Mangun Pranoto No. 55 Ungaran									
1,3	Telepon		246923366									
1,4	Faksimile		-									
1,5	Email		Dp3akbkabsemarang@gmail.com									
II. Penanggung Jawab												
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab											
	Eselon 1		-									
	Eselon 2		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang									
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)											
	Nama		Ra. Nathalia Damayanti, Se., Mm									
	Jabatan		Kepala Bidang Keluarga Berencana									
	Alamat		Jl. Ki Saron Mangun Pranoto No. 55 Ungaran									
	Telepon		246923366									
	Faksimile		Dp3akbkabsemarang@gmail.com									
	Email		-									
III. Perencanaan dan Persiapan												
3,1	Latar Belakang		Mewujudkan Keluarga Bahagia Dengan Melakukan Pengaturan Jarak Kelahiran Ideal, Diperlukan Adanya Data Pasangan Usia Subur Beserta Alat Kontrasepsi Yang Digunakan									

3,2	Tujuan Kegiatan		Mengatur Usia Ideal Ibu Melahirkan Dan Mengatur Jarak Kelahiran Anak			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan					
	A. Perencanaan					
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023			
	2	Desain	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023			
	B. Pengumpulan					
	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023			
	C. Pemeriksaan					
	4	Pengolahan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023			
	D. Penyebarluasan					
	5	Analisis Data	01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023			
6	Diseminasi Hasil	01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023				
7	Evaluasi	01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023				
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:					
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)	
	1	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah	Pasangan laki-laki perempuan yang istrinya berumur 15-49 tahun atau pasangan suami istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur 15 tahun tetapi masih haid (datang bulan)	bulanan	
	2	Peserta KB aktif menurut alat kontrasepsi	alat kontrasepsi IUD, MO, kondom, implan, suntik, pil	pasangan usia subur yang sedang menggunakan alat kontrasepsi modern	bulanan	
	3	Peserta KB baru menurut alat kontrasepsi	alat kontrasepsi IUD, MO, kondom, implan, suntik, pil	pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi modern atau pasca melahirkan menggunakan alat kontrasepsi	bulanan	
IV. Desain Kegiatan						
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang			
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Bulanan			
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Cross Sectional			
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia			

4,5	Wilayah Kegiatan		
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
4,8	Unit Pengumpulan Data		Rumah Tangga
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Supervisi
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Diploma I Atau Ii Atau Iii
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	1	
	Pengumpul data/enumerator	1	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Ya
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editoring)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis		Deskriptif
7,3	Unit Analisis		Rumah Tangga
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis		Kabupaten/KotaKecamatan
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	

8,2	Digital(Softcopy)	Tidak	
	Data Mikro	Tidak	
	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)		
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Peserta KB baru menurut alat kontrasepsi	-	pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi modern atau pasca melahirkan menggunakan alat kontrasepsi	alat kontrasepsi IUD, MO, kondom, implan, suntik, pil	-	bulanan			numerik		melihat data pencapaian bulan sebelumnya dan data peserta baru bulan yang bersangkutan	-	Tidak
2	Pasangan Usia Subur (PUS)	PUS	Pasangan laki-laki perempuan yang istrinya berumur 15-49 tahun atau pasangan suami istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur 15 tahun tetapi masih haid (datang bulan)	Pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah	-	bulanan			numerik		melihat data pencapaian bulan sebelumnya dan data peserta baru bulan yang bersangkutan	-	Tidak
3	Peserta KB aktif menurut alat kontrasepsi	-	pasangan usia subur yang sedang menggunakan alat kontrasepsi modern	alat kontrasepsi IUD, MO, kondom, implan, suntik, pil	-	bulanan			numerik		melihat data pencapaian bulan sebelumnya dan data peserta baru bulan yang bersangkutan	-	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan Nama Publikasi Ketersediaan	Variabel Pembangunan Nama	Kegiatan Penghasil	Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
1	Jumlah Peserta KB baru menurut alat kontrasepsi	pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi modern atau pasca melahirkan menggunakan alat kontrasepsi	Jumlah pengguna baru alat kontrasepsi IUD, MO, kondom, implan, suntik, pil	-	penjumlahan	Jumlah	pasangan	-	Tidak		Peserta KB baru menurut alat kontrasepsi	Kompilasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi modern	Kabupaten	Ya
2	Jumlah Peserta KB aktif menurut alat kontrasepsi	Jumlah pasangan usia subur yang sedang menggunakan alat kontrasepsi modern	Jumlah pengguna alat kontrasepsi IUD, MO, kondom, implan, suntik, pil	-	penjumlahan	Jumlah	pasangan	-	Tidak		Peserta KB aktif menurut alat kontrasepsi	Kompilasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi modern	Kabupaten/kecamatan	Tidak
3	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Pasangan laki-laki perempuan yang istrinya berumur 15-49 tahun atau pasangan suami istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur 15 tahun tetapi masih haid (datang bulan)	Jumlah Pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah	-	penjumlahan	Jumlah	pasangan	-	Tidak		Pasangan Usia Subur (PUS)	Kompilasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi modern	Kabupaten/kecamatan	Tidak

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektor	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Sektor Publik Perpajakan Dan Regulasi Pasar	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya	
Identitas Rekomendasi:		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Semarang	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Gatot Subroto No. 104 A	
1,3	Telepon	024 6926908	
1,4	Faksimile	024 6926911	
1,5	Email	Dpmptspkabsemarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	Kementrian Investasi / Bkpm	
	Eselon 2	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Sekretaris Dpmptsp Kabupaten Semarang	
	Alamat	Jl. Gatot Subroto No. 104 A	
	Telepon	024 6926908	
	Faksimile	Dpmptspkabsemarang@gmail.com	
	Email	024 6926911	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dilakukan Untuk Meningkatkan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha.daerah Diharapkan Mampu Menyelenggarakan Manajemen Perizinan Berusaha Secara Cepat, Mudah, Terintegrasi, Transparan, Efisien, Efektif, Dan Akuntabel Yang Pada Gilirannya Memberikan Kepastian Hukum, Meningkatkan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha Serta Menjaga Keberlangsungan Kinerja Pelayanan Perizinan	

		Berusaha. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Kepala Daerah Diamanatkan Untuk Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah Secara Berkala Setiap 3 (tiga) Bulan.			
3,2	Tujuan Kegiatan	Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Adalah: A. Sebagai Laporan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Tahun 2023 B. Sebagai Bahan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	02 Januari 2023 s/d 28 Februari 2023		
	2	Desain	02 Januari 2023 s/d 28 Februari 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	31 Maret 2023 s/d 31 Januari 2024		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	03 April 2023 s/d 16 Februari 2024		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	29 Februari 2024 s/d 15 Maret 2024		
6	Diseminasi Hasil	29 Februari 2024 s/d 15 Maret 2024			
7	Evaluasi	30 April 2024 s/d 31 Mei 2024			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Penanaman Modal Dalam Negeri	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan modal dalam negeri	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan modal dalam negeri	tahunan
	2	Penanaman Modal Asing	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri	tahunan

	3	Proyek	Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendapat perizinan dan/atau perizinan berusaha	Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendapat perizinan dan/atau perizinan berusaha	tahunan		
	4	Tenaga Kerja	Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun masyarakat	Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun masyarakat	tahunan		
	5	Nomor Induk Berusaha	Bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya	pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya	tahunan		
IV. Desain Kegiatan							
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang				
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan				
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Cross Sectional				
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia				
4,5	Wilayah Kegiatan						
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG				
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder				
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Computer Aided Web Interviewing (CAWI)				
4,8	Unit Pengumpulan Data		Usaha/Perusahaan				
VI. Pengumpulan Data							
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak				
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Supervisi				
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak				
6,4	Petugas Pengumpulan Data		-				
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		-				
6,6	Jumlah Petugas						

	Supervisor/penyelia/pengawas	0	
	Pengumpul data/enumerator	0	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editoring)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Tidak	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Usaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	01/04/2024	
	Digital(Softcopy)	01/03/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Penanaman Modal Dalam Negeri	PMDN	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan modal dalam negeri	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan modal dalam negeri	PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko	tahunan			integer		Isian harus terisi	Tambahan Penanaman Modal dalam Negeri	Tidak
2	Penanaman Modal Asing	PMA	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri	Perka BKPM No 6 tahun 2020 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal	tahunan			integer		Isian harus terisi	Tambahan penanaman modal	Tidak
3	Nomor Induk Berusaha	NIB	pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya	Bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya	PP No 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko	tahunan			integer		Isian harus terisi	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Tidak
4	Proyek	Proyek	Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendapat perizinan dan/atau perizinan berusaha	Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendapat perizinan dan/atau perizinan berusaha	PP No 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko	tahunan			integer		Isian harus terisi	Lokasi proyek	Tidak
5	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun masyarakat	Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun masyarakat	PP No 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko	tahunan			integer		Isian harus terisi	Tenaga kerja	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
										Nama	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	Jumlah Investasi PMDN	Investasi PMDN terdiri dari LKPM dan Non LKPM	Investasi PMDN	-	-	Jumlah	Rupiah	LKPM dan Non LKPM	Tidak			Jumlah Investasi PMDN	Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Kabupaten/kota	Tidak
2	Jumlah Proyek Investasi	Proyek investasi terdiri dari PMDN dan PMA	Proyek Investasi	-	-	Jumlah	Buah	PMDN dan PMA	Tidak			Jumlah Proyek Investasi	Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Kabupaten/kota	Tidak
3	Jumlah Investasi PMA	Investasi PMA terdiri dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Investasi PMA	-	-	Jumlah	Rupiah	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Tidak			Jumlah Investasi PMA	Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Kabupaten/kota	Tidak
4	Jumlah Serapan Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang terdiri dari TKI dan TKA	Serapan tenaga kerja	-	-	Jumlah	Orang	PMDN dan PMA	Tidak			Jumlah Serapan Tenaga Kerja	Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Kabupaten/kota	Tidak
5	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) Berdasarkan Skala Usaha	NIB terdiri dari UMK dan non UMK	Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	-	Jumlah	Nomor	UMK dan Non UMK	Tidak			Jumlah NIB Berdasarkan Skala Usaha	Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Kabupaten/kota	Tidak

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Survei	
Sektor Kegiatan		Sektor Publik Perpajakan Dan Regulasi Pasar	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Gatot Subroto No. 104 A	
1,3	Telepon	024 6926908	
1,4	Faksimile	024 6926911	
1,5	Email	Dpmptspkabsemarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	Kementrian Investasi / Bkpm	
	Eselon 2	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Sekretaris Dpmptsp Kabupaten Semarang	
	Alamat	Jl. Gatot Subroto No. 104 A	
	Telepon	024 6926908	
	Faksimile	Dpmptspkabsemarang@gmail.com	
	Email	024 6926911	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Untuk Penyajian Prosentase Kepuasan Pelanggan & Pengaduan Pemohon Semesteran	

3,2	Tujuan Kegiatan	Untuk Mengetahui Kepuasan Pelayanan Pelanggan & Rekap Pengadua Pemohon Perijinan Di Dpmptsp Kabupaten Semarang Selama Semester I				
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan					
	A. Perencanaan					
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023			
	2	Desain	01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023			
	B. Pengumpulan					
	3	Pengumpulan Data	01 Juni 2023 s/d 15 Desember 2023			
	C. Pemeriksaan					
	4	Pengolahan Data	01 Desember 2023 s/d 12 Januari 2024			
	D. Penyebarluasan					
	5	Analisis Data	02 Januari 2024 s/d 22 Januari 2024			
6	Diseminasi Hasil	23 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024				
7	Evaluasi	23 Januari 2024 s/d 16 Februari 2024				
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:					
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)	
	1	Persyaratan	Persyaratan	syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif	6 bulan	
	2	Prosedur	Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.	6 bulan	
	3	Waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian	Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan	6 bulan	
	4	Biaya	Biaya	Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.	6 bulan	
	5	Penanganan Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut	6 bulan	
IV. Desain Kegiatan						

4,1	Kegiatan ini dilakukan	Berulang	
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan	Semesteran	
4,3	Tipe Pengumpulan Data	Longitudinal Panel	
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	Sebagian Wilayah Indonesia	
4,5	Wilayah Kegiatan		
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG
4,6	Metode Pengumpulan Data	Mengisi Kuesioner Sendiri	
4,7	Sarana Pengumpulan Data	Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)	
4,8	Unit Pengumpulan Data	Usaha/Perusahaan	
V. Desain Sampel			
5,1	Jenis Rancangan Sampel	Single Stage Atau Phase	
5,2	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir	Sampel Nonprobabilitas	
5,3	Metode Sampel Probabilitas yang digunakan	Quota Sampling	
5,4	Kerangka Sampel Tahap Terakhir	-	
5,5	Fraksi Sampel Keseluruhan	-	
5,6	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama	-	
5,7	Unit Sampel	Usaha/perusahaan Pengguna Layanan Perijinan	
5,8	Unit Observasi	Usaha/perusahaan Pengguna Layanan Perijinan	
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Lainnya: tidak ada pemeriksaan	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3	

6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	1	
	Pengumpul data/enumerator	5	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Usaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	26/01/2024	
	Digital(Softcopy)	26/01/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Persyaratan	-	syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif	Prosedur	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	6 bln			char	=	Harus isi	-	Tidak
2	Biaya	-	Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.	Biaya	Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.	6 bln			char	=	Harus isi	-	Tidak
3	Prosedur	-	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.	Prosedur	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	6 bln			char	=	Harus isi	-	Tidak
4	Penanganan Pengaduan	-	Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut	Penanganan Pengaduan	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	6 bln			char	=	Harus isi	-	Tidak
5	Waktu penyelesaian	-	Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan	Waktu penyelesaian	Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan	6 bln			char	=	Harus isi	-	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan	Varabel Pembangunan	Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?	
1	Indeks Kepuasan Konsumen	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	Indeks yang didapatkan dari hasil survei kepuasan pelanggan	nilai indeks mendekati 4 termasuk kategori sangat baik dan nilai indeks mendekati 1 termasuk kategori tidak baik	rata-rata tertimbang	Indeks	-	1. Nilai indeks 25,00 – 64,99 : nilai mutu D kategori Tidak baik 2. Nilai indeks 65,00 – 76,60 : nilai mutu C kategori Kurang baik 3. Nilai indeks 76,61 – 88,30 : nilai mutu B kategori Baik 4. Nilai indeks 88,31 – 100,00 : nilai mutu A Kategori Sangat baik	Tidak	Nama Publikasi Keterseidaan	Nama Kegiatan Penghasil	nilai pelayanan Survei Kepuasan Pelanggan dan Rekap Pengaduan Pemohon	dinas/instansi	Ya

DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan	Survei Kondisi Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Semarang	
Tahun	2023	
Jenis Statistik	Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data	Survei	
Sektor Kegiatan	Transportasi	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?	Tidak	
Identitas Rekomendasi:	-	
I. Penyelenggara		
1,1	Instansi Penyelenggara	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang
1,2	Alamat	Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 3 Ungaran
1,3	Telepon	246921607
1,4	Faksimile	-
1,5	Email	Dpusemarangkabupaten@gmail.com
II. Penanggung Jawab		
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab	
	Eselon 1	-
	Eselon 2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaabupaten Semarang
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)	
	Nama	-
	Jabatan	Kepala Bidang Bina Marga
	Alamat	Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 3 Ungaran
	Telepon	246921607
	Faksimile	Dpusemarangkabupaten@gmail.com
	Email	-
III. Perencanaan dan Persiapan		
3,1	Latar Belakang	Adanya Kebutuhan Data Dalam Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Di Kab. Semarang
3,2	Tujuan Kegiatan	Mengetahui Kondisi Jalan Dan Jembatan Di Kab. Semarang

3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Juli 2023 s/d 20 Agustus 2023		
	2	Desain	05 Juli 2023 s/d 25 Agustus 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	01 September 2023 s/d 20 Oktober 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 November 2023 s/d 25 November 2023		
3,4	6	Diseminasi Hasil	01 November 2023 s/d 30 November 2023		
	7	Evaluasi	01 Januari 2024 s/d 30 Mei 2024		
	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Panjang jalan	Panjang jalan dinyatakan dalam satuan kilometer. Dalam menghitung Panjang jalan dipakai STA (Stasioning) atau patok yang dipasang di jalan atau lokasi tertentu sebagai penomoran Panjang jalan.	Panjang jalan merupakan ukuran jauh jalan yang dilakukan dengan odometer.	Saat Pencacahan
	2	Lebar Jalan	Lebar jalan dinyatakan dalam satuan kilometer.	Lebar jalan merupakan ukuran jarak antara bahu kiri jalan ke bahu kanan jalan yang diukur menggunakan meteran.	Saat Pencacahan
	3	Permukaan Perkerasan Jalan	Permukaan perkerasan jalan merupakan lapisan jalan yang paling atas.	Permukaan perkerasan jalan berfungsi untuk menahan beban roda, sebagai lapisan rapat air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan akibat cuaca, sebagai lapisan aus (wearing course).	Saat Pencacahan
	4	Kondisi Jalan	Kondisi Jalan merupakan keadaan jalan yang dapat diamati dari luas retakan di jalan, lebar retakan, jumlah lubang dan rata-rata kedalaman bekas roda yang ada di jalan.	Nilai Kondisi jalan dinyatakan dengan SDI (Surface Distress Index) yang merupakan kombinasi dari penilaian terhadap Luas Retak, lebar retak, jumlah lubang, dan rata-rata kedalaman bekas roda.	Saat Pencacahan
	5	Tipe Bangunan Jembatan	jembatan merupakan bangunan yang menghubungkan suatu jalan yang menyilang	Tipe Bangunan Jembatan dibagi berdasarkan karakteristik Struktur bangunan atas dan bawah jembatan.	Saat Pencacahan

			dengan sungai/ saluran air, lembah atau dengan jalan lain. Bangunan jembatan terdiri dari bangunan atas dan bangunan bawah jembatan.		
	6	Kondisi Jembatan	Kondisi Jembatan merupakan keadaan struktur jembatan pada saat pengamatan.	Kondisi jembatan dinilai dengan indeks NK (Nilai Kondisi), dimana NK=struktur+kerusakan+perkembangan+fungsi+pengaruh	Saat Pencacahan
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG		
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengamatan		
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)		
4,8	Unit Pengumpulan Data		Lainnya : jalan dan jembatan		
V. Desain Sampel					
5,1	Jenis Rancangan Sampel		Single Stage Atau Phase		
5,2	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir		Sampel Nonprobabilitas		
5,3	Metode Sampel Probabilitas yang digunakan		Purposive Sampling		
5,4	Kerangka Sampel Tahap Terakhir		-		
5,5	Fraksi Sampel Keseluruhan		-		
5,6	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama		-		
5,7	Unit Sampel		Jalan Dan Jembatan		
5,8	Unit Observasi		Jalan Dan Jembatan Dengan Kondisi Perlu Perbaikan		
VI. Pengumpulan Data					
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak		

6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Kunjungan KembaliSupervisiTask Force	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma I Atau Ii Atau Iii	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	6	
	Pengumpul data/enumerator	20	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Ya	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: jalan dan jembatan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)	31 Mei 2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABEL

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Panjang Jalan menurut kondisi	Merupakan klasifikasi kondisi jalan yang mencantumkan seberapa panjang jalan dengan kriteria tersebut	Kondisi jalan adalah suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam menentukan program pemeliharaan jalan. 1. Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. 2. Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan. 3. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan kurang dari 20 dari luas jalan yang ditinjau. 4. Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya, dan terkelupas yang cukup besar 20-60 dari luas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya	1. Kondisi jalan baik adalah jalan dengan nilai SDI < 50. 2. Kondisi jalan sedang adalah jalan dengan nilai SDI antara 50-100. 3. Kondisi jalan rusak ringan adalah jalan dengan nilai SDI 100-150. 4. Kondisi jalan rusak berat adalah jalan dengan nilai SDI > 150.	Luas retak+ lebar retak+ jumlah lubang+ bekas roda	Panjang	Km	Jalan: 1. Baik 2. Sedang 3. Rusak Ringan 4. Rusak Berat	Kabupaten

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
										Nama	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	Panjang Jalan menurut kondisi	Kondisi jalan adalah suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam menentukan program pemeliharaan jalan. 1. Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. 2. Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan. 3. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan kurang dari 20 dari luas jalan yang ditinjau. 4. Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya, dan terkelupas yang cukup besar 20-60 dari luas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya	Merupakan klasifikasi kondisi jalan yang mencantumkan seberapa panjang jalan dengan kriteria tersebut	1. Kondisi jalan baik adalah jalan dengan nilai SDI < 50. 2. Kondisi jalan sedang adalah jalan dengan nilai SDI antara 50-100. 3. Kondisi jalan rusak ringan adalah jalan dengan nilai SDI 100-150. 4. Kondisi jalan rusak berat adalah jalan dengan nilai SDI > 150.	Luas retak+ lebar retak+ jumlah lubang+ bekas roda	Panjang	Km	Jalan: 1. Baik 2. Sedang 3. Rusak Ringan 4. Rusak Berat	Tidak			Panjang jalan, lebar jalan, perkerasan Permukaan jalan, Kondisi Jalan	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Kabupaten	Ya
2	Jumlah Jembatan menurut kondisi	1. Jembatan baik adalah jembatan dalam keadaan baru, tanpa kerusakan 2. Jembatan dengan kerusakan sedikit adalah jembatan dengan kerusakan yang dapat diperbaiki melalui pemeliharaan rutin, dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan 3. Jembatan yang perlu pemantauan adalah jembatan yang memerlukan pemeliharaan pada masa yang akan datang 4. Jembatan dengan kerusakan yang butuh perhatian adalah jembatan dengan kerusakan yang menjadi serius dalam 12 bulan 5. Jembatan kondisi kritis adalah jembatan dengan kerusakan yang membutuhkan perhatian segera 6. Jembatan dengan elemen runtuh adalah jembatan yang sudah tidak dapat berfungsi lagi	Merupakan klasifikasi jembatan menurut kondisi	1. Jembatan baik adalah jembatan dengan NK=0 2. Jembatan rusak sedikit adalah jembatan dengan NK=1 3. Jembatan perlu pemantauan adalah jembatan dengan NK=2 4. Jembatan dengan kerusakan yang butuh perhatian adalah jembatan dengan NK=3 5. Jembatan dengan kondisi kritis adalah jembatan dengan NK=4 6. Jembatan dengan elemen runtuh adalah jembatan dengan NK=5	Struktur+ kerusakan+ perkembangan+ fungsi+ pengaruh	Jumlah	buah	Jembatan: 1. Baik 2. Rusak Sedikit 3. perlu pemantauan 4. Kerusakan yang butuh perhatian 5. Kondisi Kritis 6. elemen runtuh/tidak berfungsi lagi	Tidak			Tipe Bangunan Jembatan, Kondisi Jembatan	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Kabupaten	Ya

INSPEKTORAT

Judul Kegiatan	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Inspektorat Kabupaten Semarang
Tahun	2023
Jenis Statistik	Statistik Sektoral
Cara Pengumpulan Data	Survei
Sektor Kegiatan	Sektor Publik Perpajakan Dan Regulasi Pasar
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?	Tidak
Identitas Rekomendasi:	-
I. Penyelenggara	
1.1 Instansi Penyelenggara	Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang
1.2 Alamat	Jl. Letjend. Suprpto No. 7a
1.3 Telepon	(024) 6922119
1.4 Faksimile	(024) 6922119
1.5 Email	Inspektoratkabsemarang@gmail.com
II. Penanggung Jawab	
2.1 Unit Eselon Penanggung Jawab	

	Eselon 1	-
	Eselon 2	Inspektur Kabupaten Semarang
	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)	
	Nama	-
	Jabatan	Sekretaris Inspektur Kabupaten Semarang
	Alamat	Ampel, Boyolali
	Telepon	8122836750
	Faksimile	Inspektoratkabsemarang@gmail.com
2.2	Email	-
III. Perencanaan dan Persiapan		
3.1	Latar Belakang	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilaksanakan Oleh Aparatur Pemerintah Dalam Berbagai Sektor Pelayanan. Melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Mengamanatkan Kepada Seluruh Institusi Pemerintahan, Baik Di Tingkat Pusat Maupun Daerah, Untuk Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Penyelenggaraan Pelayanan. Kedua Produk Hukum Tersebut Secara Tersurat Menegaskan Bahwa Kepuasan Masyarakat Merupakan Ukuran Untuk Menilai Kualitas Layanan Publik. Seiring Dengan Kemajuan Teknologi Dan Tuntutan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan, Maka Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Dituntut Untuk Memenuhi Harapan Masyarakat Dalam Melakukan Pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 Disebutkan Bahwa Skm Ini Bertujuan Untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Sebagai Pengguna Layanan Dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3.2	Tujuan Kegiatan	1. Mendorong Partisipasi Masyarakat Sebagai Pengguna Layanan Dalam Menilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan; 2. Mendorong Penyelenggara Pelayanan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; 3. Mendorong Penyelenggara Pelayanan Menjadi Lebih Inovatif Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik; 4. Mengukur Kecenderungan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

Rencana Jadwal Kegiatan				
A. Perencanaan				
1	Perencanaan Kegiatan	01 Januari 2023 s/d 10 Januari 2023		
2	Desain	11 Januari 2023 s/d 17 Januari 2023		
B. Pengumpulan				
3	Pengumpulan Data	18 Januari 2023 s/d 30 Desember 2023		
C. Pemeriksaan				
4	Pengolahan Data	01 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023		
D. Penyebarluasan				
5	Analisis Data	12 Juli 2023 s/d 02 Januari 2024		
6	Diseminasi Hasil	26 Juli 2023 s/d 02 Januari 2024		
3.3 7	Evaluasi	26 Juli 2023 s/d 02 Januari 2024		
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	Nama Variabel No (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1 Persyaratan	Persyaratan	syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif	1 Tahun
3.4 2	Prosedur	Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.	1 Tahun

3	Kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan dengan kenyataan dalam penyelesaian suatu jenis pelayanan	Standar waktu	Kepuasan tentang kesesuaian standar waktu adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan dengan kenyataan dalam penyelesaian suatu jenis pelayanan	1 Tahun
4	Besaran biaya/tarif atas suatu jenis pelayanan	Biaya tarif	Kepuasan tentang biaya/tarif adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait besaran biaya/tarif atas suatu jenis pelayanan	1 Tahun
5	Hasil pelayanan yang diberikan atau diterima pengguna layanan	Hasil pelayanan	Kepuasan tentang pelayanan dan tingkat kepentingannya adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait hasil pelayanan yang diberikan atau diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam standar pelayanan	1 Tahun
6	Kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	Kompetensi	Kepuasan tentang kompetensi adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	1 Tahun
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	Perilaku	Kepuasan tentang perilaku adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	1 Tahun
8	Tersedianya sarana penanganan pengaduan, saran	Sarana	Kepuasan tentang sarana penanganan pengaduan adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait tersedianya sarana penanganan pengaduan, saran (seperti kotak saran/email)	1 Tahun
9	Sarana prasarana yang tersedia bagi pengguna layanan	Sarana prasarana	Kepuasan tentang Sarana/Prasarana pengguna layanan adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait sarana prasarana yang tersedia bagi pengguna layanan (seperti tersedia ruang tunggu tersendiri, kursi yg memadahi untuk pengguna layanan/dll)	1 Tahun

IV. Desain Kegiatan		
4.1	Kegiatan ini dilakukan	Berulang
4.2	Frekuensi Penyelenggaraan	Semesteran
4.3	Tipe Pengumpulan Data	Longitudinal Cross Sectional
4.4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	Sebagian Wilayah Indonesia
	Wilayah Kegiatan	
4.5	1 JAWA TENGAH	SEMARANG
4.6	Metode Pengumpulan Data	Mengisi Kuesioner Sendiri
4.7	Sarana Pengumpulan Data	Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
4.8	Unit Pengumpulan Data	IndividuLainnya : lembaga pemerintah
V. Desain Sampel		
5.1	Jenis Rancangan Sampel	Single Stage Atau Phase
5.2	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir	Sampel Nonprobabilitas
5.3	Metode Sampel Probabilitas yang digunakan	Purposive Sampling
5.4	Kerangka Sampel Tahap Terakhir	-
5.5	Fraksi Sampel Keseluruhan	-

5.6	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama	-
5.7	Unit Sampel	Opd, Desa, Sd Dan Smp Di Kab. Semarang Yang Menjadi Objek Pemantauan, Pemeriksaan Dan Konsulting
5.8	Unit Observasi	Perangkat Daerah, Perangkat Desa, Tenaga Kependidikan
VI. Pengumpulan Data		
6.1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak
6.2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Supervisi
6.3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak
6.4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara
6.5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma I Atau Ii Atau Iii
6.6	Jumlah Petugas	
	Supervisor/penyelia/pengawas	1
	Pengumpul data/enumerator	2
6.7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya
VII. Pengolahan dan Analisis		

Tahapan Pengolahan Data		
7.1	Penyuntingan(Editing)	Ya
	Penyandian(Coding)	Tidak
	(Data Entry)	Ya
	Penyahihan(Validasi)	Ya
7.2	Metode Analisis	Deskriptif
7.3	Unit Analisis	Lainnya: Instansi
7.4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota
VIII. Diseminasi Hasil		
8.1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum	
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak
	Digital(Softcopy)	Ya
	Data Mikro	Tidak
8.2	Rencana Rilis Produk Kegiatan	
	Tercetak(Hardcopy)	
	Digital(Softcopy)	1/10/2024
	Datamikro	

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposisi	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakses
										Nama	Publikasi	Nama	Kegiatan		
1	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap Inspektorat Kabupaten Semarang	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap Inspektorat Kabupaten Semarang adalah Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan kriteria nilai indeks yang diperoleh	Masyarakat Kab. Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap mutu pelayanan 88,31 – 100,00 = sangat baik (A) 76,61 – 88,30 = baik (B) 65,00 – 76,60 = kurang baik (C) 25,00 – 64,99 = tidak baik (D)	SKM = (Total Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang terisi) x (Nilai Penimbang)	Indeks	-	Indeks IKM dapat disajikan berdasarkan klasifikasi : 1. kelompok umur 2. jenis kelamin 3. pendidikan 4. pekerjaan	Ya	IKM dibangun berdasarkan indikator 1. tingkat kepuasan kesesuaian syarat yang harus dipenuhi 2. tingkat kepuasan alur prosedur dalam pengurusan suatu jenis pelayanan 3. tingkat kepuasan standar waktu yang diterapkan 4. tingkat kepuasan besaran biaya/tarif pelayanan 5. tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan dan diterima 6. tingkat kepuasan kompetensi/kemampuan petugas 7. tingkat kepuasan perilaku petugas 8. tingkat kepuasan tersedia sarana penanganan pengaduan 9. tingkat kepuasan sarana prasarana bagi	WEB ESKM kab. Semarang			Kabupaten	Ya

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	-	Kepuasan tentang kompetensi adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	Kompetensi	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	1 Tahun			char	=	Isian tidak boleh kosong	-	Tidak
2	Kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan dengan kenyataan dalam penyelesaian suatu jenis pelayanan	-	Kepuasan tentang kesesuaian standar waktu adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan dengan kenyataan dalam penyelesaian suatu jenis pelayanan	Standar waktu	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	1 Tahun			char	=	Isian tidak boleh kosong	-	Tidak
3	Hasil pelayanan yang diberikan atau diterima pengguna layanan	-	Kepuasan tentang pelayanan dan tingkat kepentingannya adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait hasil pelayanan yang diberikan atau diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam standar pelayanan	Hasil pelayanan	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	1 Tahun			char	=	Isian tidak boleh kosong	-	Tidak
4	Persyaratan	-	syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif	Persyaratan	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	1 Tahun			char	=	Isian tidak boleh kosong	-	Tidak
5	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	-	Kepuasan tentang perilaku adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	Perilaku	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	1 Tahun			char	=	Isian tidak boleh kosong	-	Tidak
6	Besaran biaya/tarif atas suatu jenis pelayanan	-	Kepuasan tentang biaya/tarif adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait besaran biaya/tarif atas suatu jenis pelayanan	Biaya tarif	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	1 Tahun			char	=	Isian tidak boleh kosong	-	Tidak
7	Prosedur	-	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.	Prosedur	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	1 Tahun			char	=	Isian tidak boleh kosong	-	Tidak
8	Sarana prasarana yang tersedia bagi pengguna layanan	-	Kepuasan tentang Sarana/Prasarana pengguna layanan adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait sarana prasarana yang tersedia bagi pengguna layanan (seperti tersedia ruang tunggu tersendiri, kursi yg memadai untuk pengguna layanan/dll)	Sarana prasarana	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	1 Tahun			char	=	Isian tidak boleh kosong	-	Tidak
9	Tersedianya sarana penanganan pengaduan, saran	-	Kepuasan tentang sarana penanganan pengaduan adalah penilaian yang diberikan oleh perangkat daerah, perangkat desa dan tenaga kependidikan yang menjadi responden atas pelayanan petugas pembinaan/pemantauan dan petugas audit terkait tersedianya sarana penanganan pengaduan, saran (seperti kotak saran/email)	Sarana	PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017	1 Tahun			char	=	Isian tidak boleh kosong	-	Tidak

KESBANGPOL KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Sektor Publik Perpajakan Dan Regulasi Pasar	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Brigjen Sudiarto No 34 Ungaran	
1,3	Telepon	-246921250	
1,4	Faksimile	(024) 6921250	
1,5	Email	Kesbangpolkabsemarangg@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Semarang (suyana, Sh., M.si.)	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	Yuni Indrasari, S.sos., M.si.	
	Jabatan	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Ormas	
	Alamat	Jl. Brigjen Sudiarto No 34 Ungaran	
	Telepon	(024) 6921250	
	Faksimile	Kesbangpolkabsemarangg@gmail.com	
	Email	(024) 6921250	
III. Perencanaan dan Persiapan			

3,1	Latar Belakang	Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas Adalah Organisasi Yang Didirikan Dan Dibentuk Oleh Masyarakat Secara Sukarela Berdasarkan Kesamaan Aspirasi, Kehendak, Kebutuhan, Kepentingan, Kegiatan, Dan Tujuan Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Demi Tercapainya Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Disebutkan Bahwa Ormas Berfungsi Sebagai Sarana (1) Penyalur Kegiatan Sesuai Dengan Kepentingan Anggota Dan/atau Tujuan Organisasi; (2) Pembinaan Dan Pengembangan Anggota Untuk Mewujudkan Tujuan Organisasi; (3) Penyalur Aspirasi Masyarakat; (4) Pemberdayaan Masyarakat; (5) Pemenuhan Pelayanan Sosial; (6) Partisipasi Masyarakat Untuk Memelihara, Menjaga, Dan Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa; Dan/atau (7) Pemelihara Dan Pelestari Norma, Nilai, Dan Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara. Berdasarkan Hal Tersebut, Dapat Diketahui Bahwa Ormas Memiliki Fungsi Yang Sangat Penting Dalam Membangun Kehidupan Bangsa. Saat Ini Jumlah Ormas Di Kabupaten Semarang Mencapai 261 (dua Ratus Enam Puluh Satu) Ormas. Keberadaan Ormas Tersebut Perlu Dipelihara, Salah Satunya Dengan Meningkatkan Sinergi Dan Kerjasama Antar Ormas Dan Juga Sinergi Antara Ormas Dengan Pemerintah. Dengan Sinergi Antar Ormas Dan Antara Ormas Dengan Pemerintah Kabupaten Semarang Diharapkan Konflik Antar Ormas Dapat Diminimalkan Serta Ormas Mampu Menjadi Mitra Strategis Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Terutama Dalam Menjaga Kondusivitas Wilayah.	
3,2	Tujuan Kegiatan	1. Mengkompilasi Data Organisasi Masyarakat Yang Ada Di Lingkungan Kabupaten Semarang, Sehingga Menjadi Satu Kesatuan Informasi Data. 2. Menyajikan Informasi Data Ormas, Sehingga Dapat Diperoleh Gambaran/keadaan Umum Kondisi Ormas Di Kabupaten Semarang. 3. Menyajikan Informasi Data Ormas, Sebagai Bahan Guna Memenuhi Kebutuhan Unsur Pimpinandalam Rangka Perencanaan Dan Kebutuhan Lainnya. 4. Secara Bertahap Dan Berjangka Panjang Menyiapkan Data Dasar Yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan Terkait Organisasi Masyarakat Di Pemerintah Kabupaten Semarang.	
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan		
	A. Perencanaan		
	1	Perencanaan Kegiatan	02 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023
	2	Desain	02 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023
	B. Pengumpulan		
	3	Pengumpulan Data	02 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023
	C. Pemeriksaan		
	4	Pengolahan Data	02 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023
	D. Penyebarluasan		

	5	Analisis Data	02 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023		
	6	Diseminasi Hasil	01 Februari 2024 s/d 01 Februari 2024		
	7	Evaluasi	01 Februari 2024 s/d 01 Februari 2024		
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Organisasi Masyarakat	Organisasi Masyarakat	Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Setahun Terakhir
	2	Alamat	Alamat Kantor Ormas	Alamat Kantor Ormas atau alat Ormas berkegiatan	Setahun Terakhir
	3	Kepengurusan	Struktur Kepengurusan Utama	Struktur Kepengurusan Utama dalam Organisasi Masyarakat yang terdaftar	Setahun Terakhir
	4	Bidang Kegiatan	Bidang Kegiatan Organisasi Masyarakat	Organisasi Masyarakat bergerak pada bidang apa saja dalam kegiatan rutinnya	Setahun Terakhir
	5	Tanggal Pendirian	Tanggal Pendirian	Tanggal Organisai Masyarakat yang terdaftar didirikan	Setahun Terakhir
	6	No Badan Hukum	No Badan Hukum Ormas	No Badan Hukum yang terdaftar untuk Ormas yang didaftarkan	Setahun Terakhir
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		
4,5	Wilayah Kegiatan				

	1	JAWA TENGAH	SEMARANG	
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder	
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Lainnya : Pelaporan organisasi masyarakat dan pantauan (update) lapangan	
4,8	Unit Pengumpulan Data		Usaha/Perusahaan	
VI. Pengumpulan Data				
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Supervisi	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Ya	
6,4	Petugas Pengumpulan Data		-	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		-	
6,6	Jumlah Petugas			
	Supervisor/penyelia/pengawas		0	
	Pengumpul data/enumerator		0	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis				
7,1	Tahapan Pengolahan Data			
	Penyuntingan(Editoring)		Ya	
	Penyandian(Coding)		Ya	
	(Data Entry)		Ya	
	Penyahihan(Validasi)		Ya	
7,2	Metode Analisis		Deskriptif	
7,3	Unit Analisis		Usaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis		Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil				
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum			
	Tercetak(Hardcopy)		Tidak	

8,2	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Ya	
	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)	01/02/2024	
	Datamikro	01/02/2024	

METADATA VARIABLE

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Kepengurusan	-	Struktur Kepengurusan Utama dalam Organisasi Masyarakat yang terdaftar	Struktur Kepengurusan Utama	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Setahun Terakhir			Char	=	Harus isi	Struktur Kepengurusan Utama	Tidak
2	No Badan Hukum	-	No Badan Hukum yang terdaftar untuk Ormas yang didaftarkan	No Badan Hukum Ormas	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Setahun Terakhir			Integer	=	Harus isi	Berapa Nomor Badan Hukum Ormas	Tidak
3	Organisasi Masyarakat	-	Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Organisasi Masyarakat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Setahun Terakhir			Char	=	Harus Isi	Nama Organisasi Masyarakat	Tidak
4	Bidang Kegiatan	-	Organisasi Masyarakat bergerak pada bidang apa saja dalam kegiatan rutinnya	Bidang Kegiatan Organisasi Masyarakat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Setahun Terakhir			Char	=	Harus isi	Apa Bidang Kegiatan Organisasi Masyarakat	Tidak
5	Alamat	-	Alamat Kantor Ormas atau alat Ormas berkegiatan	Alamat Kantor Ormas	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Setahun Terakhir			Char	=	Harus isi	Alamat Kantor Ormas	Tidak
6	Tanggal Pendirian	-	Tanggal Organisasi Masyarakat yang terdaftar didirikan	Tanggal Pendirian	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Setahun Terakhir			Char	=	Harus isi	Tanggal berapa pendirian Ormas	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran		Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
						Jumlah	Satuan			Nama	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	Jumlah Organisasi Masyarakat	Organisasi Masyarakat (Ormas)	-	Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Menjumlahkan organisasi masyarakat	Jumlah	Unit	-	Tidak			Organisasi Masyarakat	Kompilasi Data Organisasi Masyarakat di Kabupaten Semarang	Kabupaten	Tidak

RUMAHSAKIT GUNAWAN MANGUNKUSUMO

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Profil Rsud Gunawan Mangunkusumo
Tahun		2023
Jenis Statistik		Statistik Sektoral
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan		Kesehatan
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak
Identitas Rekomendasi:		-
I. Penyelenggara		
1,1	Instansi Penyelenggara	Rsud Dr, Gunawan Mangunkusumo
1,2	Alamat	Jl. Kartini No 101 Ambarawa - 50611
1,3	Telepon	(0298) 591022
1,4	Faksimile	(0298) 591866
1,5	Email	Ambarawa Rsud@yahoo.co.id
II. Penanggung Jawab		
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab	
	Eselon 1	-
	Eselon 2	Direktur Rsud Dr, Gunawan Mangunkusumo
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)	
	Nama	-
	Jabatan	Kepala Bagian Tata Usaha
	Alamat	Jl. Kartini No 101 Ambarawa - 50611
	Telepon	(0298) 591022
	Faksimile	Ambarawa Rsud@yahoo.co.id
	Email	(0298) 591866
III. Perencanaan dan Persiapan		
3,1	Latar Belakang	Rsud Dr. Gunawan Mangunkusumo Dari Waktu Ke Waktu Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan Berjalan Dengan Lancar Dan Semakin Mendapat Kepercayaan Dari Berbagai Pihak. Kondisi Ini Tidak Terlepas Dari Konsistensi Rsud

		Dr. Gunawan Mangunkusumo Terhadap Upaya Pengembangan Rumah Sakit Dengan Berlandaskan Pada Visi : “ Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Terpercaya, Dan Kebanggaan Bagi Masyarakat “. Rsud Dr. Gunawan Mangunkusumo Adalah Rumah Sakit Type C Terletak Di Jalan Kartini No. 101 Ambarawa Kabupaten Semarang Dengan Jumlah Tempat Tidur Sebanyak 218. Berdasarkan Letak Geografis Diatas Maupun Faktor Lainnya, Rsud Dr. Gunawan Mangunkusumo Berada Dalam Posisi Yang Strategis Sehingga Kepercayaan Terhadap Rsud Dr. Gunawan Mangunkusumo Dari Masyarakat Sebagai Pelanggan Terus Meningkat. Rsud Dr. Gunawan Mangunkusumo Berkomitmen Untuk Menjaga Mutu Pelayanan Dan Keselamatan Pasien Dengan Telah Lulus Sertifikat Iso 9001: 2008 Tanggal 23 Juli 2012 Dan 10 November 2014 Serta Pada Tanggal 3 Mei 2019 Rsud Dr. Gunawan Mangunkusumo Memperoleh Prestasi Lulus Akreditasi Paripurna Dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (kars) Dengan Nomor Sertifikat : Kars-sert/465/v/2019. Untuk Mencapai Misi, Rsud Dr. Gunawan Mangunkusumo Pada Tahun 2021 Menambah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Antara Lain : 1. Rehabilitasi Bangunan Kamar Jenazah 2. Pembangunan Gedung Parkir Lantai 3 3. Alat Kesehatan Profil Rsud Dr. Gunawan Mangunkusumo Adalah Gambaran Situasi Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Yang Diterbitkan Setahun Sekali. Buku Profil Rsud Dr. Gunawan Mangunkusumo Menyajikan Data Tentang Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, Sumber Daya Manusia (Sdm) Dan Keuangan Rumah Sakit. Data Ditampilkan Dalam Bentuk Tabel Dan Grafik Yang Diberi Analisa Singkat.		
3,2	Tujuan Kegiatan	Sebagai Acuan Penerapan Langkah-langkah Dalam Melakukan Pengumpulan Data Mutu Di Rsud Dr. Gunawan Mangunkusumo		
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan			
	A. Perencanaan			
	1	Perencanaan Kegiatan	01 November 2022 s/d 31 Desember 2022	
	2	Desain	01 November 2022 s/d 31 Desember 2022	
	B. Pengumpulan			
	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023	
	C. Pemeriksaan			
	4	Pengolahan Data	01 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024	
	D. Penyebarluasan			
	5	Analisis Data	01 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024	
6	Diseminasi Hasil	01 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024		
7	Evaluasi	01 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024		
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:			
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi

					(Periode Enumerasi)	
	1	Rawat Jalan	pelayanan terhadap orang (pasien) yang masuk rumah sakit/puskesmas/klinik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap	pelayanan terhadap orang (pasien) yang masuk rumah sakit/puskesmas/klinik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap	1 tahun	
	2	Rawat Inap	pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya	pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya	1 tahun	
	3	Penyakit	kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal	kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal	1 tahun	
	4	Pasien	setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit	setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit	1 tahun	
	5	ICU	suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri, dengan staf yang terlatih dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan memberikan terapi untuk pasien-pasien yang menderita penyakit akut, cedera atau penyakit lain yang mengancam nyawa	suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri, dengan staf yang terlatih dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan memberikan terapi untuk pasien-pasien yang menderita penyakit akut, cedera atau penyakit lain yang mengancam nyawa	1 Tahun	
IV. Desain Kegiatan						
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang			
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan			
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Cross Sectional			
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia			
4,5	Wilayah Kegiatan					
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG			

4,6	Metode Pengumpulan Data	Pengumpulan Data Sekunder	
4,7	Sarana Pengumpulan Data	Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)	
4,8	Unit Pengumpulan Data	Usaha/Perusahaan	
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Supervisi	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma I Atau Ii Atau Iii	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	1	
	Pengumpul data/enumerator	1	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Ya	
	Penyandian(Coding)	Ya	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Usaha/Perusahaan	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Lainnya: Lingkup wilayah pelayanan RSUD dr, Gunawan Mangunkusumo	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	

8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	31/03/2024	
	Digital(Softcopy)	31/03/2024	
	Datamikro		

METADATA VARIABLE

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umur
1	ICU	ICU	suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri, dengan staf yang terlatih dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan memberikan terapi untuk pasien-pasien yang menderita penyakit akut, cedera atau penyakit lain yang mengancam nyawa	suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri, dengan staf yang terlatih dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan memberikan terapi untuk pasien-pasien yang menderita penyakit akut, cedera atau penyakit lain yang mengancam nyawa	(Kemenkes, 2011)	1 Tahun			integer	=	jumlah pasien ruang ICU	jumlah pasien ruang ICU	Tidak
2	Rawat Inap	RI	pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya	pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya	(Depkes RI (1997) yang dikutip dari Suryanti (2002)	1 Tahun			integer	=	jumlah rawat jalan	jumlah rawat jalan	Tidak
3	Penyakit	Pny	kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal	kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2014	1 tahun			integer	=	Jumlah penyakit	Jumlah penyakit	Tidak
4	Rawat Jalan	RJ	pelayanan terhadap orang (pasien) yang masuk rumah sakit/puskesmas/klinik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap	pelayanan terhadap orang (pasien) yang masuk rumah sakit/puskesmas/klinik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap	Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/11/1987	1 tahun			integer	=	jumlah rawat jalan	Jumlah rawat jalan	Tidak
5	Pasien	PS	setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit	setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018	1 tahun			integer	=	Jumlah Pasien	Jumlah Pasien	Tidak

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus/Perhitungan	Ukuran Satuan	Klasifikasi Penjaminan	Apakah Indikator Komposit	Nama Indikator Pembagunan	Apakah Indikator Pembagunan	Level Estimasi	Apakah dapat diakses
									Indikator Pembagunan	Indikator Pembagunan	Level Estimasi	Apakah dapat diakses
1	Indikator Pelayanan Rawat inap	gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, efisiensi pelayanan rawat inap dan efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit	gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, efisiensi pelayanan rawat inap dan efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit	gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, efisiensi pelayanan rawat inap dan efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit	BOR = jumlah rawat inap/jumlah kamar tersedia	Indeks Hari	Indikator yang harus dijamin berdasarkan 1. BOR (Tingkat hunian kamar) 2. ALOS (rata-rata lama rawat inap) 3. TOI (rata-rata umur yang tidak dirawat)	Ya	Ukuran indikator Energi Bed Occupancy Rate (BOR) Average Length of Stay (ALOS) Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO) Net Death Rate (NDR) Gross Death Rate (GDR)	Indikator Pembagunan	Level Estimasi	Apakah dapat diakses
2	Jumlah 10 besar penyakit	hingga abnormal tertentu yang secara reguler memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh manusia makhluk hidup, dan bukan sekedar gangguan fisiologis	hingga abnormal tertentu yang secara reguler memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh manusia makhluk hidup, dan bukan sekedar gangguan fisiologis	hingga abnormal tertentu yang secara reguler memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh manusia makhluk hidup, dan bukan sekedar gangguan fisiologis	membandingkan 10 besar penyakit yang diangkat dari semua pasien	Setelah pasien	10 besar penyakit	Ya	Indikator 10 besar penyakit	Indikator Pembagunan	Level Estimasi	Apakah dapat diakses

RUMAH SAKIT GONDO SUWARNO

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Profil Rsud Dr Gondo Suwarno	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Kesehatan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Rsud Dr Gondo Suwarno Kabupaten Semarang	
1,2	Alamat	Jl Diponegoro No 125 Ungaran	
1,3	Telepon	(024) 6921006	
1,4	Faksimile	-	
1,5	Email	Rsud.ungaran@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Bagian Tata Usaha	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bagian Tata Usaha	
	Alamat	Jl Diponegoro No 125 Ungaran	
	Telepon	(024) 6921006	
	Faksimile	Rsud.ungaran@gmail.com	
	Email	-	
III. Perencanaan dan Persiapan			

3,1	Latar Belakang		Untuk Melakukan Pengumpulan Data Terkait Profil Rsud Yang Tujuan Utamanya Untuk Melakukan Pengembangan Pelayanan Dan Inovasi Dalam Bidang Pelayanan Medik Yang Terus Dilakukan Dengan Mempertimbangkan Kebutuhan Masyarakat Yang Terus Berkembang.		
3,2	Tujuan Kegiatan		Menyusun Profil Rsud Dr. Gondo Suwarno Secara Lengkap Yang Digunakan Untuk Kebutuhan Akreditasi Serta Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan.		
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan				
	A. Perencanaan				
	1	Perencanaan Kegiatan	05 Januari 2023 s/d 10 Januari 2023		
	2	Desain	05 Januari 2023 s/d 10 Januari 2023		
	B. Pengumpulan				
	3	Pengumpulan Data	15 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	15 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	20 Januari 2023 s/d 23 Januari 2023		
6	Diseminasi Hasil	27 Januari 2023 s/d 27 Januari 2023			
7	Evaluasi	27 Januari 2023 s/d 28 Februari 2023			
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Jumlah Pegawai	Jumlah pegawai yang bertugas	Jumlah pegawai yang bertugas	Satu Tahun Yang Lalu
	2	Jenis Pelayanan	Jenis pelayanan yang ada di rumah sakit	Jenis pelayanan yang ada di rumah sakit	Satu Tahun Yang Lalu
	3	Alur Pelayanan	Alur Pelayanan yang dilakukandi RSUD	Alur Pelayanan yang dilakukandi RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
	4	Jadwal Pelayanan	Jadwal Pelayanan yang ada diRSUD	Jadwal Pelayanan yang ada diRSUD	Satu Tahun Yang Lalu

	5	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi yang ada di RSUD	Struktur Organisasi yang ada di RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
	6	Jumlah Eksisting ASN dan Non ASN	Jumlah pegawai yang bertugas di RSUD	Jumlah pegawai yang bertugas di RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
	7	Ketersediaan Sarana Prasarana	Ketersediaan Sarana Prasarana di RSUD	Ketersediaan Sarana Prasarana di RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
	8	Kunjungan Rawat Jalan	Kunjungan Rawat Jalan di RSUD	Kunjungan Rawat Jalan di RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
	9	10 Besar Penyakit di Rawat Jalan	10 Besar Penyakit di Rawat Jalan	10 Besar Penyakit di Rawat Jalan	Satu Tahun Yang Lalu
	10	10 Besar Penyakit di Rawat Inap	10 Besar Penyakit di Rawat Inap	10 Besar Penyakit di Rawat Inap	Satu Tahun Yang Lalu
	11	Indikator Kinerja Rawat Inap	Indikator Kinerja Rawat Inap di RSUD	Indikator Kinerja Rawat Inap di RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
	12	Kunjungan Gawat Darurat	Kunjungan Gawat Darurat di RSUD	Kunjungan Gawat Darurat di RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
	13	.Kunjungan Radiologi	Kunjungan Radiologi di RSUD	Kunjungan Radiologi di RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
	14	Jumlah Laporan Kegiatan Kebidanan	jumlah Laporan Kegiatan Kebidanan	jumlah Laporan Kegiatan Kebidanan	Satu Tahun Yang Lalu
	15	Jenis Inovasi	Jenis Inovasi di RSUD	Jenis Inovasi di RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
	16	Rencana Inovasi di RSUD	Rencana Inovasi di RSUD	Rencana Inovasi di RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
	17	Kunjungan Rawat Inap	Kunjungan Rawat Inap di RSUD	Kunjungan Rawat Inap di RSUD	Satu Tahun Yang Lalu
IV. Desain Kegiatan					
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan		
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Cross Sectional		
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data		Sebagian Wilayah Indonesia		

4,5	Wilayah Kegiatan		
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG
4,6	Metode Pengumpulan Data		Pengumpulan Data Sekunder
4,7	Sarana Pengumpulan Data		Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
4,8	Unit Pengumpulan Data		Usaha/Perusahaan
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		Tidak
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data		Lainnya: Pemeriksaan
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		Tidak
6,4	Petugas Pengumpulan Data		Staf Instansi Penyelenggara
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data		Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	1	
	Pengumpul data/enumerator	1	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		Tidak
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editoring)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Tidak	
7,2	Metode Analisis		Deskriptif
7,3	Unit Analisis		Usaha/Perusahaan
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis		Kabupaten/Kota
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		

	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	27/01/2023	
	Digital(Softcopy)	27/01/2023	
	Datamikro		

METADATA VARIABLE

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakases umum?
1	10 Besar Penyakit di Rawat Inap	-	10 Besar Penyakit di Rawat Inap	10 Besar Penyakit di Rawat Inap	-	Satu Tahun Yang Lalu	-	-	-	- = -	-	-	Ya
2	Kunjungan Rawat Jalan	-	Kunjungan Rawat Jalan di RSUD	Kunjungan Rawat Jalan di RSUD	-	Satu Tahun Yang Lalu	-	-	-	- = -	-	-	Ya
3	Jenis Pelayanan	-	Jenis pelayanan yang ada di rumah sakit	Jenis pelayanan yang ada di rumah sakit	-	Satu Tahun Yang Lalu	-	-	-	- = -	-	-	Ya
4	Kunjungan Rawat Inap	-	Kunjungan Rawat Inap di RSUD	Kunjungan Rawat Inap di RSUD	-	Satu Tahun Yang Lalu	-	-	-	- = -	-	-	Ya
5	Jumlah Pegawai	-	Jumlah pegawai yang bertugas	Jumlah pegawai yang bertugas	-	Satu Tahun Yang Lalu	-	-	-	- = -	-	-	Ya
6	Kunjungan Gawat Darurat	-	Kunjungan Gawat Darurat di RSUD	Kunjungan Gawat Darurat di RSUD	-	Satu Tahun Yang Lalu	-	-	-	- = -	-	-	Ya
7	Jenis Inovasi	-	Jenis Inovasi di RSUD	Jenis Inovasi di RSUD	-	Satu Tahun Yang Lalu	-	-	-	- = -	-	-	Ya
8	10 Besar Penyakit di Rawat Jalan	-	10 Besar Penyakit di Rawat Jalan	10 Besar Penyakit di Rawat Jalan	-	Satu Tahun Yang Lalu	-	-	-	- = -	-	-	Ya

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakases umum?
										Nama	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	Jumlah Kunjungan di Rumah Sakit Gondo Suwarno	Banyaknya kunjungan di RSUD Gondo Suwarno baik itu kunjungan rawat inap, gawat darurat, dan lainnya.	Pengunjung berdasar masing-masing keperluan	Menunjukkan jumlah kunjungan yang ada di RSUD Gondo Suwarno	Penjumlahan setiap jenis kunjungan di Rumah Sakit	Jumlah	Orang	Jenis Kunjungan	Tidak			-	-	-	Ya
2	Jumlah 10 Besar Penyakit di Rumah Sakit	Jumlah diagnosa pasien yang ditangani di Rumah Sakit berdasarkan kode klasifikasi statistik Internasional Tentang Penyakit dan Masalah Kesehatan Revisi ke 10 atau the 10th revision of the	Penyakit Berdasarkan ICD10	Menunjukan Jumlah Penyakit 10 Besar di Rumah Sakit	Penjumlahan jenis penyakit 10 besar ditangani Per Bulan Dari Setiap kegiatan di Rumah Sakit	Jumlah	Orang	Jenis RawatGolongan Sebab Sakit	Tidak			-	-	-	Ya
3	Jumlah Pegawai di RSUD	Pegawai ASN maupun non ASN yang bekerja di RSUD Gondo Suwarno	Jumlah pegawai berdasarkan jenis	Menunjukkan jumlah pegawai yang ada di RSUD Gondo Suwarno	Penjumlahan pegawai ASN maupun non ASN yang ada di RSUD Gondo Suwarno	Jumlah	Orang	Jenis pegawai	Tidak			-	-	-	Ya
4	Pelayanan di RSUD Gondo Suwarno	Tindakan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan pasien atau pengunjung di RSUD Gondo Suwarno	-	-	-	-	Jenis	-	Tidak			-	-	-	Ya
5	Inovasi di RSUD Gondo Suwarno	Proses menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya di RSUD Gondo Suwarno	-	-	-	-	Jumlah	-	Tidak			-	-	-	Ya

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Kejadian Penegakan Perda, Ketertiban Umum, Dan Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Perwilayahan Dan Perkotaan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya	
Identitas Rekomendasi:		K-24.3322.011	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Satpol Pp Dan Damkar Kab Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 55	
1,3	Telepon	2476901346	
1,4	Faksimile	-	
1,5	Email	Satpolkabsemarang@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Kepala Satpol Pp & Damkar Kab Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	-	
	Jabatan	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Penegakan Produk Hukum Daerah	
	Alamat	Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 55	
	Telepon	2476901346	
	Faksimile	Satpolkabsemarang@gmail.com	
	Email	-	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Jumlah Kejadian Penegakan Perda, Ketertiban Umum, Dan Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Semarang	

3,2	Tujuan Kegiatan		Memberikan Informasi Kejadian Penegakan Perda, Ketertiban Umum, Dan Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Semarang Kepada Masyarakat					
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan							
	A. Perencanaan							
	1	Perencanaan Kegiatan	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022					
	2	Desain	01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022					
	B. Pengumpulan							
	3	Pengumpulan Data	03 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023					
	C. Pemeriksaan							
	4	Pengolahan Data	01 Februari 2023 s/d 31 Desember 2023					
	D. Penyebarluasan							
	5	Analisis Data	01 Februari 2023 s/d 31 Desember 2023					
6	Diseminasi Hasil	01 April 2023 s/d 02 Januari 2024						
7	Evaluasi	01 April 2023 s/d 02 Januari 2024						
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:							
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi		Referensi Waktu (Periode Enumerasi)		
	1	Kejadian Pemadaman Kebakaran (damkar)	Pemadaman kebakaran (damkar)	Pemadaman kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan pemadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll.		1 tahun		
	2	Penegakan Peraturan daerah (Perda)	Peraturan daerah (Perda)	Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah		1 tahun		
	3	Penindakan ketertiban umum	ketertiban umum	suatu asas dan standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang- undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat		1 tahun		
IV. Desain Kegiatan								
4,1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang					
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan		Tahunan					
4,3	Tipe Pengumpulan Data		Longitudinal Panel					

4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	Sebagian Wilayah Indonesia	
4,5	Wilayah Kegiatan		
	1	JAWA TENGAH	SEMARANG
4,6	Metode Pengumpulan Data	PengamatanPengumpulan Data Sekunder	
4,7	Sarana Pengumpulan Data	Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)	
4,8	Unit Pengumpulan Data	Lainnya : Kejadian pelanggaran dan kebakaran	
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Lainnya: pengecekan manual	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Sma Atau Smk	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	1	
	Pengumpul data/enumerator	1	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Tidak	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: Kejadian pelanggaran dan kebakaran	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			

8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak	
	Digital(Softcopy)	Tidak	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)		
	Digital(Softcopy)	Invalid date	
	Datamikro	Invalid date	

METADATA VARIABEL

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Penindakan ketertiban umum	-	suatu asas dan standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang- undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat	ketertiban umum	-	1 tahun			integer	=	Harus diisi	-	Tidak
2	Kejadian Pemadaman Kebakaran (damkar)	-	Pemadaman kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll.	Pemadaman kebakaran (damkar)	-	1 tahun			integer	=	Harus diisi	-	Tidak
3	Penegakan Peraturan daerah (Perda)	-	Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah	Peraturan daerah (Perda)	-	1 tahun			integer	=	Harus diisi	-	Tidak

MATADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Level Estimasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-16-
1	Jumlah Kejadian pemadaman kebakaran	-	Jumlah Kejadian Pemadam Kebakaran setahun di kabupaten Semarang	semakin besar nilainya, semakin banyak kejadian damkar	penjumlahan	Jumlah	Kejadian	-	Kabupaten
2	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah	-	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang selama setahun	Semakin besar nilainya, semakin banyak perda yang diaplikasikan	penjumlahan	Jumlah	Kejadian	-	Kabupaten
3	Jumlah Penindakan Ketertiban Umum	-	Jumlah Penindakan Ketertiban Umum di Kab Semarang	Semakin besar nilainya, semakin banyak pelanggaran ketertiban umum	Penjumlahan	Jumlah	Kejadian	-	Kabupaten

SEKRETARIAT DPRD KAB. SEMARANG

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Anggota Dprd Kabupaten Semarang	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi	
Sektor Kegiatan		Ketenagakerjaan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Ya	
Identitas Rekomendasi:		K-23.3322.001	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Sekretariat Dprd Kab. Semarang	
1,2	Alamat	Jl. Diponegoro 203, Ungaran	
1,3	Telepon	246921053	
1,4	Faksimile	-	
1,5	Email	Setwan.web@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	Sekretaris Dprd Kabupaten Semarang	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	Prayitno, S.stp, Mm	
	Jabatan	Kabag Persidangan Dan Perundang-undangan	
	Alamat	Jl. Diponegoro 203, Ungaran	
	Telepon	246921053	
	Faksimile	Setwan.web@gmail.com	
	Email	-	
III. Perencanaan dan Persiapan			

3,1	Latar Belakang	Pengumpulan Data Anggota Legislatif (dprd) Dilakukan Setiap Saat Sesuai Kebutuhan Dan Dapat Diakibatkan Oleh Pergantian Antar Waktu (paw), Meninggal Dunia, Dibebastugaskan Oleh Partai Politik Pengusung Serta Sebab Lain Yang Tertuang Dalam Undang-undang				
3,2	Tujuan Kegiatan	Untuk Mendapatkan Data Anggota Dprd Menurut Partai Politik, Fraksi, Komisi, Jabatan Dan Jenis Kelamin				
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan					
	A. Perencanaan					
	1	Perencanaan Kegiatan	02 November 2022 s/d 09 November 2022			
	2	Desain	10 November 2022 s/d 14 November 2022			
	B. Pengumpulan					
	3	Pengumpulan Data	02 Januari 2023 s/d 04 Januari 2023			
	C. Pemeriksaan					
	4	Pengolahan Data	05 Januari 2023 s/d 09 Januari 2023			
	D. Penyebarluasan					
	5	Analisis Data	02 Mei 2023 s/d 30 November 2023			
6	Diseminasi Hasil	04 Mei 2023 s/d 04 Desember 2023				
7	Evaluasi	04 Mei 2023 s/d 04 Desember 2023				
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:					
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)	
	1	Jumlah Anggota DPRD menurut jabatan dan jenis kelamin	pimpinan DPRD	Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas : 1 urang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota uang beranggotakan 45 -50 orang ; 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD yang beranggotakan 20-44 orang	tahunan	
	2	Jumlah Anggota DPRD menurut komisi dan jenis kelamin	komisi DPRD	komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap	tahunan	
	3	Jumlah Anggota DPRD menurut fraksi dan jenis kelamin	Fraksi DPRD	fraksi merupakan pengelompokkan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan pemilihan umum	tahunan	
	4	Jumlah Anggota DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin	Partai politik	partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama	tahunan	
IV. Desain Kegiatan						
4,1	Kegiatan ini dilakukan	Berulang				

4,2	Frekuensi Penyelenggaraan	Tahunan	
4,3	Tipe Pengumpulan Data	Longitudinal Panel	
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	Sebagian Wilayah Indonesia	
4,5	Wilayah Kegiatan		
	1 JAWA TENGAH	SEMARANG	
4,6	Metode Pengumpulan Data	Pengumpulan Data Sekunder	
4,7	Sarana Pengumpulan Data	Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)	
4,8	Unit Pengumpulan Data	Individu	
VI. Pengumpulan Data			
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Ya	
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Kunjungan Kembali	
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak	
6,4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara	
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Sma Atau Smk	
6,6	Jumlah Petugas		
	Supervisor/penyelia/pengawas	2	
	Pengumpul data/enumerator	2	
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak	
VII. Pengolahan dan Analisis			
7,1	Tahapan Pengolahan Data		
	Penyuntingan(Editing)	Tidak	
	Penyandian(Coding)	Tidak	
	(Data Entry)	Ya	
	Penyahihan(Validasi)	Ya	
7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	Lainnya: Anggota DPRD Kabupaten Semarang	

7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Tidak	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	05 Desember 2023	
	Digital(Softcopy)		
	Datamikro		

METADATA VARIABLE

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Jumlah Anggota DPRD menurut jabatan dan jenis kelamin	-	Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas : 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 45 -50 orang ; 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD yang beranggotakan 20-44 orang	pimpinan DPRD	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2017	tahunan			Char	=	harus terisi salah satu jika rincian komisi tidak terisi	-	Ya
2	Jumlah Anggota DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin	-	partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama	Partai politik	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2017	tahunan			Char	=	harus terisi salah satu	-	Ya
3	Jumlah Anggota DPRD menurut komisi dan jenis kelamin	-	komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap	komisi DPRD	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2017	tahunan			Char	=	harus terisi jika rincian jabatan tidak terisi	-	Ya

METADATA INDIKATOR

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan		Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
										Nama	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	Jumlah Anggota DPRD menurut fraksi	fraksi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan pemilihan umum	Fraksi DPRD	Semakin besar nilai artinya maka semakin banyak anggota DPRD menurut fraksi	Penjumlahan anggota DPRD menurut masing-masing fraksi	Jumlah	orang	menurut fraksi	Tidak			Jumlah Anggota DPRD menurut fraksi	Pengumpulan Data Anggota DPRD Kab. Semarang	Kabupaten	Ya
2	Jumlah Anggota DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin	partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama	Partai politik	Semakin besar nilai maka artinya semakin banyak anggota DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin	Penjumlahan anggota DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin	Jumlah	orang	menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	Tidak			Jumlah Anggota DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin	Pengumpulan Data Anggota DPRD Kab. Semarang	Kabupaten	Ya
3	Jumlah Anggota DPRD menurut komisi dan jenis kelamin	komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap	komisi DPRD	Semakin besar nilainya artinya semakin banyak anggota DPRD menurut komisi di DPRD dan jenis kelamin	Penjumlahan anggota DPRD menurut komisi dan jenis kelamin	Jumlah	orang	menurut komisi dan jenis kelamin	Tidak			Jumlah Anggota DPRD menurut komisi dan jenis kelamin	Pengumpulan Data Anggota DPRD Kab. Semarang	Kabupaten	Ya
4	Jumlah Anggota DPRD menurut jabatan dan jenis kelamin	Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas : 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 45 - 50 orang ; 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD yang beranggotakan 20-44 orang	pimpinan DPRD	Semakin besar nilai maka artinya semakin banyak anggota DPRD menurut jabatan dan jenis kelamin	Penjumlahan semua anggota DPRD menurut jabatan dan jenis kelamin	Jumlah	orang	menurut jabatan dan jenis kelamin	Tidak			Jumlah Anggota DPRD menurut jabatan dan jenis kelamin	Pengumpulan Data Anggota DPRD Kab. Semarang	Kabupaten	Ya

DESA KALISIDI

Judul Kegiatan		Penyusunan Direktori Data Desa Kalisidi	
Tahun		2023	
Jenis Statistik		Statistik Sektoral	
Cara Pengumpulan Data		Pencacahan Lengkap	
Sektor Kegiatan		Demografi Dan Kependudukan	
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak	
Identitas Rekomendasi:		-	
I. Penyelenggara			
1,1	Instansi Penyelenggara	Pemerintah Desa Kalisidi	
1,2	Alamat	Jl. Intan Raya No. 1 Kalisidi	
1,3	Telepon	(024) 3424237	
1,4	Faksimile	-	
1,5	Email	Pemdeskalisidi@gmail.com	
II. Penanggung Jawab			
2,1	Unit Eselon Penanggung Jawab		
	Eselon 1	-	
	Eselon 2	-	
2,2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)		
	Nama	Dimas Prayitno Putra, Se	
	Jabatan	Kepala Desa Kalisidi	
	Alamat	Jl. Intan Raya No. 1 Kalisidi	
	Telepon	(024) 3424237	
	Faksimile	Dimasprayitno@gmail.com	
	Email	-	
III. Perencanaan dan Persiapan			
3,1	Latar Belakang	Begitu Banyaknya Permintaan Data Ke Desa, Namun Selama Ini Tidak Ada Feed-back Data Ke Desa. Sehingga Desa Kalisidi Ingin Memiliki Direktori Data Desa Mandiri Yang Mampu Mencakup Seluruh Informasi Penduduk Dan Memiliki Karakteristik Yang Dibutuhkan Desa Sebagai Dasar Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan.	

3,2	Tujuan Kegiatan		1. Menyusun Direktori Data Desa Kalisidi 2. Desa Memiliki Data Individu Dan Keluarga 3. Data Yang Dimiliki Akan Digunakan Sebagai Dasar Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan			
3,3	Rencana Jadwal Kegiatan					
	A. Perencanaan					
	1	Perencanaan Kegiatan	25 Juli 2023 s/d 28 Juli 2023			
	2	Desain	29 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023			
	B. Pengumpulan					
	3	Pengumpulan Data	01 Agustus 2023 s/d 30 September 2023			
	C. Pemeriksaan					
	4	Pengolahan Data	01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023			
	D. Penyebarluasan					
	5	Analisis Data	01 November 2023 s/d 15 November 2023			
6	Diseminasi Hasil	16 November 2023 s/d 30 November 2023				
7	Evaluasi	01 Desember 2023 s/d 09 Desember 2023				
3,4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:					
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)	
	1	Jumlah anggota keluarga	jumlah anggota keluarga responden berdasarkan Kartu Keluarga	Anggota Keluarga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu keluarga	2023	
	2	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	status kepemilikan bangunan tempat tinggal	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati merupakan status kepemilikan dari bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal oleh anggota keluarga. Status rumah yang ditempati ini harus dilihat dari sisi anggota keluarga yang mendiaminya	2023	
	3	Status lahan tempat tinggal yang ditempati	status kepemilikan lahan tempat tinggal	Status penguasaan lahan tempat tinggal yang ditempati merupakan status kepemilikan dari lahan yang difungsikan sebagai tempat tinggal oleh anggota	2023	

				keluarga. Status lahan yang ditempati ini harus dilihat dari sisi anggota keluarga yang mendiaminya.			
IV. Desain Kegiatan							
4,1	Kegiatan ini dilakukan			Berulang			
4,2	Frekuensi Penyelenggaraan			Tahunan			
4,3	Tipe Pengumpulan Data			Cross Sectional			
4,4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data			Sebagian Wilayah Indonesia			
4,5	Wilayah Kegiatan						
	1	JAWA TENGAH		SEMARANG			
4,6	Metode Pengumpulan Data			Wawancara			
4,7	Sarana Pengumpulan Data			Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)			
4,8	Unit Pengumpulan Data			Rumah Tangga			
VI. Pengumpulan Data							
6,1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?			Tidak			
6,2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data			Supervisi			
6,3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?			Tidak			
6,4	Petugas Pengumpulan Data			Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak			
6,5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data			Sma Atau Smk			
6,6	Jumlah Petugas						
	Supervisor/penyelia/pengawas			8			
	Pengumpul data/enumerator			16			
6,7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?			Ya			
VII. Pengolahan dan Analisis							
7,1	Tahapan Pengolahan Data						
	Penyuntingan(Editing)			Ya			
	Penyandian(Coding)			Ya			
	(Data Entry)			Ya			
	Penyahihan(Validasi)			Ya			

7,2	Metode Analisis	Deskriptif	
7,3	Unit Analisis	IndividuRumah Tangga	
7,4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Lainnya: Desa	
VIII. Diseminasi Hasil			
8,1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum		
	Tercetak(Hardcopy)	Ya	
	Digital(Softcopy)	Ya	
	Data Mikro	Tidak	
8,2	Rencana Rilis Produk Kegiatan		
	Tercetak(Hardcopy)	17/11/2023	
	Digital(Softcopy)	17/11/2023	
	Datamikro		

METADATA VARIABLE

No	Nama Variabel	Alias/Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Jumlah Anggota Keluarga	- Anggota Keluarga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu keluarga, baik yang berada di keluarga maupun yang sementara tidak ada pada waktu pencacahan (Kepala keluarga, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, pembantu atau anggota keluarga lainnya)	Jumlah anggota keluarga responden berdasarkan Kartu Keluarga	-	2023	-	orang	integer	- =	Jumlah anggota keluarga harus sama dengan jumlah baris yang terisi pada rincian Blok IV	Jumlah anggota keluarga	Ya
2	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	- Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati merupakan status kepemilikan dari bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal oleh anggota keluarga. Status rumah yang ditempati ini harus dilihat dari sisi anggota keluarga yang mendiaminya	status kepemilikan bangunan tempat tinggal	-	2023	-	-	integer	1 = Milik Sendiri2 = Kontrak/Sewa3 = Bebas Sewa4 = Dinas5 = lainnya	Pilihan jawaban yang di lingkari harus sama dengan angka yang dituliskan pada kotak	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	Ya
3	Status tempat tinggal yang ditempati	- Status penguasaan lahan tempat tinggal yang ditempati merupakan status kepemilikan dari lahan yang difungsikan sebagai tempat tinggal oleh anggota keluarga. Status lahan yang ditempati ini harus dilihat dari sisi anggota keluarga yang mendiaminya.	status kepemilikan lahan tempat tinggal	-	2023	-	-	integer	1 = Milik Sendiri2 = Milik Orang Lain3 = Tanah Negara4 = Lainnya	pilihan jawaban yang di lingkari harus sama dengan angka yang dituliskan pada kotak	Status kahan tempat tinggal yang ditempati	Ya

METADATA INDIKATOR

No	Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pengembangan	Yasrabul Keterampilan	Yasrabul Keterampilan	Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
1	Perentase keluarga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati	Banyaknya keluarga menurut kategori tertentu dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati dibagi dengan banyaknya keluarga keseluruhan	Banyaknya keluarga menurut kategori tertentu dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati dibagi dengan banyaknya keluarga keseluruhan	semakin tinggi persentase keluarga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati dibagi dengan banyaknya keluarga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal dengan kategori tersebut	semakin tinggi persentase keluarga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati dibagi dengan banyaknya keluarga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal dengan kategori tersebut	persentase	persen	wilayah status kepemilikan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati	Tidak	nama Publitas Keterampilan	nama Publitas Keterampilan	Desa	Ya	
2	Rata-rata banyaknya anggota keluarga	Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga	Rata-rata banyaknya anggota keluarga	semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraan	Rata-rata banyaknya anggota keluarga dihitung dari jumlah penduduk dibagi dengan jumlah penduduk	rata-rata	orang	wilayah status kepemilikan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati	Tidak	nama Publitas Keterampilan	nama Publitas Keterampilan	Desa	Ya	
3	Perentase keluarga menurut status kepemilikan lahan tempat tinggal	Banyaknya keluarga menurut kategori tertentu dari status kepemilikan lahan tempat tinggal yang ditempati dibagi dengan banyaknya keluarga keseluruhan	Banyaknya keluarga menurut kategori tertentu dari status kepemilikan lahan tempat tinggal yang ditempati dibagi dengan banyaknya keluarga keseluruhan	semakin tinggi persentase keluarga menurut status kepemilikan lahan tempat tinggal yang ditempati dibagi dengan banyaknya keluarga dengan status kepemilikan lahan tempat tinggal dengan kategori tersebut	semakin tinggi persentase keluarga menurut status kepemilikan lahan tempat tinggal yang ditempati dibagi dengan banyaknya keluarga dengan status kepemilikan lahan tempat tinggal dengan kategori tersebut	persentase	persen	wilayah status kepemilikan status kepemilikan lahan tempat tinggal yang ditempati	Tidak	nama Publitas Keterampilan	nama Publitas Keterampilan	Desa	Ya	